



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

**RAPAT DENGAR PENDAPAT/RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI IV
DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	16
Jenis Rapat	:	RDP/RDPU Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian serta Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Perkebunan.
Hari, Tanggal	:	Senin 25 November 2019
Pukul	:	15.00 s.d. 20.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Ketua Rapat	:	G.BUDISATRIO DJIWANDONO (F-GERINDRA)
Sekretaris Rapat	:	-
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	:	1. Membahas Prospek Pengembangan Usaha Kelapa Sawit dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha; dan 2. Lain-lain.

**Anggota DPR yang : F-PDIP
Hadir**

1. SUDIN, S.E.
2. Drs. I MADE URIP, M.Si.
3. Ir. EFFENDI SIANIPAR
4. H. YADI SRIMULYADI
5. Ir. MINDO SIANIPAR
6. YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.
7. VITA ERVINA, S.E.
8. Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.
9. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
10. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.

F-PG

1. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
2. FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
3. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.
4. Ir. ICHSAN FIRDAUS
5. BUDHY SETIAWAN
6. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.

F-GERINDRA

1. G. BUDISATRIO DJIWANDONO (WAKIL KETUA)
2. Ir. HENDRO HERMONO, M.B.A.
3. DR. Ir. Hj. ENDANG SETYAWAI THOHARI, DESS., M.Sc.
4. Ir. H. T.A. KHALID, M.M.

F-NASDEM

1. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si. (WAKIL KETUA)
2. H. SULAEMAN L. HAMZAH

F-PKB

1. DANIEL JOHAN, SE (WAKIL KETUA)
2. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.
3. EDWARD TANNUR, S.H.

F-PD

1. DR. H. SUHARDI DUKA, M.M.
2. MUSLIM, S.HI., M.M.
3. BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.

F-PKS

1. drh. SLAMET
2. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.

F-PAN

-

F-PPP

-

- Undangan** :
1. Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan);
 2. Joko Supriyono (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia);
 3. Ir. Gulat Manurung, M.P. (Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia);
 4. Rino Afrino, S.T., M.M. (Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia);
 5. Sutoyo (Bendahara Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Perkebunan).

JALANNYA RAPAT

(RAPAT DIMULAI PUKUL 15:00 WIB)

KETUA RAPAT/FGERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI

Yang terhormat Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian beserta jajarannya.

Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia beserta jajaran.

Yang terhormat Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia beserta jajaran.

Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Plasma PIR Indonesia beserta jajaran.

Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I tahun sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019 dan keputusan Rapat Interim Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019, pada hari ini Senin, tanggal 25 November 2019 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan RDP dan RDPU dengan Dirjen perkebunan Kementerian Pertanian, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan Ketua Umum Asosiasi Plasma PIR Indonesia dalam rangka membahas prospek pengembangan usaha kelapa sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha serta lain-lain.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI saat ini RDP Komisi IV DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh 27 anggota dari 54 anggota Komisi IV DPR RI dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, RDP RDPU hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

(RAPAT: DISETUJUI)

RDP RDPU hari ini dimulai pada pukul 15.00 dan akan diakhiri pada pukul 17.00, apabila belum selesai dapat dilanjutkan Sesuai dengan Pasal 226 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat dan sedang bacakan;
2. penjelasan Dirjen serta para ketua umum asosiasi terhadap agenda rapat;
3. tanggapan anggota Komisi IV DPR RI;
4. jawaban Dirjen serta para ketua umum asosiasi;
5. kesimpulan rapat dan;
6. penutup.

Apakah acara tersebut bisa disetujui? Setuju?

(RAPAT: DISETUJUI)

Hadirin yang berbahagia.

Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2019 yang tumbuh sekitar 3,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PDB rata-rata perkebunan selama 2015-2017 meningkat rata-rata 7,35% atau mengungguli PDB migas dan panas bumi. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang memiliki andil yang cukup besar dalam pembangunan perekonomian negara, karena produksinya dapat digunakan untuk berbagai peruntukan seperti minyak masak, minyak industri, maupun biodiesel.

Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan pangsa pasar sebesar 54,19% negara memiliki potensi yang sangat besar dalam memasarkan minyak sawit dan produk turunannya. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan atau permasalahan dalam industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit antara lain: peningkatan produksi substitusi CPO di beberapa negara pengguna minyak sawit, perang dagang khususnya terkait dengan biodiesel, isu lingkungan yang berkaitan dengan deforestasi, hingga permasalahan terkait dengan penegakan hukum, antara lain: persoalan Hak Guna Usaha (HGU), tumpang tindihnya perkebunan dengan pertambangan, dan masih terdapat perkebunan yang menggarap di luar kawasan yang seharusnya diusahakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI meminta para asosiasi industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang hadir pada rapat hari ini untuk memberikan pandangan, masukan, dan solusi yang berkaitan dengan prospek dan upaya pengembangan usaha kelapa Sawit di Indonesia. Pada rapat hari ini Komisi IV DPR RI menghadirkan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian agar setiap permasalahan, masukan, maupun aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusi secara bersama-sama.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dirjen serta para ketua umum asosiasi untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas.

Kami persilahkan.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI

Yang kami hormati Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit

Yang kami hormati Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit

Yang kami hormati Ketua ASPEKPIR

Bapak Ibu sekalian, jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang kami banggakan.

Pertama-tama tentu kami menyampaikan terima kasih atas undangan Komisi IV DPR RI untuk membahas salah satu topik yang sangat prospektif dengan judul prospek pengembangan usaha kelapa sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha. Namun sebelumnya Pak Pimpinan dan anggota kami perkenalkan di sebelah kanan saya ini para eselon II kami.

Sebelah kanan saya adalah Sesditjen Perkebunan. Kemudian sampingnya adalah Direktur Tanaman Semusim dan Rempah sekaligus Plt Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar karena direktornya pensiun Bapak/Ibu sekalian. Kemudian sampingnya lagi adalah Direktur Perbenihan, Saleh Mokhtar, sampingnya lagi adalah Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Dan di belakang saya ada Direktur Perlindungan. Kemudian kami punya UPT Balai Besar, Pimpinan dan anggota, di tiga tempat. Surabaya, Medan, dan Ambon. Ini yang hadir adalah Pak Azwin dari Ambon, Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan. Kemudian Pak Krisno dari Surabaya. Pak Krisno berdiri. Kemudian Pak Sigit dari Medan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman perkebunan.

Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI, Bapak/ibu sekalian yang kami hormati.

Berikut kami sampaikan beberapa hal tentu tidak pada posisi yang lengkap, tapi ini adalah hal-hal penting di dalam kerangka kita untuk pengembangan kelapa sawit baik itu nanti adalah potret saat ini kemudian juga strategi kita pengembangannya seperti apa, tantangannya yang di depannya seperti apa, dan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi seperti apa. Terus kami akan membahas lima hal dari apa yang sudah kami sampaikan tadi. Pertama akan kami sampaikan peran kelapa sawit di dalam perekonomian tentunya. Tantangan, dan strategi pengembangannya.

Kemudian yang kedua kami akan paparkan keragaan kelapa sawit saat ini. Kemudian nanti ada satu topik program yang utama, yang juga menjadi bagian penting di dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat kita, adalah peremajaan sawit rakyat. Kemudian yang keempat terkait dengan standarisasi, sertifikasi. Kami akan menjelaskan dan melakukan sekaligus melaporkan terkait dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil System* atau ISPO. Dan yang kelima adalah prospek pengembangan sawit ke depan.

Bapak Ibu sekalian.

Kalau kita lihat peran, peran kami tampilkan di sini data ekspor kita terkait dengan sawit kita. Angka tetap 2018 ini mencapai nilai Rp 265 triliun, ini satu nilai yang besar. Oleh karena itu memang di dalam konteks devisa negara sawit masih memiliki peran yang sangat strategis dan penting di dalam perekonomian kita. Yang kedua yang sangat signifikan terkait dengan ketenagakerjaan, lapangan kerja juga demikian merekrut 16,3 juta. Kalau kita bilang 4,3 juta itu adalah langsung dan 12 juta adalah tidak langsung. Kemudian yang ketiga terkait dengan upaya kita untuk *sustainable* energi kita, energi baru dan terbarukan. Sawit kita juga memiliki peran yang sangat penting yang berkaitan dengan biodiesel. Nanti kami akan sampaikan bahwa kita akan mengalami peningkatan produksi dan peningkatan pemanfaatan B20 atau B30 dan prospek ke depan terkait dengan inovasi B100 dan berbagai alternatif inovasi teknologi energi yang lainnya.

Kemudian bagaimana tantangannya Bapak/ibu sekalian, Pimpinan dan anggota yang kami hormati? Yang pertama kita soal data kami laporkan sebenarnya pemerintah sudah melakukan rekonsiliasi data tapi belum final, segera pada akhir tahun ini kami akan *lauch* mengenai satu data sawit. Tapi untuk sementara kami klaim

sebagai kita belum tersedianya satu data. Sehingga nanti ada upaya kita untuk segera *me-launch* dari pada data itu, yang saat ini tentu nanti akan kami sampaikan berapa luasnya dan produktivitas serta produksinya.

Dari perspektif produktivitas sawit kita, rata-rata nasional kita baru mencapai 3,6 padahal kita punya *clone* atau varietas yang potensial dikembangkan dengan produktivitas 5,6 bahkan lebih dari itu. Ton per hektar per tahun. Kemudian permasalahan yang tidak kalah pentingnya untuk bisa kita cermati adalah berkaitan dengan sawit di kawasan. Itu juga menjadi tidak sekedar hanya diskusi tapi jadi permasalahan yang harus kita pecahkan. Informasi data yang kami peroleh dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) ada 3 juta sawit kita berada di kawasan.

Kemudian juga tantangan berikutnya berkaitan dengan legalitas dan perizinan. Tadi disampaikan oleh pimpinan menyinggung masalah tumpang tindih perizinan, dan juga sawit kita yang ada di kawasan, legalitas kebun kita, dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 2 hal tersebut menjadi bagian penting tantangan kita yang harus kita selesaikan. Kemudian juga tidak kalah perlu pencermatan adalah gangguan usaha dan konflik. Tidak sedikit konflik antara inti plasma yang berkaitan dengan pengelolaan kebun. Itu juga menjadi bagian penting kami di pemerintahan tentu dengan dukungan Komisi IV DPR RI untuk memfasilitasi permasalahan yang berkaitan dengan konflik tersebut.

Kerusakan lingkungan dan kebakaran, di Raker juga sempat kita bahas. Pimpinan dan anggota, bahwa kita memberikan satu *guidance* atau satu pedoman agar di dalam pembukaan lahan itu tanpa bakar. Tapi pada faktanya di lapangan masih terjadi cukup signifikan. Kalau kita lihat di dalam perspektif pertanian saja, artinya di luar kawasan itu tidak kurang tahun ini ada 22 ribu hektar yang mengalami kebakaran. Kemudian kita juga paham berkaitan dengan *negative campaign* khususnya Uni Eropa, ini yang menuntut kita untuk bisa negosiasi, lobi, dan juga memberikan satu solusi dalam kerangka yang berkaitan dengan RED II ini.

Nah yang juga menjadi penting tantangan kita apa? Bapak/Ibu Pimpinan, dan anggota adalah hilirisasi. Kalau kita lihat bahwa kita masih fokus utama adalah CPO tetapi dari pati produk daripada sawit ini sangat banyak. Kami mencatat lebih dari 80 dari pati produk yang belum secara optimal kita kembangkan. Untuk itu kami membuat satu upaya yang kami pandang sebagai yang strategis. Di samping berkaitan dengan data, tadi kami laporkan untuk data rekonsiliasinya mendekati final sehingga nanti kita menetapkan dan *me-launch* dari pada data itu sehingga ada hanya satu data sawit di negeri ini.

Kemudian yang berkaitan dengan upaya kita untuk meningkatkan produktivitas adalah melalui peremajaan sawit rakyat kita. Kami mencatat potensi sawit rakyat kita yang perlu diremajakan itu 2,4 juta hektar. Ini satu luasan yang sangat signifikan yang sangat luas yang harus menjadi perhatian kita meskipun produksi kita sudah melimpah, tanda petik kita juga masih punya peluang untuk meningkatkan itu melalui peningkatan produktivitas sawit kita.

Yang kedua berkaitan dengan energi. Tentu bawa sekalian kami laporkan nanti secara lebih detil mengenai pendataanya berkaitan dengan tahun depan kita sudah pada posisi B30 dan juga peluang untuk mengembangkan inovasi yang berkaitan dan B100, kemudian POME bihidrokarbon juga menjadi bagian penting pada manakala kita untuk pengembangan daripada prospek pengembangan energi kita ke depan.

Kemudian berikutnya adalah upaya kita untuk sertifikasi. Kita sudah memiliki apa yang kita sebut dengan ISPO *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang menjadi bagian penting kita sempurnakan setiap saat karena pada saat ini keberterimaan global masih perlu kita tingkatkan daripada kualitas ISPO kita. Nanti kami akan detilkan mengenai ini.

Kemudian kami laporkan Bapak/Ibu Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Bapak/ibu sekalian kita sudah membahas dan menyusun *road map* kelapa sawit nasional kita tinggal 2045. Namun kami mohon maaf sampai saat ini finalnya belum selesai, kami janji dalam waktu 1 sampai 2 minggu *road map* itu kami selesaikan nanti akan kami sampaikan kepada Komisi IV DPR RI yang berkaitan dengan upaya-upaya kita ke depan sampai 2045 seperti apa.

Yang berikutnya adalah upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana kebun sawit kita. Tentunya adalah fokus kepada sawit rakyat kita. Itu juga perlu dukungan dari badan infrastruktur dan sarana, aslin memadai sehingga kita bisa memberikan fasilitas kepada pekebun rakyat kita. Yang berikutnya adalah pengembangan SDM. Ini tentunya kita fokus kepada vokasional, pelatihan, dan pendidikan, dan berbagai upaya lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM kita.

Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya kita untuk memperbaiki tata kelola. Tadi kami sampaikan di awal bahwa kita masih belum optimal mengelola prospek daripada pengembang sawit kita ini hingga saat ini. Dan ada peluang-peluang untuk berkaitan dengan hilirisasi masih sangat terbuka lebar. Kemudian peningkatan produktivitasnya pun juga masih ada peluang cukup besar pada posisi 2,4 juta hektar tadi.

Dan yang terakhir kaitannya dengan upaya kita *strengthen* atau meningkatkan, memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan pekebun kita. Baik, terus saja. Kami akan sampaikan berkaitan dengan potret kelapa sawit kita ditinjau dari perspektif teknis kita. Terus data ini adalah berkaitan dengan luas areal produktivitas dan produksi kelapa sawit beberapa tahun terakhir. Kami situ dari 1.980 sampai 2018. Bapak/ibu sekalian posisi ini masih pada posisi data statistik kita saat ini baik itu BPS maupun Direktorat Jenderal Perkebunan.

Posisi luas areal sawit kita untuk yang berkaitan dengan statistik perkebunan dan BPS kita pada posisi 14,33. Tadi kami sampaikan akan ada data baru, yang tadi kami sampaikan setelah rekonsiliasi mengenai satu data. Nanti segera akan kami sampaikan mengenai beberapa daripada luas areal itu. Dari perspektif areal itu kalau kita pisahkan antara perkebunan rakyat kemudian perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara, untuk komposisinya adalah terluas ada di perkebunan

besar swasta 55%, kemudian perkebunan rakyat 41% ditinjau dari luasannya, dan yang ketiga adalah perkebunan besar negara 4%.

Yang kedua mengenai data produksi, Bapak/ibu, para pimpinan dan anggota Komisi IV yang kami hormati. Di 2018 angka kita 40,57 ini adalah CPO, produksi CPO kita. Kalau kita tambahkan dengan kernelnya, itu mencapai 46 juta ton. Jadi ada ada kernel ada CPO. Nah kalau dilihat dari komposisinya kami laporkan perkebunan besar swasta memiliki proporsi terbesar 60% ditinjau dari produksinya, kemudian perkebunan rakyat 35%, dan perkebunan besar negara 5%. Bagaimana dengan produktivitasnya? kami laporkan tadi bahwa ini ada data yang kami jajarkan selama 5 tahun terakhir dari 2014 ke 2018.

Bicara mengenai produktivitas, posisi kita di 2018 3,64. Ada sedikit turun di 2016, ini kami analisis sebagai dampak el nino yang sangat ekstrem di 2015 itu mempengaruhi daripada produktivitas sawit kita. Meskipun tidak cukup signifikan 3,62 turun Jadi 3,59 tapi ini menjadi *lesson and learn* kita di dalam kerangka kita mengantisipasi dampak kekeringan terhadap produktivitas sawit kita.

Terus kalau kita lihat dari sebarannya Bapak/Ibu Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Bapak Ibu sekalian para hadirin. Ini sebaran. Dari total provinsi yang memiliki produksi sawit kurang lebih 22 provinsi yang memproduksi sawit, itu yang terbesar adalah di Riau. Riau adalah paling luas dari segi luasan areal nya di samping juga produksinya tentu. Kemudian yang kedua disusul oleh Kalimantan Barat 2,5 kemudian juga Sumatera Utara 1,7 kemudian Kalteng 1,5 kemudian Sumsel 1,1 dan seterusnya. Ini persebaran di berbagai provinsi menurut areal dan produksi nya.

Jadi dari Total luas 14,33 produksi kita CPO 40,56 dan produktivitas kita 3,64 juta ton per hektar. Kalau ini kita lihat dari kaitannya dengan negara-negara penghasil sawit, kita memang yang terbesar Bapak/Ibu sekalian. Kita menduduki 57%. Dan kalau kita kaitkan dengan yang kedua tentu adalah Malaysia, kemudian ini ada Kolombia dan juga Nigeria dan kemudian Thailand 4%. Ini komposisi kalau kita kaitkan dengan negara-negara penghasil sawit.

Bagaimana dengan ekspor kita? data 5 tahun terakhir 2014-2018 ini kami sampaikan antara produksi itu yang berwarna biru dan yang merah adalah ekspor sawit nya. Ekspor kita di 2018 itu tercatat 24,71 juta ton menurun dari 2017 30,99. tetapi jumlah ini sangat besar dan tentu yang menghasilkan daripada devisa negara adalah dari ekspor sawit ini. kemudian kalau kita lihat dari ke mana negara tujuannya? Bapak/Ibu sekalian, kami laporkan yang terbesar adalah ke India itu adalah 5,8 juta ton. Ini data di 2018 nilainya 33 triliun ke India, kemudian yang kedua adalah Cina 4,1 juta ton nilainya 24 triliun, kemudian yang ketiga adalah Belanda itu 2,6 juta ton ini mohon izin ada koreksi. Sudah di koreksi Bu Ana ya? tadi Mesir ini baru di bahan, Bapak/Ibu sekalian. Ton, kurang "ribu" mohon izin untuk kami koreksi. Itu adalah Itali dan juga di Mesir itu nilainya kurang "ribu". Baik ini Bapak/Ibu sekalian yang tujuan ekspor sawit kita ke beberapa negara.

Terus yang berkaitan dengan harga saat ini kami laporkan pada sudah pada posisi USD 710 per ton. Nah ini kami kami sudah *adjust*, kami perbedakan antara CPU domestik dan juga PKO domestik serta CPO internasional maupun PKO internasional.

CPO adalah *Crude Palm Oil*, PKO adalah *Palm Kernel Oil*. Kalau kita lihat di sini adalah ada penurunan secara umum Bapak/Ibu sekalian ini sudah harganya kami rupiahkan mohon izin untuk bisa dicermati nilainya adalah rupiah.

Secara umum memang ada penurunan yang cukup signifikan terutama yang berkaitan dengan harga kernel di pasar internasional, yang merah. Kemudian yang biru dengan segitiga ini adalah CPO internasionalnya juga sedikit mengalami penurunan. Yang berkaitan dengan CPO domestik dan PKO domestik ini grafiknya adalah yang kuning ini, kemudian fluktuasi bisa kita cermati disini untuk harga kernel di domestik juga demikian. Tapi secara umum ada penurunan harga sawit kita.

Terus bagaimana dengan harga TBS nya? Tandan Buah Segar. Bapak/Ibu, para Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Bapak/Ibu sekalian. Ini juga mengalami penurunan karena memang di dalam penetapan harga TBS ini yang sudah kami atur di dalam Permentan itu juga mendasarkan pada harga internasionalnya. Oleh karena itu tentu pada posisi harga internasional yang cenderung menurun akan berdampak pada harga TBS. Tapi dengan kenaikan harga saat ini tentu akan membuat peluang di dalam peningkatan harga TBS sawit rakyat kita yang lebih baik lagi. Sekarang kami catat terendah adalah 1.142 ini Desember 2018 kemudian harga tertingginya 2.000. Tentu ini pada posisi 2017 hingga 2018. Kalau kita cermati masih ada penurunan lagi di 2019.

Baik, Bapak/Ibu sekalian izinkan kami melanjutkan untuk topik permasalahan sawit rakyat kita. Tadi kami di awal kami laporkan bahwa ada potensi 2,4 juta hektar sawit rakyat kita yang harus di *replanting* dari Total luas sawit rakyat kita 5,61 juta. Di sini sengaja kami masukkan data yang berkaitan dengan proyek-proyek terdahulu karena supaya nanti ada kita memudahkan di dalam konteks data untuk proses daripada peremajaan sawit rakyat kita. Ini ada terdiri dari yang 2,4 adalah 2,12 juta hektar adalah swadaya, kemudian 153 ribu hektar adalah (suara tidak jelas) PIR-Bun kemudian Plasma PIR Trans nya 136 ribu hektar.

Dari tahun 2017 kami menargetkan 20,780 nanti realisasinya akan kami laporkan pada tabel berikutnya. 2018 185 ribu, 2019 ada revisi target dari 200 ribu menjadi 180 ribu. Kemudian seterusnya rata-rata hanya kita targetkan setiap tahun 180 hektar. Nah ini Bapak/Ibu sekalian kami laporkan sebaran target peremajaan sawit di setiap provinsi. Di 2019 dari 180 ribu itu yang tersebar di Sumatera jumlahnya 122 ribu hektar. Ini paling luas karena memang sawit kita yang usianya sudah tua berada di kawasan Sumatera. Kemudian Jawa adalah 2 ribu hektar, kemudian Kalimantan 34 ribu hektar, Sulawesi 18 ribu hektar, dan Papua 2.200 hektar. Ini targetnya adalah 21 provinsi kami laporkan Bapak/Ibu Pimpinan dan anggota di 103 kabupaten di 2019.

Kami juga ingin melaporkan upaya-upaya terobosan yang bisa kami lakukan di dalam 2019 ini melanjutkan 2017 dan 2018. Bahwa kami melakukan 2 hal simplifikasi, simplifikasi yang pertama adalah simplifikasi persyaratan. Jadi untuk mengusulkan rakyat kita mengusulkan daripada PSR itu yang tadinya syaratnya 14 persyaratan kemudian kita pangkas hanya menjadi 8 persyaratan untuk mensimplifikasi supaya memudahkan akses daripada pekebun rakyat kita untuk *replanting* di kebunnya.

Yang kedua berkaitan dengan simplifikasi prosedur. Semula kami lakukan, inginnya kami laporkan, Bapak/Ibu sekalian, inginnya detil. Tapi ternyata malah mempersulit daripada para pekebun rakyat kita, karena apa? Karena di setiap *level*/ kabupaten di verifikasi, di provinsi di verifikasi, kemudian di pusat di verifikasi. Itu yang membuat lama. Kemudian kami rubah di situ hanya sekali verifikasi tapi kami membuat tim terintegrasi yang beranggotakan pusat, provinsi, dan kabupaten. Ini simplifikasi yang berkait dengan prosedur.

Kami laporkan perkembangannya Bapak/Ibu, para Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI. Dari 2017 hingga 2019 Kementerian Pertanian memiliki tugas untuk mengeluarkan rekomendasi teknis permasalahan sawit rakyat. Kemudian nanti Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit itu yang mentransfer uangnya. 1 hektar didanai dengan 25 juta dan maksimum pengusulan hanya 4 hektar, setiap usulan. Nah ini Bapak/Ibu sekalian, sampai sekarang kami laporkan realisasi rekomendasi teknis yang kami lakukan di Direktorat Jenderal Perkebunan itu mencapai luasan 116 ribu hektar. Kami nanti akan khusus melaporkan yang 2019 ada percepatan setelah kita merubah mensimplifikasi daripada persyaratan dan mekanisme.

Kalau kita lihat di 2018 dari target 185 kita hanya mampu merealisasikan kurang dari 34 ribu hektar, rekomendasi teknisnya karena tadi komplikasinya persyaratan yang banyak dan juga mekanismenya. Kemudian 2019 dari 180 ini data 68 ribu ini data per September. Segera kami laporkan, data per Oktober itu mencapai 88 ribu hektar hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan karena kita tidak *start* dari Januari Februari. Sehingga total rekomtek 116 ini BPDPKS baru mentransfer 68 ribu hektar dengan nilai 1,7 triliun. Ini yang terus diupayakan untuk supaya *in line* dengan rekomendasi teknisnya. Kalau ada 10 ya sebaiknya 10 segera di transfer.

Perlu juga kami sampaikan kepada para Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI bahwa yang disebut dengan *replanting* tentu ada tanaman di lapangan. Jadi sesungguhnya yang berkaitan dengan rekomtek dan juga transfer ini belum final daripada yang disebut sebagai *replanting*. Nah Kami nanti juga akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan realisasi di lapangan berkaitan dengan teknis *replanting*. Bapak/Ibu sekalian, itu yang perkembangan rekomendasi teknis dan transfer.

Kami mendapatkan angka dari BPDPKS, ini soal total pemungutannya. Tapi kami belum punya data yang sudah di *spending* berapa. Tentu tidak 47 triliun lagi karena sudah di *spending*. Baik itu untuk energi untuk juga peremajaan sawit rakyat, maupun juga untuk yang lain. Yang lain itu ada sarana prasarana, ada untuk riset, ada untuk PSR sendiri, kemudian juga untuk peningkatan kapasitas SDM, dan juga untuk promosi. Nah itu yang kami terima dari BPDPKS. Tentu sekali lagi Bapak/Ibu sekalian ini pungutan 50 per ton ini umum saja. Tapi sebenarnya ada batasan. Nanti ada batasan kalau yang berkaitan dengan di sekitar ini 25ton nanti mungkin Pak Joko bisa lebih detil menyampaikan itu yang berkaitan dengan pungutan daripada dana perkebunan kelapa sawit ini dari ekspor.

Baik, berikutnya adalah mengenai ISPO Bapak/Ibu sekalian seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa kita mengupayakan untuk sertifikasi dan juga standarisasi agar produk sawit kita ini makin teradvokasi di pasar global, diterima

produk kita semakin *confidence* terhadap upaya-upaya kita menstandarisasi daripada produk-produk sawit kita itu. Ada beberapa aspek yang kita nilai dari ISPO ini. Yang pertama adalah aspek legalitasnya, dari aspek ekonominya, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan.

Yang berkaitan dengan prinsip dan kriteria bersinggungan dengan aspek yang akan kita nilai tentu Bapak/Ibu sekalian, ini adalah legalitas usaha perkebunan. Itu menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Demikian seterusnya yang berkaitan dengan manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan kawasan hutan gambut, pengelolaan bermuatan lingkungan, kemudian tanggung jawab sosial, tanggung jawab pekerja, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan serta keterlacakan *traceability* daripada rantai pasok kita Bapak/Ibu sekalian.

Kalau kita bisa menstandarisasi itu, kita bisa men-*trace* itu dulu asal dari pada CPO itu pada produksi dimana? itu yang sangat penting sekali. Nah terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan sampai saat ini perkembangan daripada sertifikasi ISPO kita ini per 20 September Bapak/Ibu sekalian kami laporkan, ini ada rapat berikutnya baru selesai 2 hari yang lalu. Berkaitan dengan perkembangannya sampai dengan 20 September 2019 yang sudah kita sertifikasi ada 566 sertifikat yaitu mencakup luasan 5,2 juta hektar sekitar 36% kalau itu dikaitkan dengan 14,33 juta hektar. Dengan produksi CPO 12,3 juta ton, ini mencakup 30% dari total produksi 40,57. Dan kita masih pada posisi produktivitas kita 3,64.

Ini adalah *digest* kalau kita kaitkan dengan perkebunan besar swasta yang menduduki paling banyak. Di sini juga rakyat yang menyangkut masalah koperasi juga sudah ada yang bisa merealisasikan mengenai sertifikasi ISPO ini. Nah ini jumlahnya Bapak/Ibu sekalian pelaku usaha perkebunan yang sudah ikut di dalam ISPO ada 754, 739 perusahaan, 11 KUD, kemudian 1 bumdes, dan tiga koperasi atau asosiasi kebun.

Terus berkaitan dengan keberterimaan, tentu kita terus meningkatkan, memperkuat standarisasi ISPO kita, Bapak/Ibu, para Pimpinan dan anggota yang kami hormati. Bahwa kita menggunakan indikator *sustainable development goals*. Dari 17 indikator itu, 12 sudah ter-*cover* di dalam ISPO kita. Itu artinya masih ada 5 yang harus kita upayakan untuk kita tingkatkan diantaranya adalah yang berkaitan dengan *life below water*. Ini yang biru ini Bapak/Ibu sekalian. Nah kita tentu akan mengupayakan dari perspektif peluang inovasi teknologi yang bisa dikembangkan yang berkaitan dengan energi. Baik itu yang kaitannya dengan ISPO.

Kemudian yang Bab 5, prospek pengembangan. Kami ingin menonjolkan tentu yang sampai saat ini belum kita kelola secara optimal. Apa itu? tadi kami sampaikan bahwa produk-produk turunan sawit kita masih belum secara optimal kita kembangkan. kami mencatat lebih dari 80 produk turunan yang belum ditangani secara optimal. Baik itu berkaitan dengan industri makanan, kemudian yang berkaitan dengan industri oleokimia, yang berkaitan dengan industri biofuel kita atau biodiesel kita.

Baik, yang berkaitan dengan biodiesel kita B20 Bapak/Ibu sekalian, ini perkembangannya dari 5 tahun terakhir 2014 sampai 2018 B20 kita dalam juta kiloliter ini ada fluktuasi produksi daripada B20 kita terakhir di 2018 cukup signifikan. Ada 6 juta kiloliter yang bisa digunakan, diproduksi menyerap maksudnya menyerap CPO sekitar 6 juta kiloliter. Nah ini tentu di *blanding* dengan solar kita untuk menjadi B20. Tahun depan meningkat menjadi B30. Itu kita perkirakan mencapai 10 juta ton serapan-serapan dari pada CPO kita untuk di-*bland*, dicampur dengan solar kita menjadi biodiesel B30. Jadi peningkatannya kalau kita bandingkan dari 2014 ke 2018 82%.

Baik, kami laporkan sedikit berkaitan dengan hitung-hitungan Bapak/Ibu sekalian, prospek pengembangan biodiesel B100 karena di Badan Litbang Pertanian kami telah menguji ada peluang memungkinkan B100. Artinya seluruhnya akan digunakan CPO dan kalau itu di bisa dieksekusi, ini hitung-hitungannya ini data tahun 2018 dari Kementerian ESDM. Kebutuhan solar kita 31 juta kiloliter. Kemudian produksi solar kita baru 20,8 kiloliter. Itu artinya kita masih harus mengimpor solar 10,39. Dengan B20 kita baru menjawab 6 juta kiloliter, masih ada kekurangan.

Nah yang berkaitan dengan efisiensi, kami laporkan bahwa Badan Litbang kami menguji efisiensi daripada penggunaan B100 itu. Dikaitkan, disandingkan, dengan kalau itu dibandingkan dengan solar. Ini diuji dengan mobil Hilux Toyota. Mohon maaf ini menyebut ya, supaya *clear* saja yang *double cabin* itu pada KM 6.173 kami mendapatkan laporan dari Litbang belum ada masalah di mesin. Untuk biodiesel nya 1 liter biodiesel itu bisa menempuh 13,1 kilometer kalau kita barengan dengan solar itu hanya 9,6 kilometer. Sehingga biodiesel lebih efisien itu dari tes daripada Badan Litbang kami. Tentu perspektif mengembangkan daripada biodiesel kita menggunakan B100 ini. Tentu, Bapak/Ibu sekalian, para Pimpinan dan anggota kami perlu dukungan daripada Bapak Ibu Pimpinan dan anggota untuk bisa mengembangkan ini dari perspektif regulasi dan seterusnya. Supaya kita bisa melihat kan dengan industri otomotifnya.

Tentu saat ini, dulu desain mobil itu tidak di desain untuk bahan bakar sawit biodiesel. Nah nanti tentu kita komunikasikan kalau itu supaya tidak terjadi permasalahan ke depan tentu ada modifikasi daripada mesinnya yang adaptif terhadap bahan bakar biodiesel kita. Baik, terus dari aspek lingkungan juga sangat menjanjikan.

Kalau kita bandingkan B20 sudah cukup kontribusinya cukup signifikan, tetapi kalau kita ganti dengan B100 upaya untuk menurunkan permasalahan lingkungan itu akan lebih besar lagi. Ini maknanya kalau kita kaitkan dengan indikator total hidrokarbon tak terbakar. Itu artinya polusinya bisa dikurangi. Kalau menggunakan B20 baru bisa mengurangi 20% terhadap emisi yang oleh solar. Tapi kalau kita bandingkan dengan B100 bisa berkurang 67% dan seterusnya untuk yang berkaitan dengan sulfat potensi ozon, kemudian karbon monoksida.

Baik, Bapak/Ibu sekalian terus saya sedikit lagi, ini kami tunjukkan foto-foto yang berkaitan dengan reaktor biodieselnnya. Di Badan Litbang kami dikembangkan di Balai Penelitian Tanaman Industri di Sukabumi untuk memproduksi ini biodieselnnya ini, CPO nya untuk bisa dan kita membangun stasiun mini khusus CPO di

Kementerian Pertanian untuk beberapa penggunaan baik saat sampai saat ini masih dalam tahap uji.

Baik itu yang kami ingin sampaikan Bapak/Ibu sekalian. Tentu kami mohon arahan Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan tentu pada posisi diskusi nanti tentu akan sangat bisa kita bahas lebih besar lagi.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Dirjen atas paparannya cukup komprehensif. Kami persilahkan berikutnya para Ketua Umum Asosiasi mungkin dalam kesempatan ini boleh memperkenalkan kepada anggota-anggota kami.

Terima kasih. Kami persilahkan waktu dan tempatnya..

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat sore.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Pimpinan dewan, khususnya Pimanan Komisi IV.

Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Dirjenbun beserta seluruh jajarannya.

Rekan-rekan Ketua Asosiasi, ada Ketua Asosiasi Petani APKASINDO, ada asosiasi PIR, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Sebelumnya kami juga ingin memperkenalkan. Saya sendiri adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Nama saya Joko Supriyono. Saya ditemani beberapa pengurus. Pak Fadhil Hasan, mohon berdiri Pak Fadhil Hasan. Pak Fadhil Hasan adalah salah satu Ketua GAPKI. Kemudian yang kedua ada Pak Taufan. Ini adalah Ketua bidang komunikasi Kemudian Pak Mukti sebagai *eksekutive director* di GAPKI. Enggak banyak cuma 4 orang.

Bapak/Ibu sekalian

Pimpinan yang saya hormati.

Tadi presentasi Pak Dirjen sudah sangat lengkap jadi saya tidak ingin mengulang nanti saya akan menambahkan beberapa saja supaya tidak terjadi *redundant*. Yang penting adalah GAPKI. Jadi Bapak/Ibu sekalian GAPKI sebenarnya adalah asosiasi atau organisasinya para perusahaan perkebunan yang konsentrasi kami sebenarnya di Hulu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan bahwa GAPKI ini adalah urusannya produksi CPO. Jadi sebagaimana Bapak/Ibu lihat bahwa masih

ada asosiasi yang lain ya. Ada asosiasi petani bahkan ada beberapa asosiasi yang di sektor hilir.

Tadi Pak Dirjen menyampaikan biodiesel, ada asosiasinya sendiri nanti di oleh *chemical* ada asosiasi sendiri. Jadi memang banyak asosiasi di di Sawit ini yang sebenarnya juga bernaung di bawah satu asosiasi besar yaitu Dewan Minyak Sawit Indonesia. GAPKI sendiri anggotanya 730 perusahaan jadi catatannya adalah memang belum semua perusahaan perkebunan menjadi anggota GAPKI. Itu biasalah di mana-mana pasti selalu ada yang mau ada yang tidak. Dan kami punya cabang di 13 provinsi yang menjadi sentra produksi kelapa sawit.

Mungkin saya akan menambahkan beberapa poin saja karena tadi Pak Dirjen sudah sampaikan. Pertama adalah dari berkaitan dengan topik yang dibahas dalam prospek. Saya akan bicara pertama mengenai situasi pasar global. Jadi kalau kita bicara pasar global, minyak kelapa sawit adalah menjadi bagian dari *vegetable oil* atau minyak nabati global. Banyak minyak nabati yang lain yang terkenal misalnya dalam minyak kedelai, minyak kanola, *grapeseed*, dan minyak bunga matahari atau *sunflower*. kira-kira 5 besar adalah selalu dikatakan sawit, *grapeseed*, sunflower dan kedelai.

Kalau kita lihat secara pasar global sebenarnya tren konsumsi minyak nabati itu selalu meningkat. Hal ini tentu karena sejalan dengan pertambahan populasi dunia naiknya *income* per kapita di beberapa negara khususnya negara berkembang sehingga konsumsi yang terus meningkat ini memang mau tidak mau diimbangi oleh produksi yang juga terus meningkat. Yang menarik adalah bahwa ini data dari global dari *router* yang saya kutip, bahwa pertumbuhan produksi minyak nabati itu sebenarnya masih lebih rendah dari pertumbuhan dari *demand*.

Jadi di situ produksi itu tumbuh 34,5% ternyata *demand*-nya tumbuh 35,9%. Ini berarti bahwa sebenarnya *demand* sangat kuat di masa yang akan datang yang memang harus dipenuhi oleh peningkatan produksi yang lebih besar lagi. Dan tentu ini menjadi peluang bagi minyak sawit. Nah yang menarik juga adalah bahwa kalau kita lihat tren dari permintaan di pasar global bahwa penggunaan minyak nabati termasuk sawit yang selama ini didominasi untuk kepentingan *food* atau makanan kemudian belakangan juga tumbuh permintaan untuk penggunaan non makanan terutama adalah untuk industri dan biofuel. Bahkan industri, kebutuhan industri baik untuk *non food* maupun untuk biofuel itu justru tumbuh lebih tinggi dari makanan.

Jadi ini juga menjadi peluang bagi minyak nabati termasuk sawit untuk bagaimana bisa mengambil *opportunity* ini bagi kepentingan Indonesia. Terus, *next*. Nah jadi ini sekedar untuk menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir minyak sawit mendominasi pasar global yang dulunya dikuasai oleh minyak nabati yang lain. Di garis merah adalah *market share* dari minyak sawit yang mengalahkan minyak nabati lain baik itu kedelai, *grapeseed*, maupun *sunflower* sejak tahun 2006.

Selanjutnya, jadi tadi sudah bicara mengenai ekspor. Ekspor Indonesia, ekspor Sawit Indonesia sebenarnya kurang lebih ke 50 negara. Jadi ini saya tunjukkan kira-kira bahwa hanya 10 besar saja yang 1 juta lebih per tahunnya dan didominasi oleh tadi sampai kepada Dirjen adalah hak India dan Cina. Yang menarik adalah di garis

paling bawah adalah (suara tidak jelas). Inilah yang sedang dilakukan bersama antara pelaku usaha dengan pemerintah, bagaimana presiden meminta untuk melakukan diversifikasi pasar kepada negara-negara non tradisional.

Kalau kita lihat perkembangan pasar ekspor yang di luar pasar tradisional itu justru menunjukkan peningkatan yang cukup baik bahkan kelompok-kelompok pasar-pasar non tradisional sudah mengimpor tahun lalu 6,5 juta ton dan ini kalau dilihat pertumbuhannya adalah 16% per tahun. Jadi cukup menarik dan ini adalah sebagian besar dalam negara-negara di Afrika dan beberapa di Asia Timur.

Dan Bapak/Ibu sekalian yang menarik juga adalah kalau kita lihat ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar global sebenarnya ini sudah terjadi 10 tahun terakhir, itu sudah didominasi oleh produk turunan. Jadi kalau selama ini dikatakan kenapa kita ekspor mentah? sebenarnya tidak. Ekspor mentah kita tinggal yang biru itu, yang kira-kira CPOnya itu 22% selebihnya adalah ekspor dalam bentuk *Refined Olien RBD*, biodiesel maupun oleh *chemical*. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk hilirisasi.

Lanjut saja, terus. Jadi kira-kira kalau kita bicara Indonesia sampai 2018 memang produksi kita sampai 2018 kemarin trennya meningkat dan mencapai 47 CPO dan PKO. Ekspor kita Indonesia juga yang garis merah juga meningkat ya. Ekspor kita datanya agak beda sedikit dengan Pak Dirjen. Jadi catatan kita 34 juta ton. Yang menarik adalah bahwa garis merah dan ungu di bawah itu adalah pasar domestik, yang kuning itu adalah untuk kebutuhan pangan, dan yang ungu yang biru adalah untuk kebutuhan biodiesel domestic.

Jadi neraca sawit Indonesia sebenarnya menarik karena apa? Karena penggunaan domestik kita naik, baik untuk maupun *food* maupun *biofuel*. Di saat yang bersamaan kita tetap bisa menggunakan pasar ekspor, sehingga sebenarnya kita punya peluang untuk terus meningkatkan produksi karena memang *demand* dari pasar global maupun dalam negeri masih trennya meningkat.

Lanjut terus saja supaya cepat. Nah ini juga kira-kira kalau kita lihat proyeksi atau *forecast*, ini *forecast* versi kita. Kalau sampai tahun 2025 sebenarnya kami memproses *mem-forecast* produksi kita masih akan meningkat bahkan mungkin bisa sampai mencapai 60 juta ton. Nah yang biru itu adalah penggunaan domestik untuk *food*, untuk makanan sedangkan yang hijau adalah biodiesel. Biodiesel akan meningkat sangat signifikan sejalan dengan peningkatan dari B20 ke B30 bahkan mungkin lebih dari B30.

Kemudian juga yang biru yang ungu, itu adalah jika nanti teknologi *green* diesel itu bisa di implementasikan dalam skala komersial. Itu juga akan meningkat yaitu yang kita sebut dengan bio hidrokarbon. Dan yang merah itu yang sudah direncanakan dari tahun lalu jika nanti PLN juga bisa mengonsumsi CPO secara langsung itu juga akan menambah pasar domestik sehingga neraca kita kalau misalnya penggunaan domestik meningkat mungkin sejalan dengan peningkatan produksi yang tidak terlalu besar lagi. Memang ekspor kita mungkin akan sedikit mengalami *flat*. Jadi, nah tapi sekali lagi adalah bahwa kalau Indonesia masih perlu meningkatkan produksi, artinya bahwa pasarnya akan masih bisa menerima karena *demand* nya yang cukup besar.

Bapak/Ibu sekalian kalau kita bicara global, permintaan global dimana analisa banyak pakar mengatakan bahwa kebutuhan minyak nabati dunia untuk kebutuhan konsumsi maupun industri itu kira-kira 4,5 sampai 5 juta ton per tahun. Yang itulah yang kemudian diperebutkan oleh semua pemain minyak nabati termasuk sawit sehingga memang pasar global terjadi persaingan sangat ketat.

Seharusnya Indonesia atau sawit khususnya memiliki peluang besar karena sawit memiliki produktivitas yang tinggi sehingga memiliki daya saing yang lebih baik dari minyak nabati yang lain. Jadi Indonesia sebenarnya harus mengambil peluang permintaan minyak nabati global untuk diambil semaksimal mungkin untuk kepentingan Indonesia, sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan nasional.

Saya akan menyinggung sedikit mengenai apa yang tantangan yang kita hadapi sehubungan dengan pengembangan industri kelapa sawit. Yang pertama tadi sudah disinggung Pak Dirjen mengenai *productivity*. Saya tidak akan terlalu Panjang, tapi intinya bahwa peningkatan produktivitas itu mutlak tidak saja oleh perkebunan rakyat tapi juga oleh perkebunan besar. Karena apa? Karena kita menghadapi peningkatan biaya produksi yang susah dikendalikan karena memang upah kita naik sangat pasti setiap tahun sementara *productivity* dan harga belum tentu naik setiap tahun.

Jadi tantangan pertama yang memang kita harus *manage* sehingga sawit Indonesia tetap kompetitif dalam keadaan harga seperti apapun. Kita lihat tahun lalu hingga pertengahan tahun ini semua mengeluh karena harga yang rendah. Sebenarnya harga yang rendah akan terjadi berulang terus menerus. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempunyai efisiensi yang baik sehingga kita bisa tahan menghadapi pasar.

Tadi Pak Dirjen juga mengenai kampanye negatif. Saya ingin menggarisbawahi mengenai Eropa. Bahwa Eropa sudah meng-*adopt Delegated Act* RED II yang akan mulai melakukan pengurangan sawit untuk biodiesel pada mulai 2021 sampai 2030. Jadi seyogyanya ini diantisipasi dengan lebih serius oleh Indonesia baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah, karena apa? Karena pemberlakuan RED II oleh Eropa ini berdampak jangka panjang buat Indonesia.

Pertama adalah pasar kita ke Eropa 4,5 juta ton per tahun kira-kira 3 miliar dolar, pasti akan terganggu. Yang kedua adalah kalau Eropa ini nanti akan melanjutkan menerapkan regulasi ini bisa merembet ke yang lain-lain. Kalau sekarang adalah yang dibatasi adalah bahan baku untuk biodiesel tapi sangat mungkin terjadi jika ini nanti sukses maka yang untuk *food* pun akan dibatasi. Karena sekarang isu-isu mengenai kesehatan, *labelling*, mengenai 3-MCPD itu sudah mulai disuarakan di Eropa dan bukan tidak mungkin itu akan juga menjadi aturan yang nanti di-*adopt* oleh parlemen Eropa.

Oleh karena itu kami juga punya harapan, berharap supaya pemerintah dan juga mungkin parlemen karena ini juga sangat (suara tidak jelas) parlemen Eropa untuk terus bisa mengawal, mengantisipasi supaya dampak dari regulasi ini tidak dampak lebih luas lagi. Kemudian yang kedua yang kita hadapi dan perlu mendapat

dukungan para *stakeholder*, pemerintah, maupun parlemen adalah mengenai kepastian hukum atau kepastian dalam usaha dan investasi.

Beberapa hal tadi disinggung oleh Dirjen salah satunya adalah mengenai masalah tumpang tindih kawasan hutan. Ini sudah berlangsung cukup lama dan sampai hari ini juga belum ada penyelesaian baik itu perkebunan milik perusahaan yang tumpang tindih maupun apalagi perkebunan rakyat. Ini Pemerintah memang sudah mengeluarkan Perpres 88 mengenai Penyelesaian Perkebunan Dalam Kawasan Hutan. Namun menurut kami Perpres 88 ini lebih mengatur kepada penyelesaian melalui perhutanan sosial. Jadi solusi yang ditawarkan dan perhutanan sosial. Tentu perusahaan akan sulit untuk bisa meng-*adopt* menggunakan Perpres 88 untuk penyelesaian tumpang tindih.

Namun demikian saya juga diskusi dengan rekan kami, perhutanan sosial pun ternyata juga tidak mudah karena dalam Permen 83 mengenai Perhutanan Sosial ternyata juga sawit tidak masuk di dalam perhutanan sosial. Jadi ini menurut saya sih isu yang paling penting bahwa kalau tumpang tindih kawasan hutan ini baik perusahaan maupun rakyat ini tidak segera diselesaikan, tentu dampaknya akan meluas.

Terutama yang pertama adalah tentu kami punya masalah dengan ketidakpastian. Yang kedua adalah dengan masalah tumpang tindih ini, sertifikasi ISPO juga menjadi terhambat karena apapun alasannya jika terjadi tumpang tindih maka sertifikat ISPO tidak bisa dikeluarkan. Dan itu berarti akan menghambat pencapaian target *sustainability* pemerintah terutama kita semua. Dan yang ketiga tentu dengan isu tumpang tindih yang berlarut-larut, ini menjadi hambatan bagi perjuangan kita untuk melawan kampanye negatif di pasar global dan juga akan mengganggu keberterimaan minyak sawit Indonesia, *sustainable palm oil Indonesia* di pasar global.

Jadi sekali lagi kami berharap bahwa masalah ini nanti bisa di cepat diselesaikan dan tentu kami mendukung program pemerintah saat ini dalam melakukan deregulasi maupun saya dengar ada *omnibus law* yang mungkin akan bisa membantu menyelesaikan berbagai permasalahan ini. Demikian saya kira tambahan dari kami, melengkapi tadi yang sampaikan Pak Dirjenbun.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Walaikumsalam.

Para Bapak dan Ibu sekalian karena Ketua yang satu masih ada tamu, kami persilakan asosiasi sekarang petani kelapa sawit. Ya petani kelapa sawit silakan. Setelah itu tanggapan dari anggota. Yang terhormat Dapil kelapa sawit ini. Oh ada 3 asosiasi.

Silakan dari petani dulu.

KETUA UMUM ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT (Ir. GULAT MANURUNG, M.P.):

Terima kasih yang mulia.

Kami pada hari ini hadir 5 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat APKASINDO, yang kedua Pak Sekjen sedang di sana, Rino Afrino, yang ketiga Wakil Ketua DPP Pak Sahril, yang keempat itu Pak John, yang kelima itu yang di atas Pak Qoyuum. Kami memang lengkap hadir disini untuk menyampaikan apa yang menjadi pokok pikiran kami. APKASINDO itu berada di 22 provinsi, 117 kabupaten. 22 provinsi adalah pusat penghasil sawit. Kalau tadi GAPKI 13, wajar petani lebih banyak karena memang faktanya petani itu selalu mencoba yang terbaik untuk hidup.

Nah dari 22 provinsi Riau adalah merupakan Sentral produksi sawit yang pada saat ini merupakan titik-titik rentan dari sawit Indonesia karena Riau merupakan daerah yang paling banyak persoalannya, petaninya lebih banyak 56% itu dari pengusaha dan Riau adalah 76% dalam kawasan hutan. Ini yang menjadi mungkin titik beratnya. Yang kedua kami sampaikan di sini potensi daripada 117 kabupaten/kota seluruh Indonesia bahwa pada hari ini semua teman-teman kami menyaksikan melalui *live WA group* bahwa kita di sini rapat karena apa yang mereka sampaikan adalah sangat krusial.

Yang disampaikan oleh Dirjen Perkebunan benar. Persoalan ada, yang disampaikan sama Bapak dari GAPKI benar, persoalan ada. Tetapi kami sangat yakin apa yang tadi dikatakan oleh Pak Dirjen jika 100% telah mencapai B100, saya pikir kita enggak usah capek-capek memikirkan orang-orang dari Uni Eropa. ISPO adalah *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang mulia.

Mungkin Bapak sering melihat di berita, di mana-mana kenapa petani sawit tidak siap untuk ISPO? banyak hal tetapi yang perlu saya sampaikan di sini sambil menunggu *play*, bahwa memang ISPO itu adalah kewajiban. Di dalam Permentan 2011 di situ disebut bahwa petani itu adalah tidak wajib yang mulia, tidak wajib. Tetapi di dalam draf Perpres itu kami diwajibkan, kami enggak tahu akan apa yang terjadi setelah itu diwajibkan. Makanya kami menyurati kepada Presiden melalui dewan pembina kami itu Pak Moeldoko. Dewan kehormatan kami Pak Luhut Panjaitan juga sudah turun gunung. Kenapa kalian ribut, apa persoalan kalian?

Setelah kami jelaskan dari mereka mengerti bahwa petani itu belum siap karena kami masih dalam kawasan hutan. Apa hubungannya dengan ISPO? ISPO mensyaratkan utama adalah harus di luar kawasan hutan. Ibarat berpacaran harus positif negatif. Pabrik kelapa sawit sudah ber ISPO tentu buah yang masuk juga harus ber ISPO. Kalau ber ISPO, petani enggak ber ISPO, enggak laku barang itu Pak, akan menjadi busuk dan tidak berharga. Pada hari ini adalah hari yang membahagiakan kami.

Tadi di *share* di grup bahwa sawit semakin naik, tetapi malah petakanya Pak Yang Mulia, Bapak yang terhormat. Bahwa sawit kami justru menurun hasilnya seperti yang saat ini di tabel ini bahwa kita itu adalah organisasi yang ber AHU, berbadan

hukum dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan juga difasilitasi oleh Bapak Dirjenbun. Terima kasih Pak Dirjen selalu memberi nasehat kepada kami dan kami adalah anggota DMSI atau Dewan Sawit Indonesia.

Jadi kalau kami lihat dari segi presentasinya Bapak yang terhormat, memang sangat krusial sekali. Kehadiran kami di sini adalah sangat penting menyampaikan kepada Bapak dan memang luar biasa Bapak mempertemukan kami, tiga pihak. Yaitu Bapak Dirjen, dari GAPKI dan kami petani di sini ada juga teman-teman dari ASPEKPIR ya. Beda ASPEKPIR dengan petani APKASINDO Pak, ASPEKPIR itu seperti di situ dia adalah petani yang bermitra dengan perusahaan. Ibaratnya mereka dibantu semuanya, ada semua. Apa yang dia mau ada. Kalau itu 21% dari total 41%.

Sementara kalau yang independen itu seperti kami petani swadaya, tidak tergantung dengan perusahaan, cari sendiri, kerjakan sendiri, berhutang sendiri, susah sendiri. Nah ini jadi memang yang paling angkanya itu 79%. Tetapi kalau kita lihat dampak dari kelapa sawit kepada ekonomi Indonesia pertama adalah pengentasan kemiskinan. Tidak ada daripada seluruh bidang usaha yang tumbuh 17 poin dari pada SDGs itu tembus di sawit. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil, yang ketiga itu pembangunan pedesaan.

Desa-desa yang dulunya adalah desa-desa sangat terpencil, pada saat ini dia merupakan menjadi desa yang cukup maju, desa yang cukup memberikan janji kepada petani-petani atau masyarakat miskin. Yang keempat itu lapangan kerja di mana devisa negara, yang paling penting adalah pertahanan energi. Ketahanan energi inilah target daripada pemerintah. Bagaimana petani juga ikut berpartisipasi dalam ekonomi negara ini. Mungkin selanjutnya disampaikan oleh Sekjen kami Bapak Rino Afrino.

Silakan Pak.

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Baik, terima kasih.

Next slide.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan.

Interupsi sedikit Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Silakan Pak.

F- PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Saya ingin menggali dari petani sawit ya. Mumpung ini nanti masih ada yang jawab. Yang ingin saya ingin ketahui adalah apakah petani yang menghasilkan Buah Tandan Segar dijual kepada pelaku usaha besar apa tidak? Satu itu. Kedua, ketika menjual Tandan Buah Segar dikenakan pungutan atau tidak? yang terkait dengan regulasi USD 50 tadi?

Terima kasih. Nanti dijawab.

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Baik *slide* berikutnya, kami tadi Ketua Umum sudah mengungkapkan bagaimana perkembangan kelapa sawit dan manfaat yang ada pada kami yang terjadi pada 22 provinsi. Setidaknya kami menyampaikan ada 4 hambatan dan tantangan dari kami. Yang pertama yang sangat prinsip adalah mengenai legalitas lahan, yang kedua mengenai produktivitas yang rendah, yang ketiga mengenai harga TBS, dan yang keempat mengenai sertifikasi ISPO.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjenbun dan Ketua Umum GAPKI bahwa Pimpinan Komisi IV legalitas lahan pada hari ini menjadi polemik yang sangat berat bagi kami petani sawit, karena otomatis surat sertifikat hak milik tidak akan bisa didapatkan, surat tanda daftar budidaya tidak bisa mendapatkan, pinjaman perbankan tidak bisa dapatkan, bantuan APBD dan APBN, dana pengkajian bahkan sertifikasi ISPO juga tidak akan didapatkan.

Dampak yang terjadi di lapangan adalah jelas bahwa pabrik-pabrik sekarang sudah banyak yang menolak TBS petani. Jadi ini perlu juga dicermati dan terjadi intimidasi harga dan pungutan dari para oknum. Dan tentunya juga ini juga bukan bahan kampanye negatif oleh pihak-pihak tertentu. *Next*, kami mengambil sampel dari Provinsi terbesar penghasil kelapa sawit di mana di sana ternyata perkebunan rakyat dalam kawasan hutan mencapai 54%. Ini jumlah yang sangat besar mencapai 1,3 juta hektar. Petani ada di dalam kawasan hutan.

Ini yang perlu kita dudukan bersama-sama Bapak Pimpinan. Bahwa kami mengambil sampel dari 18 koperasi dan kelompok tani yang ada di provinsi Riau. Kalau kita lihat dari kawasan hutan itu ada APL, ada hutan lindung, ada HP (Hutan Produksi), ada HPK, ada HPT, ada konservasi. Kalau kita dari *sampling* 18 ini bahwa ternyata petani kelapa sawit itu banyak di daerah HP dan daerah HPT. HP dan HPT adalah daerah yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada perusahaan untuk mengelola hasil hutan

Jadi di sini dapat kami sampaikan bahwa petani bukan menebang hutan lindung, petani bukan menebang hutan primer yang masih besar, tetapi petani memanfaatkan lahan-lahan yang sudah terjadi degradasi dan juga ditinggal pada masa *illegal logging* dahulu. *Next*, apa upaya Pemerintah? Berulang kali Bapak Presiden di kegiatan peresmian peremajaan mengatakan kebun rakyat harus dikeluarkan dalam Kawasan. Namun *alhamdulillah* sampai hari ini Bapak Pimpinan,

kita punya Perpres Nomor 88 yang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Umum GAPKI, kita punya Inpres Nomor 8, kita punya program TORA, dan kita punya program perhutanan sosial.

Dari semua regulasi belum ada satupun yang menulis bahwa menyelesaikan kebun sawit rakyat dalam kawasan. semua ayat-ayat di dalam Undang-Undang, Peraturan-Peraturan tersebut masih sumir, masih jauh dari penyelesaian kebun sawit rakyat dalam Kawasan hutan. Otomatis, realisasi TORA, realisasi perhutanan sosial di provinsi provinsi penghasil kelapa sawit sangat turun sekali.

Next. Lalu yang kedua mengenai produktivitas rendah. Produktivitas rendah tidak lain dipengaruhi oleh 7 aspek. Yang pertama mengenai bibit yang sudah tua, bibit legitim, *good agricultural practice* atau cara merawat kebun. Lalu di SDM nya sendiri, kelembagaannya, sarana prasarana pendukung dan akses dana. Inilah yang mengakibatkan tadi Pak Dirjenbun sudah mengatakan bahwa produktivitas petani atau pekebun itu lebih rendah daripada BUMN maupun dari swasta.

Apa upaya Pemerintah? Presiden Jokowi tahun 2015 mendirikan BPDPKS, mengumpulkan dana sawit yang akan dipergunakan kepada 6, setidaknya 6 aspek yang tertera di situ yaitu PSR, peningkatan SDM, sarpras, riset, promosi dan biofuel. Tapi Bapak-Bapak tadi sudah melihat bagaimana peremajaan sawit rakyat realisasinya juga belum mencapai target, peningkatan SDM juga terhenti, praktis terhenti dari 2017 sampai hari ini tidak ada lagi pelatihan petani yang bisa dinikmati di seluruh provinsi sawit. Dan yang lebih parahnya lagi Bapak Pimpinan, untuk sarana dan prasarana realisasinya 0. Jadi dari 2015 sampai hari ini tidak ada sarana prasarana yang diluncurkan dari dana sawit. Ini berakibat fatal pada hari ini Bapak-Bapak sekalian.

Hari ini harga sawit bagus tetapi produksi kami anjlok karena kami kehilangan momentum memupuk pada tahun lalu dan 2 tahun lalu di mana itu adalah bagian dari bantuan sarana prasarana. Lalu berikutnya adalah riset. Sangat jauh sekali tidak ada riset-riset yang mendukung pertumbuhan produktivitas kami. Promosi juga kegiatan-kegiatan perlunya untuk petani juga kurang berkembang. Dan biofuel kita tidak bisa melihat progresnya juga sudah baik juga.

Kesimpulannya adalah realisasi jauh di bawah target dan kami melihat tidak ada kolaborasi multi pihak dan petani tidak mendapatkan manfaat yang menyeluruh. Yang ketiga, harga TBS. Nah Permentan Nomor 1 2018 Peraturan Menteri Pertanian telah mengatur mengenai penetapan harga TBS pemilik kebun. Namun apa yang terjadi pada hari ini? petani mendapatkan harga yang tidak proporsional. Lain di Sumatera, lain di Kalimantan lain, di Sulawesi, lain di Papua, berbeda-beda. Padahal kami semua punya satu grup seluruh 22 provinsi, 117 kabupaten melihat dan bagaimana proses penentuan harga.

Lalu juga ada dikotomi harga antara petani swadaya dengan petani plasma yang sangat jomplang sekali walaupun petani swadaya mempunyai kualitas yang sangat baik. Lalu juga infrastruktur. Jalan kebun yang tidak baik juga mempengaruhi dari harga tersebut. Lalu mata rantai yang panjang dan yang kelima yang menjadi rahasia umum adalah potongan pabrik yang tidak menentu dan timbangan. Dan ini

memang belum ada sanksi dan pengawasan yang melekat sehingga harga semua ditentukan oleh mekanisme pasar.

Nah bagaimana dengan ISPO? Bapak Pimpinan yang kami hormati. Belakangan kami mengirim surat kepada Presiden untuk menunda pengesahan Peraturan Presiden tentang ISPO karena melihat bahwa permasalahan petani belum selesai, PR nya masih sangat banyak. Kalau kami melihat dari paparan perusahaan saja yang wajib selama 9 tahun realisasi, baru baru 30 sampai 40%, bagaimana dengan petani? Oleh karena itu kami minta dengan sangat yang mulia pimpinan Komisi IV juga dapat menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa sebaiknya diselesaikan dulu semua permasalahan petani baru petani diwajibkan sertifikasi ISPO karena pada hari ini pabrik sudah menanti-nanti alasan-alasan mereka untuk menekan harga petani bawa petani itu tidak mempunyai sertifikat ISPO. Kesimpulannya:

1. Legalitas lahan merupakan permasalahan yang sangat mendasar dalam pengembangan sawit berkelanjutan dan kesejahteraan petani.
2. Mohon mari kita mendorong meregulasi penyelesaian kebun sawit pada kawasan.
3. Sudah ada Inpres Nomor 8 tetapi belum optimal.
4. Petani sawit belum dapat diwajibkan ISPO, ditunda Peraturan Presiden ISPO.
5. Program peremajaan, peningkatan SDM, sarpras segera dilakukan. Kami meminta pengawas BPDPKS segera dievaluasi melihat realisasi yang tidak sesuai target karena dana yang terkumpul merupakan dana dari pelaku usaha perkebunan yang notabene, tadi Pak Firman tanyakan itu juga banyak dari petani kelapa sawit.
6. Kami minta bentuk tim bersama untuk percepatan program BPDPKS karena ini adalah dana sawit yang harus dipakai secara menyeluruh yang langsung terasa di lapangan.
7. Diperlukan perlindungan dan pengawasan harga TBS menyeluruh, proporsional, berkeadilan di seluruh Indonesia sehingga petani yang sudah berkebun dengan baik, petani yang sudah berkelompok dengan baik, mendapatkan harga yang baik.
8. Untuk inovasi kemandirian petani, kami mohon dukungan untuk industri UMKM petani. Kami sedang mengembangkan PKS minyak goreng di tiga tempat untuk kampung-kampung yang sudah mempunyai kelembagaan petani dan anggota yang cukup baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (SAHRIL):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan saya Sahril masih dari APKASINDO.

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi yang cukup komplit. Namun hanya kami menyampaikan sedikit informasi yang mungkin perlu untuk ditindaklanjuti. Asosiasi APKASINDO adalah merupakan asosiasi petani sawit yang swadaya (rekaman

terpotong) sertifikat untuk peruntukan, sementara di tanah wilayah yang tidak untuk peruntukan tapi adalah untuk peruntukan kaumnya. Jadi mungkin sulit untuk memenuhi. Jadi kalau kalau gitu mungkin daerah tertentu mungkin cukup surat penunjukan lahan saja dengan KTP untuk dipermudah persyaratannya.

Sesuai dengan judul apa yang pembahasan kita saat ini pengembangan kelapa sawit, dan merangkap peningkatan kesejahteraan rakyat, ke depan saya lihat ini punya prospek yang baik jika Pemerintah memperhatikan juga petani swadaya. Ke depan saya lihat kebijakan Pemerintah menaikkan B20 menjadi B30 akan menelan stok yang memerlukan CPO sampai 5 juta ton 5 juta ton menaikkan B20 Menjadi 30. Sementara cadangan atau stok secara nasional rata-rata 3,8 sampai 4 juta ton menurut catatan yang ada pada saya. Artinya kalau B30 di legalisasi, stok nasional habis, artinya *demand* dan *supply* tidak berimbang lagi tentunya harga menjadi naik.

Jadi di situ kami melihat prospek sawit ini ke depan adalah sangat baik, juga ditambahkan kepada negara-negara yang berkomit untuk memakai biodiesel atau biofuel dalam bahan bakarnya untuk mengurangi emisi pemanasan bumi dan lainnya juga akan meningkatkan permintaannya kepada kita sebagai penghasil sawit terbesar di dunia ini. Demikian mungkin, dan juga diharapkan kami meminta nantinya sebagai petani tentu juga punya harapan besar ke depan juga. Kalau nanti memang biodiesel ini ditingkatkan kami diberi kesempatan bermitra. Kalau kami mampu mengolah biodiesel atau CPO menjadi biodiesel nantinya, mohon kami dimitrakan dengan Pertamina untuk men-*supply* biodiesel karena kami tidak mampu untuk mengeksport CPO ini. Demikian.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BENDAHARA UMUM ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT PIR PERKEBUNAN (SUTOYO):

Bismillahirohmanirohim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi IV dan juga Pak Dirjen.

Bapak dari rekan-rekan asosiasi baik dari GAPKI dari AKASINDO.

Izin, kami dari Asosiasi Petani Sawit PIR (ASPEKPIR) ingin menyampaikan yang pertama tentunya ucapan terima kasih bahwa hari ini kami telah berkenan untuk diundang hadir dalam rangka rapat Dengar Pendapat di Komisi IV dalam rangka sesuai dengan materi hari ini yaitu pembahasan prospek pengembangan kelapa sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Di sini kami menyampaikan salam Pak Ketua Umum. Jadi kebetulan Pak Ketua Umum berhalangan hadir. Saya sendiri Sutoyo selaku asosiasi Bendahara Umum dan juga kami membawa empat. Bapak Sofyan Harahap, Bapak Agus Sutarman, dan Ibu.

Bapak/Ibu yang kami hormati, ASPEKPIR adalah pada mulanya itu dibentuk yaitu berada di Provinsi Riau. Jadi pengembangan perkebunan kelapa sawit PIR NES versus PIR-Trans, petani lokal adan KKPA itu pada awalnya kami dari asosiasi ini dibentuknya di provinsi Riau. *Alhamdulillah* untuk sekarang ini sudah mulai nasional yaitu tersebar di 15 kabupaten/kota. Jadi untuk menyampaikan lebih detilnya kami berikan waktu kepada Pak Sofyan Harahap, Bunda kita mohon untuk disampaikan kepada dewan yang terhormat dan kita semua.

Dari saya terima kasih. Silakan Pak Sofyan.

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT PIR PERKEBUNAN (SOFYAN HARAHAP):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan Komisi IV.

Bapak yang menjadi anggota asosiasi.

Bapak Dirjen dan tamu undangan lainnya.

Melengkapi apa yang sampaikan oleh pengurus pusat tadi, kami mencoba untuk menambahkan. Yang pertama kami fokus kepada PSR di khusus kami ambil contoh di Provinsi Riau dari 134.114 hektar PIR plasma yang ditanam '81 '82 107.000 di antaranya sudah Hambatannya yang pertama ada petani masih *eman-eman* walaupun tadi disampaikan oleh Pak Dirjen suah ada simplikasi dapat persyaratan namun di lapangan mereka masih menerima produksi itu di atas 10 ton rata-rata 3 sampai 4 ton. Untuk kebun-kebun yang dipelihara dengan baik itu masih mereka terima.

Yang kedua dana hibah dari BPDPKS itu hanya 25 juta jadi perlu dana pendamping. Persyaratan BPDPKS dengan persyaratan dari lembaga keuangan itu enggak sama. Contohnya untuk lembaga keuangan itu perlu legalitas yang sama antara surat dengan kepemilikan. Padahal di lapangan itu banyak yang jual beli di bawah tangan tanpa diurus kepemilikannya. Kalau diurus satu kavling itu bisa mencapai di atas 10 juta jadi kami berharap kiranya untuk yang seperti ini dinasionalkan. Jadi nanti programnya menjadi lebih murah.

Kemudian mungkin tidak ada salahnya maksimum kan diperuntukkan satu KK itu 4 hektar. Padahal di lapangan ada yang punya 3-4 kavling. Bagaimana supaya karena ini memang warga negara Indonesia yang lebih dari 4 itu kalau dia memang punya punya anak yang sudah dewasa itu diatasnamakan kembali lagi nanti kalau dibalik menambahkan surat-suratnya itu biayanya sangat besar. Jadi kembali lagi pada menasionalkan program untuk sertifikasi ini.

Kemudian yang kedua, ada tiga pola dalam rangka PSR ini ada tiga pola sesuai dengan pedoman yang diterapkan Dirjenbun. satu swakelola mandiri, kedua mitra penuh, yang ketiga setengah mitra. Bagi kelembagaan petani di wilayah PIR yang memang kuat atau sudah bagus kelembagaannya seperti koperasi dan KUD ini memang sebagian besar memilih swakelola ataupun mandiri. Namun ada beberapa

hambatan antara mitra lama dengan calon mitra yang baru ini tidak ada kesesuaian. Kita minta supaya mitra lama itu membimbing, membina dalam bentuk *off-taker* tapi terjadi penolakan. Sehingga dicari *off-taker* lainnya, ini jadi masalah. Menjadi masalah nantinya ke mana nanti buah itu karena pada kenyataannya antara perjanjian dengan kenyataan di lapangan ini kita khawatir berbeda. Selama ini plasma itu mengikuti harganya dari tim harga yang ditetapkan oleh provinsi.

Kemudian selanjutnya..

PIMPINAN RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Disingkat Pak, karena waktu.

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT PIR PERKEBUNAN (SOFYAN HARAHAHAP):

Baik, selanjutnya untuk swadaya maupun untuk mitra kami berharap ini diberikan keluasan untuk menanam tumpang sari. Tumpang sari apapun asal tidak mengganggu contohnya ubi kayu ataupun tanaman porang yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya. Tumpang Sari ubi kayu, ini kita pernah diskusi antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain berbeda. Ada yang menyatakan tidak boleh ada dan boleh. Kami berharap ada penelitian khusus untuk menjawab ini sehingga ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh.

Kemudian masalah ISPO. kami berpendapat ISPO itu walaupun sudah di meja Bapak Presiden itu mau *ndak* mau mungkin dalam waktu dekat mungkin sudah ditangani. Itu adalah *mandatory* 5 tahun, jadi kepada kelembagaan yang tadi *mandatory* 5 tahun terutama kami di di wilayah PIR. tidak *ujug-ujug* bisa melaksanakan ISPO itu. Perlu peningkatan SDM kepada pengurus kelembagaan sehingga mempersiapkan persyaratan prasyarat untuk memperoleh sertifikat ISPO ini bisa dengan mudah kita dapatkan.

Untuk pelatihan pengurus ini biayanya sangat mahal jadi mohon dukungan dari Bapak di pusat ini supaya SDM untuk memperoleh ISPO ini bisa dilaksanakan karena tadi disampaikan oleh rekan kami dari APKASINDO. Sejak tahun 2011 sampai sekarang ini sudah tak ada lagi pelatihan, walaupun di pedomannya ada, tapi pelaksananya sampai saat ini belum. Demikian juga untuk sarana prasarana. Untuk kami dari ASPEKPIR sama dengan APKASINDO pola swadaya dan mandiri ini bertekad untuk membangun atau memiliki industri hilir seperti PKS ataupun turunannya.

Kita sudah menjajah ke mana-mana ke Menteri Koperasi ke teman-teman dari mitra bagaimana supaya kita bersama-sama dikawal untuk memperoleh atau membangun industri hilir sehingga nanti petani bisa mandiri, berdaulat, dan tingkat kesejahteraannya. Mungkin sementara itu Pak yang dapat menambahkan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT PIR (ASPEKPIR):

Izin Pimpinan, menambahkan sebentar. Ada permasalahan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik Pak, kami persilakan.

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT PIR (ASPEKPIR):

Terima kasih.

Jadi dari pengamatan yang kita lakukan selama ini karena ASPEKPIR adalah asosiasi yang tugasnya memfasilitasi segala permasalahan yang ada di petani dan kelembagaannya baik pengamatan terhadap regulasi, terhadap kemitraan. Jadi ini ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama yang berkenaan dengan regulasi. Jadi kami dari asosiasi, mengamati dengan adanya Permentan yang waktu itu Permentan Nomor 14 2013 bahwa di dalam penetapan harga Tandan Buah Segar adalah berdasarkan rendemen *table*.

Jadi kami dalam pengamatan itu akhirnya bermohon ada sebuah revisi, jadi revisi menjadi Permentan 1 2018 juga didalamnya ada isi tambahan. Limbah yang bisa bernilai ekonomis, bisa menjadi pendapatan petani itu cangkang. Di sini yang kami kami pandang bahwa ternyata ketika di urus secara baik dan benar usia 30 tahun bahkan ada yang 33 juga produksinya masih maksimal dan rendemannya masih bagus. Tapi sementara di dalam Permentan itu sendiri ada rendemen tabel bahwa yang usia di atas 20 tahun itu hanya kalau untuk di Provinsi Riau itu 19,19.

Kami sudah mencoba melakukan uji rendemen itu tahun tanam 1987 sama 1991 itu masih ada rata-rata 22%. Artinya dengan kondisi itu petani sangat dirugikan dalam hal penetapan harganya karena harga kami setelah *unit cost* nya itu dikalikan hanya rendemen terendahnya, tidak sesuai faktual yang di lapangan. Dalam hal ini kami berharap karena proses peremajaan itu juga waktunya panjang sehingga ketika sawit setelah di atas 25 ini ternyata kita tidak dihargai sesuai dengan rendemen faktual di lapangan berarti selama masa tunggu sampai *replanting* itu petani kami merasa dirugikan.

Oleh karena itu kami berharap ini untuk bisa direvisi sehingga sampai batas waktunya petani itu akan melaksanakan peremajaan artinya masih menikmati harga yang wajar. Jadi bagi pelaku usaha tentunya, mereka adalah patuh dengan harga yang ditetapkan oleh Disbun masing-masing provinsi. Jadi sebenarnya yang menghambat itu adalah dari regulasi Permentannya bukan karena pelaku usahanya yang enggak mau bayar. Oleh karena itu kami berharap kalau memang berkenan dari Kementerian Pertanian dalam hal ini mungkin di Pak Dirjen ya kami mohon untuk mengadakan uji lab yang terbaru. Karena setahu kami uji itu dilakukan pada tahun 2013 sampai hari ini belum ada uji yang terbarunya.

Jadi sehingga nanti benar-benar sesuai dengan tujuan tadi untuk mensejahterakan petani sawit dan juga pelaku usaha itu benar-benar akan tercapai.

Terus juga selanjutnya berkenaan dengan program PSR bahwa di pilihan pola yang di atur oleh Dirjen, di sana ada kemitraan, ada swakelola mandiri, dan mitra. Pada prakteknya yang memilih kemitraan itu ternyata prakteknya sebagian itu adalah hampir mirip dengan *single management* jadi tidak sesuai yang diharapkan bahwa kemitraan itu adalah harus dilaksanakan secara bersama-sama antara kelembagaan petani dengan perusahaan mitrannya.

Jadi harapan kami di forum ini itu menjadi sebuah kajian sehingga hari ini itu tidak lagi antara petani perkebunan atau perusahaan mitra itu tidak lagi Bapak angkat anak angkat. Tapi karena hari ini sudah mitra sejajar karena kebun itu sudah milik petani secara mutlak karena sudah SHM dan tidak ada kewajiban lagi terhadap perusahaan mitra dalam arti menyelesaikan mungkin ada kredit dan sebagainya. Oleh karena itu harapan kami ke depan khususnya kepada perusahaan mitra kalo masih ingin kemitraan itu Dirjen dilanjutkan generasi ke-2 nya tentunya kita harus membuat sebuah perjanjian yang terbaru, yang saling memberikan ruang sehingga benar-benar kesejahteraan petani itu juga akan tercapai.

Jadi itu yang yang kami amati sehingga apa yang disampaikan oleh saudara kita dari APKASINDO juga sama. Sehingga kalau semuanya bisa secara bersama-sama, jadi tujuan kesetaraan petani sawit ini benar-benar bisa tercapai. Barangkali itu tambahan yang bisa kami sampaikan. Dan dari ASPEKPIR barangkali ada kurang berkenan mohon maaf. Saya sudah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak/Ibu anggota Komisi IV DPR RI untuk menyampaikan tanggapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Peraturan Tata Tertib DPR RI bahwa setiap anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 menit.

Kami persilahkan mulai dari Pak Darori, siap-siap Bu Endang Thohari.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Pak Dirjen, dan para Ketua Asosiasi.

Saya sedikit mungkin *flashback* sedikit latar belakang saya mungkin nanti, kenapa saya bisa cerita permasalahan ini. Saya mantan birokrat Pak 36, pernah jadi Ka Kanwil Kepala Dinas 10 tahun, Dirjen Penegakan Hukum 11 tahun di Kehutanan. Setelah mendengar ekspos Dirjenbun, saya prihatin Pak Dirjen. Kewenangan Bapak itu mestinya namanya kebun, semua kebun adalah ranah Bapak. Kebun pemerintah, PTP, kebun swasta, kebun rakyat ya. Tapi saya lihat kalau kebun swasta itu enggak menyentuh itu. Sehingga kejadian kemarin kebakaran yang terjadi ternyata 80% itu di area perkebunan di luar kawasan Pak Dirjen.

Alhamdulillah Pak Dirjen sama kami sudah sepakat akan membentuk Undang-Undang Kebakaran Hutan dan Lahan, satu. a mudah-mudahan segera sehingga siapa berbuat apa ke depannya kita bisa lakukan. Yang berdua Pak Dirjen, hasil pemeriksaan BPK, BPK Indonesia yang kami terima di BPK itu mengatakan rapot merah korporasi sawit. Ini artinya apa? bahwa tadi disampaikan oleh masyarakat, ISPO belum jalan karena 80% hampir semuanya ada kebun sawit di kawasan hutan.

Yang kedua berdasarkan pemeriksaan BPK 80% plasma belum dilaksanakan. Ini BPK bukan Darori Pak ya. Ini kedepannya gimana? ini tolong kita, nah hasil temuan KPK, saya punya ini dari KPK. Wajib pajak pribadi hanya 6,3% yang bayar pajak rakyat Pak. Sedangkan wajib pajak badan usaha 46%. Kerugian negara sampai hari ini kurang lebih 40 triliun. Ini kewajiban kita Rp 40 triliun yang belum bayar pajak. Disamping itu sekalian tadi disampaikan, saya kebetulan pernah menjabat sebagai Dirjen penegakan Hukum hasil investigasi permintaan Komisi IV pada waktu itu, ini saya sampaikan. Selama kami lakukan kerjasama dengan Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK di 8 provinsi ini adalah 878 perusahaan kebun sawit tanpa izin dengan luas 84 juta hektar. Nama perusahaan ada di kami, nama orangnya ada pada kami. Dari mulai Kalteng, Kaltim, Kalbar, Kalsel, Sulteng, Riau, Jambi.

Kerugiannya 170 triliun kerugian kayu. Ini sudah sampaikan kepada Menteri sebelum Pak ini Pak. Tapi tampaknya ini tidak dilakukan. Korporasi yang melanggar ini Pak ini melanggar undang-undang yang dibuat oleh Pak Firman waktu itu. Itu yang melanggar korporasi perusahaan, hukuman seumur hidup dendanya 1 triliun. Bagi pejabat sebagai Bapak lalai, kena 10 tahun nanti Pak. Ini Undang-Undang bukan Darori. Nah kita sebagai anggota DPR wajib menyelesaikan masalah ini ya. Rakyat tadi ISPO enggak jalan karena masih kawasan hutan. Bahkan sawit yang ditampung oleh PKS yang ilegal saya kira itu mestinya ditindak. Dan sekarang sudah mulai.

Kemarin di Riau ada kebun sawit yang hanya berapa ratus hektar kena denda 3 miliar oleh pengadilan. Kalau ini dibiarkan terus Pak, saya kira negara ini banyak korban. Saya kira kita sepakat tidak ingin memenjarakan orang tapi menyelesaikan masalah, betul enggak Pak? Bagaimana menyelesaikan kasus ini masalah ini? Ini bisa. Ada resepnya dan ini sudah kami sampaikan kepada Presiden Pak karena beliau mohon maaf, Pak Jokowi itu adik kelas saya di Gajah Mada gitu. Jadi saya sampaikan secara pribadi. Tapi belum di respon.

Tolong Pak Dirjen, kepada Pak Menteri ini harus direspon jangan sampai 10 tahun lagi misalkan Bapak selesai itu bisa jadi masalah. Tambah 5 tahun, misalkan 10 tahun selesai kan? Ini tolong Pak Dirjen, bukan Bapak. Tapi Bapak kan dapat warisan masalah. Pak Firman, kami, teman-teman Ketua saya kira akan mencarikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah ini.

Kalau kita memenjarakan orang, tidak selesai Pak. Contoh kita penjarakan, saya saksi hidupnya. Pengusaha sawit Sumatera Utara 8 tahun, putusan sudah *incracht* sampai sekarang pun belum di sita oleh negara, gitu. Ini saya mengingatkan Pak Dirjen, bukan untuk bertanya. Tapi tadi kok ada plasma sampai 80%. Belum ini temuan BPK Pak, ini Pak Rizal Djalil yang baru men-*declare* masalah ini. Sekian.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Darori. Lanjut Bu Endang. Siap-siap Mbak Luluk.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWAI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih

Pak Ketua, Pak Dirjen, beserta asosiasi kelapa sawit yang terhormat.

Jadi tadi Pak Dirjen mengemukakan bahwa terindikasi ada 3 juta hektar kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Nah ini tentu saja yang menjadikan bulan-bulanan *black campaign* dari negara Eropa tentunya karena mengakibatkan deforestasi juga. Jadi banyak sekali satwa liar yang punah Pak. Kebetulan teman-teman saya yang dari Eropa itu kalau ke Indonesia nginepnya di rumah saya Pak. Jadi dari WWF itu banyak sekali mengkritisi hal ini.

Bagaimana sikap pemerintah dalam hal ini untuk menghadapi *black campaign* secara struktural Pak? karena tadi kelapa sawit rakyat sudah banyak mengeluh juga bagaimana peranan Bapak. Nah kemudian konflik dari PBS dan PBN juga itu mengganggu produktivitas Pak. Jadi mohon Bapak sebagai Dirjen harus bisa mengayomi tadi Pak, mengayomi para kebun sawit rakyat. Karena tentu saja kita mengharapkan ada keuntungan yang adil.

Kemudian yang ketiga Pak ada juga tentang ini Pak *black campaign* tadi yang mempengaruhi produksi karena adanya dana-dana yang sudah terkumpul itu sudah banyak Pak sebetulnya. Dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan yang saya catat ada 47 triliun tapi tidak pernah digunakan untuk *replanting* ataupun penelitian-penelitian. Padahal di Kementerian Pertanian itu tulisnya di Badan Litbang Pertanian ada Balai Biogen yang siap sebetulnya untuk membantu bagaimana menciptakan bibit-bibit baru yang dikehendaki oleh rakyat.

Kemudian yang tadi dikemukakan oleh teman-teman kita dari asosiasi, tentang pengolahan kelapa sawit Pak. Nah ini juga penting Pak karena sebetulnya hasil ikutan dari kelapa sawit itu banyak yang sudah dilakukan oleh Balai Penelitian Perkebunan kita Pak, baik yang ada di Badan Litbang maupun yang ada di swasta Pak. Nah itu ternyata tidak bisa disosialisasikan dengan baik.

Saya kenal betul dengan Pak Darmono yang begitu usahanya luar biasa dan juga Bu Tien Muhtadi yang sudah menciptakan hasil-hasil penelitian yang bagus yang bisa untuk menghadapi stunting kita ini Pak. Tapi ternyata dari Kementerian Pertanian mohon maaf ini saya mencubit diri saya sendiri juga, belum ada *action*, belum ada dana dana untuk mensosialisasikan program tersebut khususnya di sekolah-sekolah ini Pak karena sekolah-sekolah di Indonesia ini mohon maaf jajanan sehari-harinya itu banyak yang tidak mengandung protein tinggi sehingga program stunting itu juga harus antisipasi Bersama.

Kemudian yang berikutnya tadi peranan tentang MPOB dari Malaysia Pak. Nah ini kan mestinya Pemerintah harusnya bersinergi dengan baik untuk membina kebun-kebun rakyat kita. Karena tadi Pak, saya di bawah Pak Ketum kita Pak Prabowo ke Malaysia. Saya iri Pak, irinya di kebun kebun kelapa sawit itu balai-balai penelitian plasma nutfah nya juga dikembangkan dengan baik dan yang mengerjakan adalah para TKW kita Pak. Nah ini kan ironis sekali itu Pak, mestinya bisa kita tampung di balai-balai biogen kita kemudian peneliti-peneliti kita juga banyak. Tapi tadi, tidak dalam satu komando yang terintegrasi dengan baik. Mungkin itu saja.

Terima kasih.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Bu Endang.

Saya tambahkan sedikit Pak Dirjen ini mengenai peremajaan sawit rakyat ya. Yang kita lihat tadi paparan Bapak ya memang jauh di bawah target. Saya lihat sekilas dan mendengarkan tadi penjelasannya mengenai simplifikasi persyaratan-persyaratan yang mungkin sekarang menghambat atau memperlambat jalannya program ini maupun simplifikasi prosedur. Saya apresiasi ini mungkin ini inisiatif-inisiatif Bapak yang mungkin ingin memangkas prosedur-prosedur ini khusus seperti pengajuan usulan melalui aplikasi *online*. Saya enggak mempermasalahkan yang cuman menjadi catatan bagi saya apakah petani-petani sawit yang ada tersebar di nusantara ini biasa dengan sistem *online* ini Pak?

Maaf saja, saya di Dapil Kalimantan Timur Pak, waduh *boro-boro* sistem *online* Pak kadang-kadang kebanyakan sinyal hp biasa pub enggak masuk. Ya jadi saya ingin menegaskan dalam hal ini ya untuk mempercepat program-program yang sangat strategis seperti ini, ada banyak sekali kebutuhan rakyat untuk ini coba. Ini kita pikirkan bersama solusinya lagi gitu.

Saya rasa kalau penerapannya atau realisasinya ini masih di bawah 50%. Artinya ini enggak, *it's not working*. Gini lho sistem yang dijalankan selama ini tidak berjalan ya. Coba kita pikirkan mungkin apa yang bisa kita cari bersama untuk memangkas hal-hal seperti ini. Supaya petani-petani di daerah-daerah seperti saya atau tempat-tempat lain ini juga bisa mendapatkan mempercepat mendapat bantuan seperti ini.

Terima kasih Bu Endang. Selanjutnya Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Dirjen dan juga Bapak-Bapak semuanya yang saya hormati.

Saya ingin memberikan tanggapan yang terkait dengan mungkin semuanya kali ya satu pertanyaan tapi berlaku untuk semuanya. Ini kan ada beberapa estimasi

yang sangat optimis ya yang terkait dengan industri saat ini. Yang pertama mulai dari yang tadi disebutkan ada peremajaan, kemudian juga proyeksi peningkatan produksi sawit dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain tadi juga disebutkan adanya hambatan atau *barrier* setelah terutama ekspor yang ke Eropa karena mereka memiliki aturan yang ini saya tidak tahu itu bisa dilawan atau bisa ditolak.

Tetapi justru pertanyaan saya ini untuk semuanya saja yaitu apa yang kemudian disiapkan betul-betul oleh Pemerintah kemudian juga GAPKI dan juga asosiasi untukantisipasi hal seperti ini? karena bisa saja bukan hanya Eropa nanti yang seperti itu. Biasanya Amerika juga suka ikut-ikutan. Apalagi kalau kemudian isu ini sudah akan mau dibawa atau diangkat ke WTO. Nah yang suka, yang saya khawatir nih Pak karena yang kemarin saja kita baru kalah nih kalau sudah ngomong tentang negosiasi dan kalau kemudian negosiasi dan diplomasi kita tidak bagus, dan ini kemudian diangkat lagi ke WTO dan kemudian kalah lagi.

Nah enggak kebayang kalau kemudian yang akan terdampak itu lebih kurang 16 juta orang dan seterusnya yang baik itu langsung enggak langsung terhadap sawit ini. Kecuali kalau kemudian saya juga selalu setuju, kenapa sih cara pandang kita ini tidak mencoba keluar *out of the box*? kalau misalnya ada 4 koma sekian itu pasar di Eropa tetapi dengan persyaratan yang luar biasa. Perang dagang itu sudah dimulai.

Saya tadi buka Google Pak jadi *NEM's palm oil* versus misalnya *sunflower* itu enggak ada satupun itu yang bicara positif tentang *palm oil* ini. Ini artinya ada 3 kegiatan *intelligence economic* yang sudah bekerja. Dan itu konon katanya juga angkanya jutaan dolar yang mereka bisa investasikan untuk bagaimana mem-*framing*, cara pikir, kemudian media mereka membayar orang, perusahaan hanya untuk membuat desain yang seperti itu.

Apakah pemerintah juga sadar dan melakukan hal yang sama? Karena ini terkait hajat hidup orang banyak dan juga terkait dengan nilai ekonomi yang sangat besar sekali. Nah kalau kemudian apa yang mereka lakukan itu sudah seperti itu dan cara kita misalnya manis-manis enggak tahu kan? Makanya butuh jawaban dari Pemerintahan kayak gitu, ya mungkin enggak terlalu banyak bisa membantu karena bahkan peneliti gitu ya pusat-pusat *research* itu juga memang dikerahkan dan dibiayai hanya untuk membuat kesimpulan bahwa produk sawit itu berbahaya lah buat kesehatan, kan begitu.

Apakah kita punya misalnya tanding dari riset yang kredibel begitu yang kemudian bisa mengatakan bahwa sawit atau produk nabati turunan dari semua produksi kelapa sawit itu baik untuk kesehatan dan sebagainya. Karena apa? Karena kita pun yang apa konsumen di Indonesia itu juga lama-lama akan ikut. karena ini kan ada situasi di mana dunia menciptakan *lifestyles*, globalisasi sudah terpengaruh sedemikian rupa. Dan kalau kemudian penolakan itu justru terjadi juga di dalam negeri maka bukan hanya dukungan politik yang enggak didapatkan tetapi dari konsumen itu juga bisa pelan-pelan bisa terjadi pergeseran.

Kemudian yang kedua Bapak, ini kan bukan bermaksud apa tetapi penting mungkin saya sampaikan kalau misalkan belum tahu, bahwa kebetulan Pimpinan kami ini kan yang salah satu Ketua DPR sedang mencoba melakukan semacam

diplomasi politik. Dan apapun yang bisa dilakukan di Eropa kemarin ada acara internasional di sana ya di Kroasia. Dan ketemu semua pimpinan partai politik. Ini apakah kemudian dari pihak apakah pemerintah kemudian juga GAPKI dan asosiasi memang dari awal itu sudah membuat desain yang seperti ini? bahwa parlemen diplomasi itu juga sama pentingnya dengan misalnya *business to business* diplomasi.

Jadi enggak semua hal itu bisa diserahkan ke domainnya pemerintah, tetapi bisa juga ada cara lain yang itu bisa dilakukan. Termasuk misalnya saya pernah membaca Pak, bagaimanapun kemudian gerakan-gerakan yang anti tanda kutip itu, WTO itu yang kemudian menyerang Monsanto. Mereka itu menggunakan kerja dunia, hanya untuk mengatakan bahwa cara kerjanya Monsanto dan semua rezim yang mengenai pembenihan itu yang akan mematikan jutaan rakyat di dunia. Itu kira-kira itu produk haram lah kira-kira begitu. Dan saya terus menerima dari teman-teman yang dari *world judge* itu.

Nah apakah kita juga melakukan cara-cara dan strategi yang non konvensional itu hanya untuk melindungi kepentingan ekonomi kita? Yang terakhir sebenarnya ini *nuwun sewu* Bapak, bahwa rapat yang sebelumnya ini kan kita bicara tentang karhutla. Bahwa di antara lokasi atau lahan kebakaran hutan itu yang terbanyak memang ya di area di mana kebun sawit itu di sana itu ada. Yang saya ingin tahu dari perusahaan, itu kira-kira kalau misalnya ditengarai adalah ada korporasi yang terlibat, itu anggotanya GAPKI itu ada berapa sih yang terlibat gitu? Dan mekanisme internal di dalam organisasi itu kayak apa? Apakah kita juga apakah ada sanksi misalnya? mereka kemudian tidak menjadi anggota lagi atau seperti apa? kita juga enggak tahu ya.

Tetapi ini penting menurut saya karena semua akan memperhatikan kita. Jadi sanksi internasional atau tekanan kita yang berat itu juga akan dilihat dari seberapa kuat sebenarnya komitmen dari Bapak-Bapak Pemerintah, kemudian asosiasi termasuk kelompok petani ini yang memang mau benar-benar mau membangun industri yang berkelanjutan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Mbak Luluk.

Tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit ini adalah tantangan kita bersama sebenarnya. Ini menyangkut 4,3 juta tenaga langsung di bidang ini. Dan saya sepakat tadi Mbak Luluk mengenai diplomasi atau peran parlemen dalam memerangi isu-isu negatif yang terjadi pada industri sawit kita. sebenarnya ini juga dilakukan dalam forum-forum parlemen internasional seperti IPU (*Inter-Parliamentary Union*) yang dari waktu ke waktu diadakan.

Kita dorong ya nanti Mbak Luluk semoga selalu, Mbak Luluk di BKSAP enggak sih? Oh oke. Baik terima kasih Mbak Luluk masukan-masukannya. Berikut Krisantus. Siap-siap Pak Sulaeman Hamzah.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Terima kasih

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV

Rekan-rekan Komisi IV.

Pak Dirjen Perkebunan, teman-teman dari asosiasi petani.

Lengkap lah sudah di sini.

Selamat sore dan salam sejahtera.

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata

Saya dari Kalimantan Barat Dapil Kalbar II. Jadi saya mendengarkan paparan yang disampaikan. Baik Pak sangat baik, kemudian juga dari asosiasi baik. Kenapa saya katakan demikian? karena saya juga berada di tengah-tengah kebun sawit. Dan kalau saya dengar dari Pak mantan dirjen juga mungkin halaman rumah saya juga ada sawit. Karena berdasarkan data, 1,5 juta hektar di Provinsi Kalimantan Barat kebun sawit yang berizin. Dari teman di sebelah kiri saya, mantan Dirjen mengatakan bahwa ada 169 perusahaan yang luasannya adalah 2.145.000 kebun yang tanpa izin.

Saya juga baru tahu hari ini, mungkin saja kaki tangga rumah saya ada kebun sawit. Dan memang ada kejadian Pak secara khusus di Kabupaten Sanggau. Wilayah perkebunan itu, izin perkebunan itu diberikan di atas danau. Saya dulu pernah teriak di sana. Saya tanya Kepada Bupati dan investor. Saya tanya bagaimana cara menanam sawit di atas danau? Apakah kita buat rakit baru tanam sawit? karena memang kenyataannya ada izin kebun di danau di atas perairan. Inilah saya pikir saya, katakan tadi program kita sudah bagus, rencana kita sudah bagus, tetapi inventarisasi masalah yang perlu kita lakukan sekarang.

Masalah yang terutama adalah masalah sosial. Masalah sosial dengan ketidakseragamannya pola penyerahan lahan. Ini seringkali menjadi masalah yang besar. Bayangkan 1-2 perusahaan yang bertetangga pola penyerahan lahannya bisa berbeda. Ada yang sistem misalnya 7,5: 2 ada yang 10:3 ada juga pola penyerangan yang seperti sistem saham. Menyerahkan lahan 10 hektar janjinya ada 3 hektar tapi petani tidak perlu tahu di mana kebunnya. Nanti Bapak tinggal terima ketika panen. Ketika panen apa yang terjadi Pak Dirjen? potong pupuk, potong kacang, potong semprotan, potong-potong, banyak lah potongannya itu. Apa yang terjadi? terima Rp100.000, Rp200.000.

Sementara mereka sudah menyerahkan lahan pertaniannya karena mendengar informasi sangat sejahteraan. Melihat desa-desa tetangga, kecamatan-kecamatan tetangga, kabupaten-kabupaten tetangga ada sekian persen yang sejahtera tanda kutip kalau perusahaannya serius buka kebun. Nah oleh sebab itu pada kesempatan ini saya berharap terutama kepada Kementerian Pertanian Pak, kita buat satu regulasi. Pola penyerahan lahan harus seragam. Alangkah lebih baik menggunakan PIR. Pola lama dulu yang bagus, itu jarang menimbulkan konflik. Dengan dunia modern sekarang ini otak manusia juga ikut modern, maka lahir lah inovasi-inovasi yang tidak masuk akan yang ujung-ujungnya menyengsarakan petani pemilik lahan.

Maka saya kalau di Kalimantan Barat ya bicaranya seperti ini memang. Saya pernah tanya investor, kalian datang ke sini saya bilang, harapan kami di Kalimantan Barat mensejahterakan petani, bukan menyengsarakan. Karena apa? Bapak ke sini maaf ngomong Pak, enggak ada bawa bibit tanah. Bibit sawit ada di jual, bibit tanah tidak ada yang jual. Bibit tanah itu dari siapa? Lahan itu dari siapa? Lahan masyarakat. Nah ketika kita sudah mengambil alih, mengusahakan lahan masyarakat tentu ada *multi trial effect* yang ditimbulkan. Itu yang kita harapkan. Jangan seperti ini. Jadi saya harap ada regulasi Pak, kita buat regulasi dari Kementerian Pertanian pola keseragaman penyerahan lahan. Itu yang pertama.

Yang kedua, Kementerian Pertanian juga harus tegas. Jangan ragu-ragu mencabut izin kebun yang tidak serius buka lahan, yang hanya jadi *broker*. Dapat izin, dapat luasan tapi tidak diusahakan. Kita tegakkan peraturan. Sekian bulan dia tidak ada *action*, beri peringatan. Sekian bulan kemudian kan ada aturannya itu, sekian bulan tidak ada kegiatan di situ cabut izinnya. Karena ada regulasinya itu. Jadi kita tegas-tegas saja, supaya apa? Supaya bersih.

Kemudian teman-teman tadi juga mengaitkan dengan kebakaran hutan. Kebakaran orang, saya punya datanya. Ini saya kesal kalau ngomong ini. Bisa berapi-api. Perusahaan yang sudah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 30 perusahaan di Kalimantan Barat. Jangan-jangan perusahaan yang enggak ada izin tadi Pak. Kemudian perusahaan yang sudah disegel oleh Polda Kalbar, ada 16 perusahaan. Tanggal 29 Komisi IV akan berkunjung ke Sintang. Saya akan tanya kepada pihak (rekaman terpotong) Karena mereka secara sah dan meyakinkan juga membakar lahan. Jadi inilah Pak akumulasi dari semua masalah ini harus kita formulasikan di Kementerian Pertanian. Maka saya harap Kementerian Pertanian yang membawahi secara khusus perkebunan, tentu kita harus tegakkan ini semua.

Kemudian yang ketiga, Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia. Kenapa kita kalah sama Malaysia? saya mohon jawab Pak. Malaysia luasnya tidak seluas Kalimantan Barat. Tapi kenapa dia bisa mengatur harga sawit dunia itu? Nah ini tentu harus kita cari jalan ceritanya, carikan solusinya agar Indonesia sesuai menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Saya pikir demikian Pimpinan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf Pak. Memang gaya saya berbicara seperti ini bukan berarti marah tapi hati saya halus lembut.

Terima kasih.

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Krisantus.

Sebelum saya lanjutkan tadi sesuai pengantar rapat. Rapat akan diakhiri pukul 17.00. Untuk itu saya ingin minta persetujuan teman-teman anggota untuk memperpanjang sampai 17.45 Apakah bisa disetujui oleh kawan-kawan? Setuju? Terima kasih.

(RAPAT: DISETUJUI).

Berikutnya Pak Sulaeman Hamzah dan siap-siap Pak Firman Soebagyo.

F-NasDem (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati.
Bapak Dirjen dengan seluruh jajaran.
Bapak-Bapak dari asosiasi yang saya hormati.**

Setelah mengikuti paparan tadi Pak Dirjen, ini data yang saya dapatkan perkebunan besar swasta itu meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2018 itu 7,883 juta hektar, kemudian perkebunan besar negara itu 0,57, perkebunan rakyat 5,8. Perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat meningkat tapi perkebunan besar negara ini menurun, bagaimana ceritanya ini? 2015 total lahan 11,3 juta hektar itu PBS nya 6,1 PBN-nya 0,7 dan perkebunan rakyat nya 4,5. Tolong ini dijelaskan Pak karena ini selisihnya bukannya bertahan, tapi dia menurun dari perkebunan besar negara punya. Itu yang pertama.

Kemudian masalah yang mengemuka tadi disampaikan oleh kawan-kawan dari Kalbar tadi, ini lain daerah lain masalahnya. Di Papua saya sendiri punya masalah khusus yang barangkali tidak ada di tempat lain. Dari 30 perusahaan Pak Dirjen, 30 perusahaan yang beroperasi di Papua itu tiga di antaranya izin keluar untuk tebu, dan itu belum jalan tapi selebihnya semua sawit dengan Total luas 111.000 sekian hektar. Tetapi di antara 30 ini, ini 30 perusahaan ini ternyata ada 20-an yang belum melakukan kewajiban 20% nya. Ada memang, setelah saya kunjungi ternyata ada kamufase di dalam sana.

Ada perusahaan yang mengaku bahwa dia sudah melakukan kewajiban 20% kepada rakyat. Setelah dicek di sana ternyata kebun yang dia maksudkan itu adalah belahan dua dari transmigrasi. Lahan ini diminta untuk ditanami setelah itu ganti pimpinan, lahan itu di klaim sebagai pemilik perusahaan. Dan ini masalah. Dan beberapa kali saya kira sudah sampaikan ini, tentu ini butuh kehadiran dari kita semua dari Dirjen tentunya sebagai yang punya kewenangan langsung di sana, ini perlu segera diatasi.

Kemudian yang paling bandel mungkin di sana itu ada perkebunan besar Sinar Mas punya. Dimana-mana Sinarmas punya kebun ini luas sekali. Tapi di Papua beberapa izin yang keluar untuk Sinarmas Grup ini tidak ada sedikitpun yang 20% dilakukan, itu masalah. Jadi saya mendukung pernyataan Ketua Komisi kemarin untuk mengundang para pengusaha sawit ini ke Komisi IV supaya kita bisa berdialog langsung dengan mereka dan menanyakan apa sebabnya sebetulnya. Lain daripada itu tentu masalahnya mungkin kurang lebih sama dari soal harga, alasan Papua mungkin terlampau jauh.

Lalu yang dikorbankan tentu ada, seperti ini yang saya mau cerita di PT PIR di Arso di Jayapura, di Keerom ini sekarang plasma ini sertifikatnya di ambil oleh perusahaan kemudian digadaikan lalu dipakai untuk membangun kebunnya. Kemudian kewajiban lain juga dipotong-potong sampai terjadi masalah dan sekarang ini saya tidak tahu apakah jalan atau tidak, diisukan ke mana-mana. Ini masalah yang juga memang serius karena di wilayah Keerom itu rata-rata semuanya kebun sawit.

Karena itu maka dari semua izin yang dikeluarkan untuk perusahaan-perusahaan yang tadi saya sampaikan yang jumlahnya kurang lebih 30an ini. Itu sedapat mungkin dihentikan perluasan kebunnya sekalipun izin HGU-nya, maaf izin luas kebunnya itu masih ada tapi mohon supaya tidak dilakukan, tidak diizinkan untuk membuat kebun lagi. Alasannya seperti kemarin saya dengan Pak Darori kami sudah bertemu dengan masyarakat pemilik wilayah di sana. Komunikasi antara perusahaan dengan pemiliknya hampir tidak.

Ada 30 orang yang mewakili beberapa kabupaten wilayah adat di Sorong ada, Manokwari, Jayapura, Keerom, Merauke Boven Digoel dan Timika. Saya kira ini masalah serius, mereka jauh-jauh datang dari Papua untuk menyampaikan maksudnya dan karena itu mereka harus ditolong. Persoalan antara perusahaan dengan masyarakat, persoalan antara perusahaan juga dengan karyawan karena ini penerapan harga rata-rata tidak layak untuk kita pertahankan di sana. Tapi juga ada masalah yang tadi juga disampaikan oleh asosiasi dari APKASINDO. Konflik di kawasan hutan, ini juga saya kira ini tanggung jawab ada juga di Pak Dirjen. Kalau kita bilang bicara devisa negara, pendapatan hasil ekspor kita cukup besar, tapi kalau rakyat tidak di tolong tidak ada gunanya.

Karena itu, maka mau tidak mau jadi persoalan harus diselesaikan. Pak Dirjen saya minta supaya ini bisa di fasilitasi antara perusahaan dan juga kebun raya yang ada di sekitar situ. Kalau kewajibannya yang 20% tadi belum dilakukan barangkali ada negosiasi khusus. Tetapi kalau tidak, perusahaan juga harus wajib untuk menerima hasil kebun rakyat itu. Jadi harga TBS nya mestinya masih sama juga dengan harga plasma yang dibawah langsung. Tidak bisa dibedakan, kalau tidak begitu saya tidak akan dapat apa-apa. Ditekan terus dan mereka sampai tidak punya pegangan, nah itu masalah bagi kita.

Kemudian soal petani plasma ya. Ada tiga kategori berarti. Ada petani plasma, ada koperasi, dan juga ada petani swadaya. 3 berarti. Oh petani mandiri dan petani plasma. Sudah termasuk koperasi dalamnya? Oke. Nah ini saya kira perlu disejajarkan Pak Dirjen. Harga perlu disejajarkan untuk bisa mereka juga berkontribusi langsung kepada perusahaan yang ada. Persoalan lebih teknis lagi saya kira itu bisa dibahas secara khusus. Tapi pada intinya bahwa kehadiran perusahaan di tempat dia beroperasi di sana, itu harus berguna bagi masyarakat di sekitar itu. Itu intinya. Dan kemudian antara pemilik lahan, pemilik wilayah itu juga harus dihargai sehingga konflik ini bisa dihindari.

Yang terakhir di seluruhnya tidak punya HGU mereka hanya bermodalkan Keputusan Menteri atau surat dari Gubernur. Ini membahayakan. Kalau tidak ada pegangan HGU artinya ini tidak bisa dijamin untuk jangka Panjang. Persoalan akan

timbul terus dan yang pusing adalah kita semua. Mohon ini Pak Dirjen bisa menyikapi apa yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Sulaeman, selanjutnya Pak Firman Soebagyo dan selanjutnya siap-siap Pak Suhardi Duka.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrohmanirohim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati.

Pak Dirjen, dari GAPKI dan seluruh asosiasi yang hadir pada sore hari ini.

Pertama tentunya papat ini adalah rapat yang salah satu tujuannya adalah untuk mencari atau memecahkan sebuah solusi, kira-kira begitu Pak Dirjen ya? Namun akan awali dengan pertanyaan yang sangat serius kepada pemerintah. Kalau tadi kita lihat, dengarkan semua dari apa yang disampaikan Pak Dirjen itu sangat benar. Saya tidak mengoreksi dan saya memberikan apresiasi, yang Bapak sampaikan itu benar semua. Dan kemudian saya kecewa dengan Pak Joko. Saya sebetulnya sangat berharap pada Pak Joko tadi menyampaikan hal-hal yang menukik. Tetapi rupanya bunga besar ini landau-landai saja, *safety player* begitu. Padahal masalahnya banyak. Kenapa Pak Joko tidak setajam yang sebelah kirinya ada 4 orang tadi yang begitu tajam menyampaikan pokok persoalan?

Suka tidak suka kita harus jujur, kelapa sawit atau CPO atau kelapa sawit ini barokah atau musibah? Ini harus dijawab. Menurut saya adalah barokah. Tidak semua negara memiliki kelapa sawit yang sehebat Indonesia. Namun barokah ini tidak kita cermati secara baik bahwa ternyata barokah ini masih banyak masalah. Kalau kita lihat aspek penting daripada sawit dari sisi ekonomi jelas, bahwa pernah menggali devisa negara di atas yang namanya minyak dan gas bumi. Dan kemudian sosial budaya, sudah bisa menjawab tantangan kesenjangan sosial pulau Jawa dan luar Jawa. Iya Bapak-Bapak itu mesti dari Jawa ini.

Kemudian berkembang menjadi bahan baku yang luar biasa. *Downstream*-nya Malaysia sudah demikian hebatnya dan sekarang berkembang yang namanya bioenergi. Yang terakhir, satu temuan yang menarik adalah substitusi kayu. Ini luar biasa. Tetapi persoalannya adalah saya mau tanya pemerintah. Serius tidak pemerintah menyelesaikan persoalan yang namanya perkelapasawitan ini? zaman pemerintah itu melihat dengan sebelah mata. Pertanian, perkebunan jangan di ibaratkan seperti memelihara itik. Pagi di lepas dari kandangnya silakan cari makan sendiri-sendiri

habis itu sore masuk kandang, pagi dipanen telurnya. Filosofi saya seperti itu Pak. Hari ini pemerintah seperti itu.

Persoalan yang disampaikan Pak Darori tadi jelas. Konsisten enggak pemerintah itu melaksanakan undang-undang yang tadi kita undang kan? padahal tadi pelanggaran begitu banyak. Nah ini menjadi persoalan penting yang kita bahas pada sore hari ini. Belum tadi biaya-biaya pemungutan hasil daripada ekspor yang sudah mencapai 47,8 triliun, kemana uang itu? Siapa yang bertanggung jawab? saya khawatir ini nanti nyaris seperti dana reboisasi dan seperti dana konservasi. Nyaris tidak terdengar seperti Isuzu iklannya itu, nyaris tidak terdengar suaranya. Saya khawatir seperti itu padahal dana ini kewajibannya adalah bagaimana dikembalikan kepada petani, kepada daerah yang telah dipungut tadi.

Mereka banyak persoalan, tadi sudah dipungut kemudian hasil menjual tandan. Hasil buah tandannya juga diperlakukan tidak adil. Masih banyak juga pelaku usaha yang suka mempermainkan harga, ini kan udah selesaikan. Saya tidak hanya sekedar bicara untuk mengkritisi tidak bicara apa, saya pada forum ini akan menyampaikan solusi. Apa solusi yang diambil? Memperbaiki, membuat regulasi. Kata kunci ada di situ. Regulasi yang bisa mengisi energi ke semua Kementerian yang terkait dengan pertama, pentingnya CPO ini menjadi salah satu komoditi strategis.

Sawit ini menjadi salah satu komoditi strategis. Hanya saya kecewa Pak Dirjen, mudah-mudahan Menteri Pertanian sekarang tidak mengecewakan saya. Bagaimana saya pada waktu menginisiasi Undang-Undang Perkelapasawitan saya mulai sendirian dan akhirnya seluruh Badan Legislasi menyepakati karena kita undang pakar-pakar. Tapi apa yang terjadi? pemerintahan hanya melihat dengan sebelah mata. Ketika itu Pak Darmin Nasution yang sangat tidak paham tentang konstitusi negara kita.

Undang-Undang yang menjadi inisiatif DPR diinstruksikan, diberhentikan di tengah jalan. Dan sampai sekarang Menteri Pertanian kita undang, sepatah kata pun tidak pernah membela yang namanya CPO, tidak pernah membela yang namanya perkelapasawitan kita. Diam. Bahkan ketika kasih waktu, Pak Amran Sulaiman melalui WA, izin Ketua saya meninggalkan tempat ada rapat yang lebih penting. Apakah rapat DPR tidak dianggap penting? Ini saya kecewa.

Oleh karena itu Pak Pak Kasdi, Pak Dirjen tolong ini menjadi catatan Bapak sampaikan kepada Menteri. Jangan dilihat sebelah mata, ini persoalan. Bagaimana tadi Mbak Luluk menyampaikan tantangan global, bagaimana dunia sekarang ini berkonsentrasi terhadap energi baru terbarukan. Salah satu komoditi sawit ini adalah bisa mengatasi persoalan krisis energi kita. Nah ini yang kita berpikir ke depan. jangan kita bicara mundur. Saya tidak bicara parsial, persoalan banyak kita ke depan. Oleh karena itu konkritnya saya mengusul kepada pimpinan agar rapat ini pertama, segera memutuskan dalam kesimpulan dibentuk Panja Perkelapasawitan atau Panja Komoditi Perkebunan yang strategis.

Yang kedua *output* daripada itu adalah bagaimana nanti kita bisa membuat regulasi yang namanya undang-undang. Apakah undang-undang nanti judulnya Undang-Undang Perkelapasawitan seperti yang semula? Apakah ini akan menjadi

undang-undang perlindungan terhadap komoditas strategis? Amerika punya undang-undang itu, Jepang punya undang-undang itu, Cina punya undang-undang bahkan Malaysia pun tetangga kita punya Undang-Undang. Kenapa Indonesia yang 270 juta penduduk dan tadi pertandingan begitu besar, perusahaan yang begitu besar, tetapi kita tidak punya nyali untuk membuat undang-undang itu? Ini adalah satu kebutuhan bagi kita, kalau itu kita pertahankan maka kita akan menjadi negara yang tertinggal. Demikian.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Firman.

Teman-teman Komisi IV perlu saya sampaikan di bulan Desember kita akan mengadakan RDP dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dari Kemenkeu. Jadi ini saya rasa kita bisa bedah tuntas permasalahan dana sawit ini yang dari tahun ke tahun ini pungutannya ini enggak kecil jumlahnya ini lho. 47 triliun rata-rata hampir 10 sampai 12 triliun per tahun. Kita nanti ingin mendengarkan ke mana larinya pungutan dana perkebunan kelapa sawit ini supaya nanti kita bisa tindaklanjuti juga kepada asosiasi.

Kita lanjutkan berikutnya Pak Suhardi siap-siap Pak Slamet.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat.

Yang saya hormati Pak Dirjen dan asosiasi yang saya juga hormat.

Saya kira memang sawit ini ini adalah anugerah bagi bangsa Indonesia, kenapa? Karena di tengah ekonomi kita turun, ekspor kita melemah, sawit masih menjadi andalan kita dan juga menyerap banyak terhadap masyarakat kita di hidupnya di sawit ini. Olehnya itu sawit ini saya sependapat dengan pembicara terakhir bahwa harus fokus. Kita harus *goal* kan undang-undang khusus untuk sawit. Karena ini untuk melindungi semua. Melindungi pemerintah, melindungi pengusaha, dan melindungi petani.

Sejak awal saya melihat bahwa sampai saat ini ini kalau kita bagi tiga kepentingan pemerintah, pengusaha, kemudian petani. Posisi pemerintah saya melihat sampai saat ini masih berat pada pengusaha. Belum banyak perhatian penuh kepada petani atau belum berimbang. Sehingga itu, apabila terjadi hambatan-hambatan, ekspor, dan lain sebagainya, harga turun, pengusahanya *ndak* tidak kekurangan margin. Yang kurang adalah petaninya karena harganya turun nilainya tetap pada pengusaha. Harusnya kan kalau terjadi gejolak seperti itu kan keduanya

kita harus turun. Oke lah petani juga merasakan, pengusaha juga harus merasakan supayaimbang.

Yang selanjutnya, harga petani dan perusahaan berbeda-beda. Sejak awal saya sampaikan di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai kepada Papua itu depresiasi harga berbeda. Sedangkan harga CPO dunia dan lain sebagainya dan turunnya kan sama. Tentu beda, kalau hanya sedikit karena transport, oke. Tapi karena keterlibatan pemerintah kan ada di situ seharusnya lebih fokus.

Yang selanjutnya saya juga melihat bahwa dari laporan teman-teman petani tadi dari Riau kalau saya bandingkan antara masyarakat Riau dengan yang ada di Sulawesi Barat lebih berani bapak-bapak yang ada di Riau. Kenapa berani? karena berani masuk berkebun di kawasan hutan. Kalau kami di Sulawesi Barat tidak berani, nanti melalui proses baru kami masuk. Tapi apa pun sudah di dalam, ini masalahnya. Mereka sudah di dalam, tidak boleh lagi kita mau bakar dia punya rakyat kan. Polanya itu perlu dipikirkan baik-baik supaya ada legalitas masyarakat yang kebunnya sudah hampir di *replanting* lagi berarti sudah 25 tahun ke atas. Jadi nasi sudah menjadi bubur kata-kata seperti itu, bagi lingkungan kita. Kita harus mengambil sikap supaya ada kepastian hukum bagi para petani sawit kita ini.

Terakhir adalah dana *replanting*. Saya kira saya juga sependapat ini penting dan saya kira Komisi IV ini harus bisa menyelesaikan ini, Pak Pimpinan apakah dalam bentuk Panja, dalam bentuk apapun. Penyelesaian persoalan sawit Indonesia ini harus selesai dalam periode kita jangan lagi berlanjut sampai ke periode DPR berikutnya. Harus tuntas betul, supaya apa? komoditas ini adalah komoditas andalan Indonesia yang tadi juga mengatakan bahwa kenapa Malaysia menentukan harga? Saya kira ini harga diri kita. Kita yang lebih banyak, kita penguasa, kemudian ditentukan oleh Malaysia lagi. Kita selalu kalah di Bukit Jalil. Tirani minoritas, iya saya kira terima kasih Pimpinan semoga pemerintah bisa lebih adil kepada semuanya, sehingga dengan demikian masyarakat kita bisa menikmati sawit menjadi komoditas andalan kita.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Suhardi, selanjutnya Pak Slamet siap-siap Bu Alien.

F-PKS (drh. SLAMET):

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

**Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi IV yang saya hormati.
Mitra kerja yang hari ini hadir yang saya hormati.**

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ingin menyimpulkan dari beberapa pembicaraan ternyata memang terkait dengan kebijakan pemerintah hari ini tampaknya kurang optimal dan seperti itu. Bahwa kemudian pemerintah hadir ya, tapi nampaknya kemudian bagaimana keberadaan DPR dalam hal ini Komisi IV untuk kebersamai sehingga fungsi-fungsi kehadiran di tengah-tengah rakyat harus dirasakan secara langsung. Ini tercermin dalam beberapa rapat kita ketika kemudian itu semuanya nampaknya petani yang menjadi pesakitan. Bahasa seperti itu, ketika kita bicara tentang petani padi, petani yang kemudian diombang-ambing oleh harga sehingga nasibnya lagi-lagi dia yang menjalani ya sumber kemiskinan ada di sana.

Ketika kita bicara tentang laut, nelayan yang jadi korban pertama dan paling terdzolimi juga para nelayan karena beberapa kebijakan. Artinya ketika hari ini kita bicara sawit lagi-lagi juga yang menjadi tanda kutip tertulis juga petani sawit itu sendiri. Dalam hal ini tentunya saya juga sepakat bagaimana kemudian ini tercermin dari beberapa regulasi aturan yang dikeluarkan adanya pertentangan atau penentangan-penentangan dari masyarakat atau dari khususnya adalah petani itu sendiri. Sehingga ini karena dianggap merugikan termasuk tadi beberapa catatan kita, termasuk aturan beberapa regulasi yang dicatatkan tadi sudah kita resume itu menunjukkan betapa memang kehadiran Pemerintah kurang optimal dalam keberpihakan kepada petani.

Sehingga di sinilah kemudian diperlukan duduk bersama regulasi mana sih kita harus dengarkan? sehingga nanti kehadiran pemerintah memang betul-betul bisa mengangkat derajat dari para petani baik petani apapun. Justru tidak dimatikan dengan berbagai regulasi yang ada. Sehingga nanti kita Dewan, dengan apapun Panja namanya, sisi lain untuk pengawasan kita perlu turun langsung untuk kemudian memang memastikan bahwa seluruh regulasi yang ada itu berpihak kepada rakyat kecil termasuk tadi masalah harga.

Harga tidak hanya ada di kelapa sawit juga mau di petani padi, nelayan, semuanya ketika bicara tentang harga juga demikian adanya. Pemerintah tidak hadir ada di pasar demikian rupa di *floor*-kan di pasar, fluktuatif. Sehingga saya sangat setuju tadi dengan bahasa senior kita Pak Firman kayak memelihara itik, seperti itu. Sehingga hadirnya pemerintah lebih pada tidak terasa oleh rakyat untuk meningkatkan derajat hidupnya.

Ini catatan kita sehingga bagaimana kemudian Pimpinan dan seluruh anggota kita kebersamai. Kita tidak dalam posisi kemudian juga menyalahkan 100% tapi bagaimana kehadiran dewan bisa kebersamai kemudian pemerintah untuk kemudian memang bisa menghadirkan manfaat yang *real* untuk mengangkat kemiskinan dari itu. Karena target pemerintah besar adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau dihadang dengan berbagai regulasi yang ujungnya mempersulit masyarakat kita maka rasa-rasanya tidak akan pernah tercapai kemudian kita mengentaskan kemiskinan itu karena ini adalah sistemik yang harus kita selesaikan. Dalam posisi Komisi IV regulasi mana yang kemudian harus kita sederhanakan? itu yang pertama.

Yang kedua, saja juga sepakat ingin mendapatkan gambaran tadi sebagaimana di Mbak Luluk bahwa sisi lain tadi dikatakan berkah tapi kalau kemudian

ada kampanye dari luar yang ingin memblokir dari sisi produk-produk dari kelapa sawit ini kan bahaya. Sehingga saya ingin mendapatkan gambaran langkah-langkah apa baik teknis maupun non-teknis yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi kemudian kampanye yang di Eropa ini? saya yakin ini akan sangat masif, bahasanya adalah sangat struktural dilakukan oleh mereka. Itu saja pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Slamet, selanjutnya Bu Alien dan selanjutnya siap-siap Pak Bagus Adhi Mahendra.

F-PG (ALIEN MUS):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Dirjen beserta GAPKI dan ada tadi beberapa asosiasi petani kelapa sawit.

Kalau untuk saya sih saya ingin mempertegas lagi bahwa sebelumnya sudah disampaikan berapa. Jadi saya hanya cuma ingin Pak Dirjen perhatikan juga bagaimana dengan petani-petani kita. Biar bagaimana mereka juga salah satu penunjang untuk kelapa sawit di Indonesia. Yang tadi dibilang Pak Joko harus lebih kritis, lebih menyampaikan permasalahan-permasalahan tapi kayaknya enggak disampaikan mungkin karena ada sesuatu dan lain hal. Saya disampaikan oleh Pak Firman ini banyak sekali masalah.

Tadi saya juga melihat di GAPKI. Ada penyampaian data yang mohon maaf Pak, kalau grafik itu memang harus *coloring* tapi yang disampaikan ke kita ini fotokopi sehingga yang tadi Bapak sampaikan grafik merah naik dan turun biru itu, kami enggak bisa membedakannya karena semuanya hitam dan putih. Jadi mohon maaf Pak, kalau bisa memang menampilkan data selain di *slide*, kita juga mempunyai data yang *coloring* juga. Karena ini memang sangat diperlukan sekali karena untuk mempresentasikan dan untuk membedakan.

Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Firman dan Bu Luluk, saya juga salah satu orang yang sangat memperhatikan tentang *campaign* yang ada di Eropa soal kelapa sawit. Dan ini tadi di GAPKI ada target 2020 naik untuk perkiraan ya Pak, di sini datanya naik di 2020 7,16 juta per ton perkiraannya. Ini kan juga harus kita sinkronisasi data juga Pak Dirjen. Ini ada di sini di halaman 9, di halaman 9. Ini perkiraan permintaan minyak sawit dunia.

Terus saya ingin menyampaikan bahwa Taman Nasional Gunung Leuser dan sekitarnya, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan kawasan konservasi yang menyimpan keanekaragaman hayati

tinggi. Pada tahun 2004 ketiga taman nasional tersebut dinobatkan menjadi *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* atau situs warisan dunia hutan hujan tropis Sumatera oleh UNESCO. Pada tahun 2011 Pak Dirjen, setelah monitoring dan evaluasi UNESCO menetapkan ketiga taman nasional tersebut sebagai situs warisan dunia dalam bahaya atau *in danger list*.

Pemerintah Republik Indonesia diminta menyusun besar *Desired State of Conservation for the removal of property from the list of World Heritage in Danger* dan *Emergency Action Plan* untuk mengeluarkan TRHS dari *list danger*. Kemudian pada tahun 2013 pemerintah Indonesia dan komiter warisan dunia membuat rencana *Desired State of Conservation for the removal of property from the list of World Heritage in Danger* atau dukungan negara bagi aksi konservasi untuk mengeluarkan ketiga taman nasional dari daftar warisan dunia dalam bahaya serta kegiatan monitor melalui *corrective measure*.

Ini sangat diperhatikan Pak, karena kita juga melihat ada beberapa yang sudah disampaikan ini ada tumpang tindih izin lahan kawasan. Bagaimana juga kita harus lihat dengan isu moratorium penanaman kelapa sawit dan sudah mendekati kawasan nasional. Dan tadi sudah disampaikan sama Pak Kris mungkin saja di halaman rumahnya juga termasuk dalam perkebunan kelapa sawit. Mungkin saja Pak makanya tumpang-tindih izin ini juga sangat berlaku nih Pak. Harus di harus dilihat lagi regulasinya apabila ada pelanggaran dari regulasi tersebut harus diberikan sanksi yang sesuai dan tegas.

Ini juga harus kita lihat Pak Dirjen, bagaimana strategi dan kebijakan serta upaya-upaya apakah yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendorong mengeluarkan berbagai taman nasional yang merupakan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* dari daftar dalam bahaya. Ini PR buat kita Pak. kemudian karena sudah dilihat-lihat sama Pimpinan saya Pak Budi, berarti satu menit setengah itu yang paling optimal jangan lebih-lebih dari itu. Sebenarnya saya punya 10 pertanyaan sampai 15 pertanyaan Pak. Tapi nanti bisa di bagi-bagi ke yang lain.

Jadi lahan tidur Pak yang sudah mangkrak atau tidak terpakai lagi di wilayah Sumatera itu, pernah enggak direvitalisasi atau di dicari solusinya? terus apakah fasum untuk masyarakat sekitar perkebunan itu adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan juga atau tidak? karena pada realitanya masyarakat sekitar perkebunan itu juga listriknya, rumah sakitnya atau puskesmasnya, terus juga air bersihnya Pak perlu diperhatikan. Kami, saya dari Maluku Utara tapi saya berkunjung di beberapa daerah Sumatera saya sangat prihatin dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama di Komisi IV dan Dirjen Pertanian sebagai perwakilan dari pemerintah. Ada juga di sini ada perwakilan dari petani kelapa sawit.

Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, saya juga sudah lihat kalau Pak Joko kurang nukik. Tapi tadi Mas siapa ya tadi yang sekretaris itu sudah sangat menyampaikan sesuai dengan mungkin yang sudah dipaparkan ini bahwa ini memang harus ada atensi yang khusus atau spesial bagi petani-petani kita mungkin apabila harus ada bantuan yang kita berikan gitu, ada atensi dari Pemerintah lah Pak. Intinya hanya itu, saya masih suka menggoreng pakai kelapa sawit.

Jadi mudah-mudahan jangan sampai kampanye yang dilakukan luar negeri itu bisa berdampak juga bagi kita yang ada di Indonesia karena kita penghasil kelapa sawit yang terbesar seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan semoga dalam pertemuan ini bisa membawa dampak yang positif bagi kita semua.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Bagus Adhi dan yang terakhir Pak Bambang Purwanto kami persilakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pak Dirjen dan seluruh anggota.

Sebenarnya rapat hari ini tempat yang terlengkap sebenarnya. Tadi Pak Firman juga menyampaikan rapat hari ini adalah mencari solusi. Sementara Bapak-Bapak di depan berunding apa kira-kira yang terbaik yang bisa dilakukan untuk bangsa ini. 350 tahun bangsa kita dijajah Pak, tapi yang perlu kita pertanyakan ada apa dengan Indonesia? berarti ada hal yang sangat menarik yang ada di Indonesia yang perlu kita ingat. Tadi Pak Firman bilang dilihat sebelah mata. Kalau saya menyampaikan kita harus dengan sepenuh hati bangun bangsa Indonesia ini khususnya kelapa sawit ini.

Saya malu baca artikel, di tahun 2018 PCO kita ditolak oleh parlemen Eropa. Ini kira-kira solusinya dan jawabannya dan hasilnya apa? Terus yang lebih memalukan lagi kajian dari *World Bank* menghasilkan menghasilkan 3 masalah. Masalah pertahanan pertama dan luasan lahan dari perusahaan kelapa sawit ini, enggak jelas. Yang kedua adalah dugaan-dugaan kerusakan lingkungan yang sampai saat ini masih terjadi.

Kemarin saya ke Kalteng, saya ngeri mendengarnya. Kalau terus terjadi pembakaran-pembakaran yang kemudian habis yang kemudian muncul pasir. Nah kalau sudah jadi pasir apa mau ditanam di situ? berarti apa? berarti sosialisasi kepada masyarakat perlu kita perdalam. Ini saya tanya masyarakatnya, tahu enggak Bapak kalau ini dibakar terus? "enggak tahu." Lho kenapa membakar? "biar cepat saja." Ini perlu menjadi sikap yang konkrit dari kita sehingga petani kelapa sawit bisa kita hilangkan dari dugaan perusakan lingkungan itu. Dan yang ketiga adalah belum terbangunnya kemitraan dari pengusaha kelapa sawit dengan masyarakat.

Nah ini kan sebenarnya 3 hal di kajian ini sebenarnya hal yang tidak sulit kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh melakukan ini. Nah inilah Bapak/Ibu sekalian, ini sudah sangat lengkap. Marilah mulai hari ini kita sungguh-sungguh melakukan ini. Bila perlu dengan hal seperti ini yang alasan dan kajian yang sangat ilmiah ini, saya

mengusulkan agar dibentuknya Panja Kelapa Sawit ini untuk mendalami semuanya apalagi terkait dengan pungutan-pungutan yang jumlahnya tidak sedikit. 47,1 triliun itu kalau pakai membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar biasa. Itu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Bagus Adhi selanjutnya terakhir Pak Bambang Purwanto.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

**Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati.
Dan Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya.**

Terkait dengan kebun kelapa sawit memang ini merupakan andalan bagi negara kita dan efeknya cukup luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi persoalannya ini sangat banyak kelapa sawit ini, tentu ini terkait dengan tugas pokok fungsi dari Kementerian yang harus melakukan pengawasan secara ketat. Seperti apa yang disampaikan tadi baik dari perusahaan maupun dari petani, ini luar biasa dan menunjukkan kelemahan dari Kementerian. Ini harus diakui. Oleh karena itu peran Komisi IV ini harus lebih tajam nanti pimpinan. Seperti yang disampaikan harus di bentuk Panja saya sangat sependapat.

Seperti apa yang saya alami di daerah, plasma itu juga masih ada masalah karena hubungan kerja antara koperasi dengan perusahaan ini harus ada lembaga di tengah-tengah yang dibentuk. Perwakilan dari perusahaan maupun perwakilan dari koperasi, ini tidak pernah difungsikan sehingga transparansi plasma ini juga belum ada ini. Ini juga perlu mendapatkan perhatian apalagi petani swadaya. Ketika panen mau dilempar ke perusahaan alasannya *over* produksi sehingga diberikan harta yang sangat minim.

Pak Dirjen kalau boleh saya sampaikan, harga yang disampaikan Pak Dirjen tadi terendah 1.142. Bapak, di Kalimantan Tengah itu sampai 500 akhir tahun kemarin. Menangis ini petani. Dan ini bisa miskin. Ketika di *replanting*, ada bantuan dana itu juga masalah karena terkait dengan kawasan hutan dan harus membentuk kelompok minimal 50 hektar. Ini juga menjadi persoalan bagi petani sehingga ini sulit dicairkan.

Kemudian Komisi IV tentu harus punya bahan yang detail. Kemarin saya minta peta kebun baik untuk kebun koperasi maupun rakyat. Tapi hari ini belum diserahkan. Saya minta nanti untuk bahan Panja kita minta peta kebun karena tanpa itu kita tidak bisa melakukan pengawasan secara detail. Dari situ lah nanti kita punya bahan yang lebih tajam lagi terkait dengan fungsi pengawasan dari Komisi IV. Saya kira itu Pimpinan alternatif dimasukkan di rekomendasi terkait dengan peta kebun. Kalau sampai Kementerian tidak memberikan atau tidak punya, ini kebangetan. Sudah

sekian puluh tahun mengelola mengawasi kebun tapi peta kebun, ini indikasi yang tidak sehat.

Terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Bambang.

Saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang Pak, tertarik *statement* teman-teman, kelapa sawit ini barokah atau musibah? coba saya minta ada kata mufakat dari pengusaha dan petani. Tadi kan semua persoalan ini ada pada persoalan tanah. Ada monopoli, di sana dan juga itu ada ketidakpastian status tanah sehingga ISPO tidak bisa terbit. Coba kita nanti akan sepakat ini pimpinan semua atas desakan para anggota, akan ada Panja serius. Dan Pak paguyuban, gabungan pengusaha wajarlah karena pengusaha nyanyiannya beda dengan asosiasi petani, kan gitu. Ada yang melankolis ada yang itu manusiawi. Sebagaimana yang menurut hatinya yang dirasakan pedih atau tidak.

(suara tidak jelas) Permen, saya ingin mengangkat Perpres 88 dan Permen 83 tentang Perhutanan Sosial. Coba seandainya tidak ada ya ego seorang pengusaha, kata akhir bagaimana pengusaha dan petani bermitra? sudah ada dasar hukum ini. Tinggal nanti mau enggak pengusahanya? berkenan enggak pengusahanya setiap 2 hektar oleh 1 petani. Terus, berapa ratus hektar pun *insyallah* saudara kita yang sedang di Malaysia, bekerja kelapa sawit ya kan pulang Republik yang kita cintai kalau pengusahanya tidak pongah.

Sudahlah bagaimana menciptakan sebuah kemitraan kalau rugi menangis bersama, kalau untung tersenyum bersama. Sudah cukup kan yang kaya (rekaman terpotong) dan setanah air. Saya ingin mengusulkan kepada Pak Dirjen tawarkan kepada 2 ini, 2 elemen bangsa ini yang satu pengusaha yang satu petani. '88 dan '83 itu Perpres dan Permen Perhutanan Sosial.

Ini bukan retorika Pak, saya tidak pernah melontarkan retorika sebelum saya mengamalkan Presiden pernah hadir di kampung saya membagi ribuan hektar kepada ribuan orang. Selesai tidak ada persoalan. Bisik Presiden mohon maaf kepada telinga saya. "Pak Hasan karena teman Pak dulu," Pak bupati katanya. Beliau kan walikota dulu. "Hari ini sudah tidak akan dinistakan petani Pak Hasan, kalau dulu kan aku di takut-takuti mandor Perhutani kan takut, Pak Hasan. Setelah saya kasih surat cinta tidak mungkin takut". Sekali lagi diskusikan coba antara pengusaha dan asosiasi petani ini. Perhutanan misalnya, keterlibatan masyarakat secara banyak. Kita mobilisasi, kita bangun SDM-nya di sana. *Insyallah* ini akan mengangkat harkat dan

martabat. Devisa akan hadir, kan itu kan? Kesejahteraan rakyat akan terpenuhi, konflik sosial sudah akan kita kurangi bersama-sama. Ini solusi bukan wacana.

Saya tidak mengambil teorinya orang Amerika. Saya sendiri melakukan itu. Ribuan hektar dan Pak Jokowi hadir, hari ini tersenyum semua. Tanamannya sesuai dengan selera rakyat. Yang mau panen cabai silakan, tanam tembakau silakan, tanam bawang merah silakan, jagung silakan. Karena ini kelapa sawit, ya tumpang sari lah. Ya kelapa sawit kan gitu.

Bagi yang mau salat silakan kalau yang mau magrib ya atau skors. Pak Dirjen puasa ya? Silakan, silakan diminum. Sudah magrib? kalau saya sudah salat asar zuhur tadi, sudah jamak ashar. Bagi yang mau jamak boleh Pak. Musafir kan, keluar dari rumah apalagi ini untuk urusan bangsa gitu ya. Ini fatwa Pimpinan Komisi IV. Boleh kata Pak (suara tidak jelas). Barangkali itu. Kami persilakan. Ini silakan, ini jadi PR kita bersama. Kalau cocok pikiran saya dilakukan, kalau enggak ya kita Panja nanti bersama-sama.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Daniel ada yang mau disampaikan?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pimpinan, segenap sahabat anggota.

Pak Dirjen, terkhusus para Ketum dan pengurus asosiasi.

Jadi pertama gini Pak Dirjen, hal pertama adalah kita harus memahami gempuran tekanan terhadap sawit kurang lebih sama seperti gempuran dan tekanan terhadap tembakau. Di satu pihak ini adalah perang dagang, perang kepentingan negara-negara besar terhadap Indonesia yang kebetulan kita menguasai produk yang tidak bisa dia kuasai, itu satu hal. Hal kedua terlepas benar atau enggak itu yang kita harapkan peran kedirjenan. Peran tembakau, kalau saya ya enggak terlalu percaya dengan kampanye negatifnya tembakau, jujur. Termasuk sawit. Itu harus kita *black list* ini secara kita sebagai bangsa.

Sawit *problem* terbesar di segitu banyak ya stigma terhadap keburukan sawit, yang buat saya sangat terlihat hanya satu, monokultur. Itu *problem* monokultur. Tetapi yang lain itu bisa saja hikmah yang diciptakan untuk menekan kita sebenarnya. Karena dibanding misalkan dia bilang menghancurkan lahan, satu. Lho memang produk kedelai tidak menghancurkan lahan? Misalkan *grapeseed* tidak menghancurkan lahan? yang kekuatannya orang Eropa orang Amerika sekarang. Lalu kita bandingkan skala produktivitas sawit dengan kedelai dengan yang jagung, kalah mereka. Mereka tidak bisa bersaing dengan sawit. Artinya 1 hektar sawit

dibandingkan dengan 1 hektar kedelai lebih produktif sawit jauh berkali lipat. Satu, artinya apa? dengan posisi sama yang lebih banyak menghancurkan lahan yang mana? mereka bukan kita. Lalu kenapa kita yang difitnah? Misalkan gitu

Jadi perlu dan gempuran Eropa segala macam mana peran pemerintah negara? mana peran BPDPKS? di sini mana BPDPKS? Tidak hadir? (suara tidak jelas) khusus. Mana perannya? Cuma *collect*-in duit doang kerjanya tapi enggak pikirin kok. Jadi, soalnya yang ketiga, kenapa kita harus *fight*? karena walaupun kita anggap benar lah kampanye mereka. tembakau buruk, sawit buruk, pertanyaan saya kepada negara, pertanyaan saya kepada rakyat, memang kita *stop* tembakau? Jawabannya 1000% enggak mungkin kita *stop*.

Saya tanya, kita mau *stop* sawit? Jawabannya 1000% enggak mungkin. Tembakau dan sawit itu penghasil devisa terbesar kok saat ini. Dan dampaknya terhadap rakyat besar. Sehingga yang kita harus ambil sikap adalah walaupun benar ya, seluruh kampanye buruknya benar adalah kita memastikan tembakau dan sawit 100% harus hanya menguntungkan Indonesia, tidak boleh menguntungkan yang lain. Karena kalau enggak, kita bodohnya dua kali, iya kan? Misalkan tembakau kita anggap jelek, sudah jelek misalkan menibulkan kesehatan tapi masih menguntungkan asing, buat apa? Justru karena jelek *full* harus menguntungkan Indonesia 100% tidak boleh menguntungkan asing. Karena kalau enggak kita rugi dua kali, enak saja. Termasuk itu bodohnya kita, gitu.

Tetapi karena tembakau lah, sawit sudah menjadi kekuatan bangsa untuk kita pertahankan. Satu titik tetapi di titik yang lain tentu harus bekerja keras bagaimana yang ada ini lestari, misalkan yang lain sudah *stop* kita sampai sini. Tetapi yang ada ini kita maksimalkan sebaik-baiknya sampai akhirnya hilirisasinya kita menguasai dunia. Kita jangan hanya mampu mengekspor CPO doang. Banyak kok turunan ada berapa belas itu, kita hanya baru beberapa. Dan Indonesia enggak perlu takut kekurangan pasar. Kita enggak butuh ekspor dulu deh, kita penuh produk dalam negeri kurang impor.

Kemana BPDPKS? kemana perannya? Peran sudah dilakukan. Hal-hal seperti ini yang mudah-mudahan bisa digarap oleh Panja nanti. Kita harus *fight* membela bangsa kekuatan strategis Indonesia banyak. Sawit, tembakau yang memang termasuk kelapa. Kita penghasil nomor 2 terbesar kok. Intinya yang kita bisa meskipun mau Eropa, mau Amerika punya lahan jutaan hektar walaupun itu mereka enggak bisa tanam. Hah itu yang harus kita fokus dan kita bisa men-*supply* pangan, biodiesel segala macam.

Kita berharap hal-hal ini bisa dijawab oleh Panja nanti. Kita harus bisa perjuangkan, jangan justru malah terlalu banyak mengkhianati dalam negeri. Mental kuli semua, terlalu banyak yang bodoh di Indonesia ini. Ya ujung-ujungnya ya itu. Komitmen *fight* untuk bela Indonesiannya hanya diukur dengan transaksi doang. Ya hancur lah Indonesia ke depan lama-lama. Mungkin itu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Daniel terima kasih.

Bapak-Bapak/Ibu-Ibu.

Demikian tanggapan dari anggota. Saya ingin menawarkan kepada semua apakah kita mau skors dulu selama 30 menit ya? biar bisa istirahat sedikit, bisa salat, atau.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Saya mengusulkan karena jumlah anggota tinggal sedikit, oleh karenanya saya takut tadi yang merumuskannya hanya Pimpinan dengan Pak Dirjen dan Pak Joko. Tidak mengurangi rasa hormat, salatnya bisa bergantian dan kemudian nanti kita bikin rumusan. *Insyallah* setelah salat rumusannya menjadi maksimal.

Terima kasih.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Ndak, yang di atas ini mau salah Pak Firman biarkan 15 menit *ndak* apa-apa. Asal kita beri kesempatan salat magrib. Ya karena ini ada yang mau jamak atau yang tidak, karena ini memang wajib Pak Firman, mohon maaf. Kalau salat saya tidak berani membeli dispensasi karena kewajiban.

KETUA RAPA/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik kalau gitu kita skors 15 menit. Saya persilakan Bapak-Bapak/Ibu-Ibu. Untuk itu rapat skors 15 menit.

(RAPAT DI SKORS)

Dilanjutkan. Skors saya cabut.

(SKORS DI CABUT)

Demikian tanggapan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI selanjutnya kita beri peluang, memberi waktu kepada Pak Dirjen dan para Ketua umum asosiasi untuk memberikan tanggapannya. Kami persilakan.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu sekalian.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

**Pimpinan yang kami hormati dan para anggota Komisi IV DPR RI
Para Ketua Asosiasi dan juga Ketua Umum penggabungan pengusaha kelapa sawit
Dan Bapak/Ibu sekalian.**

Pertama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas masukan yang luar biasa. Tentu akan menjadi catatan dan tidak semuanya kami jawab sebagai pertanyaan karena memang ada ada *novelty* dari masukan Pimpinan dan anggota untuk kita tindaklanjuti. Kami juga menyambut apresiasi terhadap komitmen Komisi IV DPR RI yang sangat komit terhadap perkelapasawitan ini hingga muncul ide Panja Kelapa Sawit, kami menyampaikan terima kasih. ‘

Tapi ada beberapa hal yang barangkali perlu ada konfirmasi klarifikasi yang berkaitan dengan apa yang menjadi masalah utama tadi banyak sekali yang bersinggungan dengan perizinan, legalitas, itu sampai saat ini kami tentu tidak pada posisi menyelesaikan sendiri Pimpinan dan anggota. Karena kalau bersinggungan dengan hak atas tanah tentu kami akan merangkul ATR/BPN kalau itu berkaitan dengan kawasan tentu kami rangkul KLHK, kalau itu menyangkut perizinan itu, akan kami rangkul para bupati walikota dan gubernur karena memang izin ada di sana.

Soal masukan kemudian arahan para Pimpinan dan anggota untuk kalau yang melanggar dicabut, nah itu bagian penting masukan yang kami catat sebagai upaya itu. Seperti halnya KLHK juga bisa mencabut izin kalau dia benar-benar melanggar yang berkaitan dengan kebakaran. Itu kira-kira sama. Tentu kewenangan perizinan akan kami selaraskan karena banyak sekali peraturan perundangan antar K/L nya ini ada yang inkonsisten dan sebagainya, saya sangat menaruh baik terhadap upaya-upaya Komisi IV DPR RI untuk mendorong kami menyelesaikan dari perspektif regulasi. Tadi ini kami catat sebagai *novelty* daripada masukan Komisi IV bagian penting untuk menyelesaikan permasalahan yang kaitanya yang bertahun-tahun mengenai perizinan dan juga legalitas.

Legalitas itu macam-macam. Legalitas lahan, legalitas yang berkaitan dan pemiliknnya dan seterusnya. Barusan tadi teman-teman dari petani juga menyampaikan, beda nama saja pada pemiliknnya sebenarnya itu. Itu menjadi pelik Pak kalau tidak segera dituntaskan. Gunadi dari Gunardi gitu saja sudah dari masalah

Pak. Itu baru salah nama, apalagi namanya tumpang tindih? itu satu. Kemudian juga di temuan hasil temuan BPK juga sudah disebutkan di situ bahwa ada tumpang tindih perizinan apalagi perizinan antara perkebunan dengan pertambangan. Itu juga tidak hanya perkebunan saja. Itu yang sedang kami komunikasikan, koordinasikan dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. K/L nya dekat dengan KLHK, kemudian ATR/BPN, kemudian juga perizinan di daerah.

Untuk pengawasan tentu menjadi penting. Tadi banyak sekali sudah disinggung oleh pimpinan dan anggota, instrumen pengawasan kita memang kurang optimal. Kita perlu tingkatkan dengan perlu kita sadari. Kita pandai membuat regulasi tapi instrumen pengawasannya itu yang maka saya sangat sependapat peran daripada Komisi IV DPR RI yang tadi punya komitmen untuk bisa sampai pada level Panja, itu menurut saya luar biasa. Komitmen itu akan kami sambut sebagai upaya, nanti tentu pemerintah akan juga kita sinkronkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya tadi sudah masih menjadi respon. Ada yang merespon positif ada yang tidak berkaitan dengan ISPO misalnya.

Standarisasi itu penting karena itu kita lakukan dengan upaya supaya harga sawit kita itu bisa pada posisi yang tinggi dibeli oleh negara-negara itu. Keberterimaan ini menjadi kunci, senantiasa kita tingkatkan. Soal tadi banyak sekali teman-teman APKASINDO dan juga petani menyampaikan keberatannya, itu wajar. Kami sangat *aware* tentang itu karena memang petani belum. Tapi kita juga bisa menyampaikan bahwa nanti di rancangan Perpres itu mesti ada *timeline* yang bisa *space* 5 tahun untuk bisa, jadi tidak *suddenly* itu berlaku bagi petani tapi masih ada *space* untuk kita itu nanti ini.

Kemudian berkaitan dengan pembiayaan negara pun hadir untuk membantu petani. Jadi wajar dan kami sangat sangat apresiasi terhadap pemikiran teman-teman APKASINDO dan juga petani lainnya untuk bisa keberatan itu, itu wajar karena memang petani di Permentan pun kami masih *volunteer* ini Pak, Perpres diangkat menjadi mandatori. Nah yang kedua kalau kita tidak konsisten akhirnya juga banyak sekali tadi yang berkaitan dengan *black campaign*, Bu Luluk, Bu Alien dan teman-teman anggota yang lain tadi menyampaikan permasalahan kalau inkonsistensi di dalam menerapkan regulasi. Nah kita di klaim lagi oleh-pihak itu.

Sekali lagi untuk *black campaign* sebenarnya salah satu yang sudah kita tempuh melalui WTO sudah berjalan itu. Soal kekhawatiran menang apa enggak nanti itu, kita melakukan itu ya. Salah satunya memang ya kalau komunikasi kami dengan Kemenko Perekonomian karena yang mengkoordinasikan itu. Ya kita pilih memang *lawyer* yang ngetop untuk bisa ke situ. Nah tentu kalau ini dikaitkan dengan soal, alah itu hanya mainan saja. Ya kita harus benar-benar teliti memilih *lawyer* dan lain sebagainya. itu kalau berkaitan dengan upaya melalui WTO.

Kemudian kita sebenarnya di dalam negeri pun tidak diam. Menaikkan dari B20 ke B30 itu bakal meningkatkan konsumsi dalam negeri. Itu artinya tadi kan sudah saya sebutkan kalau ke B20 *pending* nya harus 6 juta ton untuk CPO. Kalau kita tingkatkan B30 itu 10 juta. CPO kita 40,5 juta ton. Artinya bahwa kita masih ada *spend*. Maka inovasi B 100 juga tidak dalam waktu dekat Pimpinan dan ini. Tapi sudah punya inovasi ke situ. Nah walaupun itu tidak kita manfaatkan itu sudah luar biasa.

Sebenarnya kita harus sadar *Delegated Act*-nya RED II-nya Eropa Bu Luluk, Bu Endang kalau kita telisik, jangan terpancing oleh itu. Mereka menggunakan *background* untuk memformulasikan *Delegated Act* RED II itu tidak berdasarkan data fakta aktual yang terjadi. Jangankan Indonesia, Asia pun tidak. Datanya adalah di Eropa dan Amerika. Masa ada data Amerika dan Eropa? ini kalau mau *nganu* ya, mau diikuti Bu Luluk benar sekali, kalau kita terpancing ya begini ini.

Tadi saya sepakat dengan Pak Daniel. Kalau di bodoh-bodohin terus, padahal kita pintar masa enggak bisa bodohin lagi? Nah prinsipnya kalau analisis kita tadi juga ada beberapa *statement* dari pimpinan ataupun anggota yang menyatakan bahwa sesungguhnya mereka takut atas keunggulan minyak sawit kita, karena minyak sawit kita adalah paling efektif paling efisien. Maka *grapeseed* mereka, minyak kanola mereka akan tersaingi, minyak kedelai mereka akan tersaingin.

Sedangkan kalau kita di klaim sebagai deforestasi, lho memangnya mereka apa enggak duluan? mereka sudah 71 tahun. Itu kalau dihitung berapa deforestasinya? kalau kita enggak sadar, kita terpancing yang setuju Pak dengar tadi juga mengatakan tambah bodoh kita. Maka untuk pintarnya kita buat strategi. Dalam negeri kita memanfaatkan lebih besar lagi, tadi derivatif programnya belum kita garap. Kemudian juga biofuelnya masih pada posisi 20. Masih ada peluang besar untuk itu, kalau dia enggak mau impor yang sudah kita pakai sendiri, misalnya begitu.

Kedua apakah memang negara lain enggak ada yang impor? Lha ini India meningkat lagi setelah termasuk juga kita mendapatkan satu peluang untuk dikurangi biaya masuknya, itu satu peluang yang besar. Yang sangat krusial disambungkan oleh Pak Darori dan juga teman-teman yang menyangkut masalah legalitas yang bersinggungan dengan hukum itu menindaklanjuti apa yang sudah menjadi semuanya BPK, Pak Darori itu memang secara konkrit kita bekerja sama dengan 3. KLHK kemudian ATR.

Nah kami sampaikan kami dapat info mungkin barangkali lebih tahu daripada Pak Darori. Maksudnya Pak Darori lebih tahu daripada saya, jangan terbalik nanti. Adalah dari data sawit kita yang ada di kawasan sejumlah 3 juta itu, kami mendapatkan dari Dirjen Planologi itu KLHK juga mempercepat proses termasuk diantaranya pelepasan daripada kawasan itu supaya statusnya ini. Waktu itu saya sudah mendapatkan sekitar 600 ribu sudah diproses dari 3 juta. Saya yakin akan bertambah, artinya adalah bahwa pemerintah ada satu upaya untuk bisa menyelesaikan yang lebih pada kawasan.

Waktu dengan BPK Pak Darori kami laporkan, Bapak/Ibu sekalian. Kita memang belum diputuskan apakah itu nanti adalah pidana atau itu adalah nanti perdata yang berkaitan dengan denda. Jadi ya kalau ada pemikiran kalau itu diangkat ke pidana memang mungkin enggak cukup penjaranya kira-kira begitu, saking banyaknya yang harus dipenjara. Pandangan kami masih agak cenderung ke denda, tapi belum diputuskan. Ini yang kami menunggu daripada rekomendasi BPK *real* nya yang akan ditempuh seperti apa? itu yang catatan terakhir yang sempat kami *report* Pak Darori tapi kami menaruh perhatian penuh, kami catat benar apa yang disampaikan oleh Pak Darori dan itu fakta yang sudah Bapak lakukan pada saat apa di pemerintahan juga tentu akan menjadi *lesson learned* dan pengalaman yang harus bisa dijadikan pegangan atau dijadikan cermin untuk kita mencari solusi untuk penyelesaian masalah itu.

Kemudian yang kaitanya dengan data, tadi kami juga sejak awal kami sampaikan, ini dalam waktu dekat, dalam waktu dekat mungkin tidak sampai menyeberang tahun kami nanti segera *me-launch* mengenai satu data sawit. Jadi kami laporkan perbedaannya data yang di keluarkan oleh berbagai instalasi seperti di statistik kami kan 14,3 juta, ini soal luasnya, kemudian Badan Informasi Geospasial mengeluarkan luasan 17,9 juta, kemudian KPK bersama (suara tidak jelas) mengeluarkan data 15,8 juta. Perbedaan itu, nah sekali lagi yang berkaitan dengan perizinan juga kami cek. Memang idealnya ada di daerah kami di sistem, kami bisa *me-record* perizinan itu melalui sistem yang kami bangun SIPERIBUN (Sistem Perizinan Perkebunan). Kami punya sistemnya yang *link* dengan daerah.

Itu kalau kita hitung luasnya bisa sampai 20 juta Pak Darori, Bapak/Ibu sekalian. Artinya beda, beda itu karena beda metodologi untuk meng-*creat* data itu. Maka di satu data ini sudah satu metodologi menggunakan pendekatan tutupan, menggunakan citra, dan itu diinisiasi oleh wali datanya adalah BIG kemudian nanti di rekonsiliasikan dengan Kementerian Pertanian, dengan daerah sehingga munculah satu data. Dan sudah sudah selesai tinggal sekarang mau ditetapkan dan di-*lauch* mengenai data itu.

Kemudian yang berkaitan dengan BDPKKS kami mohonkan nanti kalau memang Komisi IV DPR RI memanggil secara khusus akan lebih baik lagi. Jadi data yang kami dapatkan itu memang data punggutannya. Tentu belum dikurangi *spending*-nya, jadi totalnya 47 tadi. Dan tentu secara ini, salah satu pemanfaatannya adalah untuk PSR itu Bapak/Ibu sekalian, untuk peremajaan sawit rakyat. Tadi data kami yang kami himpun dari BDPKKS dari total 107 ribu hektar yang rekomendasikan yang sudah kita buat, itu baru ditransfer dananya 1,7 triliun. Mestinya lebih dari itu. Itu yang sedang kita *matching*-kan. Ya kami sampaikan kepada mereka kalau ada rekomendasi kayak tadi, berarti harus ditransfer sejumlah itu. Dan itu tentu pada posisi yang harus dicek di lapangan, kita mendampingi, supaya yang sudah ditransfer itu segera menanam. Yang tadi kami sampaikan sebesar 25 juta itu.

Kemudian terima kasih. Masih ada respon, saran terhadap upaya kami yang simplifikasi tadi. Kami akan catat lagi. Dari 8 itu sebenarnya kami masih memiliki peluang untuk bisa memberikan kepada masyarakat, kepada rakyat untuk poin ke ke-5 kalau saya tidak salah tadi mengenai STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya). Itu di situ kami dinyatakan STDB dan /atau kesanggupan menyelesaikan STDB. Nah pada saat mengusulkan meskipun STDB-nya belum, itu kita tandatangani. Tapi dalam waktu tertentu sesuai yang sudah kita tetapkan harus selesaikan itu STDB.

Kemudian masukan yang berkaitan dengan hilirisasi. Hilirisasi kami juga laporkan tadi terakhir disampaikan oleh Pak Daniel Johan, tepat sekali Pak Daniel. Tadi kami menyampaikan lebih dari 80 produk turunan Bapak, yang belum secara optimal kita lakukan karena kita ya dengan CPO saja sudah bisa mengangkat ekonomi apalagi kalau dilakukan, wah luar biasa. Dan kami menyadari betul itu. Kami mendorong hilirisasi maka kami tepat sekali Bapak Ibu mengundang Pak Joko ke sini supaya beliau mendengar bahwa perlu ada hilirisasi yang harus digarap dan itu bermitra dengan petani. Itu yang ingin kami sampaikan.

Kemudian yang berkaitan dengan ada beberapa hal khusus, *case* seperti Pak Sulaeman tadi sampai kan di ini. Kami juga banyak laporan Pak dari daerah persis seperti yang Bapak laporkan. Tentu penyelesaiannya kami harus rapat 3 pihak itu Pak,

antara kami, KLHK, sama ini. Karena Kementerian Pertanian kewenangannya ada diproduksi, kemudian KLHK itu di kawasan, kemudian di ATR/BPN adalah hak atas tanah nya, HGU nya. Kemudian juga laporkan bahwa masih memang kami temukan. Makanya tadi kalau arahan Komisi IV bisa membuat satu regulasi yang lebih simpel, mungkin barangkali melalui *omnibus law* atau apa karena masih ada *conflicting* tanda petik soal aturan yang dimiliki oleh Kementan, KLHK maupun yang dimiliki oleh ATRBPN padahal itu mengatur izin. Sama-sama mengatur izin. Atas dasar HGU yang satunya atas dasar ini.

Undang-Undang 39, tadi juga banyak yang menyampaikan soal yang 20%. 20% yang kami laporkan Bapak/Ibu sekalian, para pimpinan itu kalau secara nasional total itu yang taat terhadap 20% hanya 29%. Tadi yang terakhir Pak Darori betul sekali itu. *Record* kami itu hanya 29% yang taat terhadap undang-undang yang 20% itu. Makanya ini tidak pantas, apa upaya pemerintah? kan begitu tadi. Nah ini bagian penting daripada kami untuk bisa membuat satu *punishment*. Tadi ada yang usul, cabut saja Pak gitu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kemen, meskipun itu isinya ada di daerah tapi NSPK-nya kan ada di kami, ada di presiden. Kalau Presiden bilang cabut saja ya cabut gitu. Saya kira tepat sekali usulannya untuk itu supaya tegas. Saya sependapat lagi dengan Komisi IV DPR RI.

Kemudian yang kaitanya dengan, sekali lagi yang berkaitan dengan Perpres ISPO. Kami sekali lagi sampaikan bahwa ada justifikasi yang kami lakukan walaupun memang ini tidak hadir sendiri dari Kementerian Pertanian dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Perpres itu mengamanahkan ada perubahan dari petani yang semula *volunteer* yang di Permentan kami, itu menjadi mandatory. Tadi Pak Gulat dari APKASINDO sudah sampaikan keberatan itu karena banyak keterbatasan. Maka ada salah satu pasal di situ yang memberikan batasan 5 tahun itu dipandang. Mohon maaf ini, dipandang sebagai bagian penting untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, kita harapkan bisa selesai.

Tentu negara hadir untuk membantu petani, enggak dilepas. Seperti halnya nanti sertifikasinya siapa yang membiayai? itu ada, di dalam pasal itu ditetapkan bahwa itu dibantu oleh negara. Nah kemudian saya setuju yang disampaikan APKASINDO banyak sekali kaitanya dengan status lahan yang sekarang dijalani oleh pekebun kita yang berada di kawasan itu.

Ini ada terjadi Bapak/Ibu sekalian. Dia sudah bertahun-tahun di situ. Di situ itu maksudnya di kawasan. Diberi izin, nah ini kan salah siapa? tidak perlu cari salahnya yang jelas ya salah pasti kalau sudah di kawasan. Itulah yang akan kita selesaikan baik melalui pelepasan kawasan, baik melalui tadi mengusulkan Pak Hasan, saya kira itu bisa juga dilakukan yang berkaitan dengan perhutanan sosial itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Pak Dirjen sebentar. Pimpinan saya ini ya?

Mumpung ini, saya mau tanya masalah ISPO, ISPO itu kan tangannya ada dua Pak. Yang pertama adalah selain kita memastikan nanti seluruh lahan pertanian sawit rakyat bisa lolos verifikasi ISPO, itu satu hal. Tetapi hal kedua yang penting adalah bagaimana ISPO juga diterima di dunia internasional? Satu syarat yang penting yang kita harus lakukan adalah harus ada pihak ketiga yang dianggap independen. Sejauh mana kami sebelum Pak Dirjen yang sekarang ini dulu sejauh mana kan? sebelum

Pak Dirjen yang sekarang ini, dulu Dirjen Perkebunan agak kekeh untuk melepas itu sehingga akhirnya ISPO kita tetap saja kerdil hanya domestik.

Jadi kalau benar-benar kita serius ayo kita sambungan energi meskipun pemerintah tetap dalam kendali. Tinggal bagaimana kita mendorong pihak ketiga itu ya kita buka menjadi independen dan kita yakinkan dunia bisa menerima.

Terima kasih.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Daniel.

Betul sekali. Yang belum dilakukan oleh kita adalah SNI untuk ISPO itu harus, nomor satu itu. Nah soal pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga sertifikasi, *it's a must* Pak. Harus. Dan kita harus itu, saya sependapat dan kita menuju ke situ. *ndak* bisa, kalau enggak, enggak diakui Pak. Jadi kalau digantikan dengan RSPO atau ICS enggak laku. Nah kemarin kami laporkan, minggu kemarin ya? kita rapat sebenarnya biasanya antara RSPO kita enggak mau ketemu. Saya temukan Pak, supaya kita bisa belajar apa yang dilakukan RSPO kok bisa laku? Kita sebenarnya enggak jauh-jauh amat Pak hanya beberapa indikator yang harus kita masukkan di situ.

Tadi kami sampaikan SDGs yang kita pakai, mereka pakai SDGs nah itu. Nah kalau itu adanya mereka enggak akan klaim lagi, itu artinya keberterimaan. Jadi upaya kita berterimaan. Ini dengan Jepang Pak kami laporkan sudah mulai paling tidak hatinya terbuka untuk bisa menerima ISPO tapi mereka masih masukkan ke kita. Tadi kami laporkan untuk yang SDGs itu yang masuk di ISPO saat ini dari 17 indikator parameter baru 12. Dikasih masukan oleh mereka, mereka punya teknologi Algae Pak, Algae itu. Di situ tadi ada *Life below water* nanti limbahnya itu akan dijadikan sebagai media diolah, muncul algae. Itu untuk energi. Itu artinya masuk SDGs yang itu.

Nah kalau itu adanya, saya yakin betul sekali Pak Daniel sampaikan tadi enggak bisa kalau kita sendiri. Itu nanti jago kandang saja, enggak bisa diterima. Ya domestik saja yang berikan top. Produksi kita melimpah. Pak Joko masih memprediksi masih sampai 60 juta ton, mau diapain kalau enggak ini? yang paling berpeluang memang biodiesel Pak. Itu kalau kita manfaatkan luar biasa. itu kira-kira, betul sekali Pak Daniel. Terima kasih.

Kemudian sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan adalah tidak sebatas pada aspek-aspek yang bersifat teknis. Betul sekali tadi yang justru yang diperlukan oleh masyarakat petani penyelesaian-penyelesaian *real* yang berkaitan dengan legalitas, izin yang sampai sekarang dihadapi oleh mereka itu. Ini barusan Pak ini juga tadi mengeluh perbedaan nama Gunadi sama Gunardi saha kepala desa nya enggak mau tanda tangan, kalau itu enggak tandatangan enggak bisa usul PSR dan sebagainya.

Baik, ada yang menarik yang berkaitan dengan tadi pemanfaatan daripada lahan tidur itu. Kami Sebenarnya masih fokus kepada peningkatan produktivitas yang ditargetkan pada *replanting* sehingga kita enggak membuka lahan baru, tidak

membuka permasalahan baru. Tadi kami laporkan ada 2,4 juta lahan rakyat, lahan masyarakat, rakyat kebun sawit kita yang potensi untuk di *replanting*.

Nah ada masalah unik lagi nih Pak Darori dan Bapak/Ibu sekalian, teman-teman petani ini dan juga surat kami terima dari daerah. Apa itu? kriteria PSR Peremajaan Sawit Rakyat itu salah satunya adalah umur tanaman. Kalau sudah 25 tahun bisa di usulkan *replanting*. Tapi banyak sekali yang mengusulkan, eh jangan dulu Pak sampai umur 30 tahun. Kalau itu enggak paksa, kita enggak bisa paksa. Tetapi sesungguhnya tidak hanya umur tanaman memang, betul sekali usul petani. Artinya kalau itu kurang dari 25 tahun katakanlah 15, boleh Pak. 25 tahun tapi kita sudah menetapkan bahwa produktivitas enggak akan naik, itu capek itu peremajaan. Kalau tidak ya petani hanya dapat sebegitu, begitu.

Kenapa kok terjadi begitu? tentu itu dulu berkaitan dengan soal benihnya pada saat ditanam dan seterusnya. Maka di PSR ini Pak meskipun belum dieksekusi teknisnya Bu Endang, itu kami meng-*hire* pihak ketiga yang paham di nomor riset untuk mendeteksi benih palsu. Jadi kalau kami deteksi itu dengan DNA. Sudah nanti pembiayaan lagi-lagi kami minta kan kepada BPDPKS supaya dimanfaatkan untuk riset, untuk ini lebih bagus, untuk rakyat banyak lagi gitu.

Itu kami minta pada mereka. Bagaimana anda mendeteksi itu? Oh ya nanti Pak Dirjen saya deteksi, saya mengambil sampel dari *standing crop* yang ada di lapangan, saya enggak mau. Selama yang diambil itu adalah tidak berproduksi ya selamanya enggak produksi. Nah kemudian diusulkan di *nursery*. Aku 50:50. Masih 50:50 karena kalau itu sudah diproduksi jadi benih, kalau terdeteksi tetap tidak. Jadi kalau di sawit itu ada 3 Pak, Bapak/Ibu sekalian. Dari konteks produktivitasnya itu. Ada yang disebut Pisifera itu enggak akan menghasilkan, yang Dura itu kira-kira 60%, yang Tenera yang produktivitasnya tinggi. Saya minta supaya supaya dideteksi semuanya tenera. Itu kan akan menjamin. Jangan sampai ditanam oleh rakyat menunggu 3 tahun, 4 tahun kemudian tidak berbuah. Itu kira-kira fungsi dari pada deteksi benih tadi.

Itu yang berkaitan dengan ini. 1 hal penting masukan dan arahan dari Pak Pimpinan dan anggota adalah soal kemitraan. Ini penting sekali karena di kemitraan itu bisa diformulasikan kesepakatan harga yang menguntungkan daripada kedua belah pihak. Itu yang menjadi penting meskipun sebenarnya kalau Komisi IV DPR RI tadi mendorong untuk bisa regulasi, ya kita regulasi Pemerintah menetapkan harga seperti di pangan misalnya. Itu bisa saja dilakukan tapi dengan kemitraan, menurut pendapat kami bisa ditempuh itu harga.

Sebenarnya kami sudah punya Permentan untuk menghitung TBS Tandan Buah Segar itu. Tapi memang tidak diikuti, itu masalahnya. Itu tentu banyak tadi usulan dari Bapak/Ibu sekalian yang menyatakan kalau sudah ini *punishment*-nya seperti apa? Ya kami harus lakukan gitu, sudah dihitung Pak gitu. Kalau harga di Rotterdam, sebenarnya yang kita acu tidak hanya Malaysia dengan yang ketat atau tidaknya Malaysia ada di Rotterdam sama dia. Ada di Rotterdam, sama dan kebanyakan yang Rotterdam, itu untuk menghitung TBS nya jatuh berapa itu. Seperti saat ini misalnya sudah USD 710 per ton itu kalau dihitung ya bisa sampai 1.700 TBS-nya seharusnya. Tapi kalau dikabarin ada yang sampai di bawah 1.000 itu yang *ndak*

manut aturan itu Bapak/Ibu sekalian karena ada Permentannya. Kalau enggak diatur ya, oke kita salah. Diatur, dilanggar, lha itu yang harus ada sanksi.

Pak Krisantus terima kasih sekali. Beliau memahami ya itu tadi faktanya sampai (suara tidak jelas) ya dianggap sebagai lahan. Kalau depan rumahnya kita bisa jadi itu, kan soal yang status tadi. Itu yang kita tertibkan, kami tentu bekerjasama dengan KLHK dan juga ATR/BPN. Dan semuanya bertiga sudah komit untuk bisa melakukan itu cuma tinggal ke kecepatannya sekarang. Kami melihat teman-teman di Ditjen Planologi Pak Darori dari lebih tahu saya kira juga pontang-panting untuk untuk melakukan itu. Ada upaya hutan perhutanan sosial juga bagian dari solusi. Mungkin saja juga melalui reforma agraria pun juga bisa dilakukan menurut pendapat saya. Itu secara umum yang teknis-teknis kami catat semua dan itu tentu saja kami tindaklanjuti.

Kami laporkan kita punya tadi yang kami sampaikan, kita menyusun *road map* sampai 2045. Mohon izin, masih draf. Ini kan saya tadi janji seminggu sampai dua minggu kami cetak yang *final version*-nya. Kami akan sampaikan ke Komisi IV DPR RI. Ini supaya mengatur sama nanti, di sini mulai dari hulu sampai hilir semua semua ada dokumennya. Itu saya kira perkembangannya.

kemudian juga yang berkaitan dengan B100 Bapak/Ibu sekalian. Kita sudah punya bukunya minimal untuk pedoman, ini disusun oleh Badan Litbang Pertanian kita karena memang risetnya ada di sana. Jadi B100 itu melalui riset cuma masalahnya kita menghadapi mesin yang belum di desain dengan Android atau B100, itu saja. Kalau ini nanti menjadi penting, saya yakin menjadi penting, dan itu harus komunikasikan produksi mobil harus disesuaikan dengan in. Bukan kita menyesuaikan mesinnya tapi mesinnya menyesuaikan CPOnya, mungkin itu. Itu yang saya kira ini, untuk lebih teknis lagi mungkin di secara tertulis nanti akan kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik Pak Dirjen dan teman-teman.

saya kira tanggapannya sangat baik dari Pak Dirjen. Artinya tadi ada beberapa masukan yang beliau catat dan beliau terima. Dan Pak Dirjen juga tadi bilang bahwa mungkin dalam sisi pengawasan masih kekurangan. Ini enak nih kita ketemu Dirjen seperti ini enak nih, apa adanya. Jadi kalau ada yang kurang kita bisa sama-sama perbaiki. Intinya, esensinya Pak Dirjen dan teman-teman dari asosiasi kami di sini kami tidak mencari kesalahan orang lain. Kita semua punya kelebihan, kita punya kekurangan. Yang kami mau tahu itu kita mau cari sama-sama itu solusi. Ya karena ini industri strategis. Oleh sebab itu kita bersama-sama apa yang masih harus kita perbaiki, apa yang masih menjadi catatan, kekurangan, itu ya kita sama-sama untuk carikan jalan keluarnya.

Pak Dirjen dan para asosiasi, para anggota, para pimpinan yang saya hormati. Demikian tanggapan yang sudah dijawab. Berikutnya kita akan menyimpulkan rapat pada hari ini. Silakan di ditampilkan.

Kesimpulan keputusan

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian, perusahaan kelapa sawit dan asosiasi petani kelapa sawit untuk melakukan penguatan koordinasi dalam menyelesaikan persoalan, tata kelola, serta potensi pasar sawit dunia.

Normatif saja, anggota ada tambahan? bisa disetujui anggota? Pak Dirjen setuju? asosiasi bisa diterima? Setuju Pak? bisa disebut? Sebentar satu persatu tadi masukan Bu?

F-GERINDRA (DR. Ir. Hj. ENDANG SETYAWAI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Jadi saya pikir tidak hanya potensi pasar sawit dunia tapi dalam negeri juga. Tadi kan sudah dikemukakan kebutuhan dalam negeri juga cukup banyak.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tapi perlu ditambahkan hilirisasi kayaknya ya. Oh sudah ada? *Sorry*, maaf. Jadi “serta potensi pasar domestik maupun sawit dunia” mungkin seperti itu saja.

F-PG (ALIEN MUS):

Pimpinan. Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Mba.

F-PG (ALIEN MUS):

itu kalau pasar dunia itu berarti sudah mencakup nasional dan internasional Pimpinan. Domestik dan internasional.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya boleh. Coba diperbaiki “potensi pasar sawit domestik dan internasional”, “dan” bukan “maupun”. Oke? anggota bisa disetujui? ada masukan lagi tadi dari asosiasi? bisa disetujui?

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

2. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi data komoditas perkebunan secara akurat dan transparan dari hulu hingga hilir industri perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit.

Anggota ada masukan?

PIMPINAN RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ketua saya kira yang krusial tadi kan soal sawit di Kawasan. Saya kira kita mendorong pemerintah untuk menyelesaikan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan, gitu Pak ya? Setuju? Ya *monggo*.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Coba ditambahkan permasalahan lahan Pak.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Pakai nomor tersendiri Pimpinan sidang. Masalah sawit di dalam kawasan hutan karena itu yang paling dominan gitu.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar-sebentar. Coba ke bawah dulu. Oh bukan itu beda, beda beda. Oke, bisa kita tambahkan satu lagi khusus untuk permasalahan lahan. Coba di, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah..

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Persoalan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan dengan kawasan hutan. Perkebunan dengan kawasan hutan.

PIMPINAN RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Bukan tumpang tindih, yang *nindihin* siapa?

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Coba poin nomor 2 belum saya ketuk kan itu.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Usul Pak nomor 2 itu mungkin gini Pak usul saya.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Jadi sebenarnya kalau di sini kan disebutkan kan harmonisasi sinkronisasi itu benar. Tetapi mungkin bukan hanya data ya tapi yang penting adalah regulasi. Karena tadi sebutkan beberapa regulasi itu kan tidak sinkron antara Kementerian satu dengan Kementerian pusat dengan daerah. Jadi tidak hanya data tetapi sinkronisasi regulasi. Regulasi.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sinkronisasi dan data dan regulasi?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Harmonisasi dan sinkronisasi, regulasi. Data dan regulasi.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar-sebentar, satu persatu. Anggota dulu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWAI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Jadi regulasi dulu Pak, baru data. Sinkronisasi regulasi dan data. Nah

F-PG (ALIEN MUS):

Pimpinan.

Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan harmonisasi, sinkronisasi, regulasi dan data komoditas perkebunan. Karena “dan”, “dan”. “dan” nya dihilangkan saja itu ya.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Kok “sinkronisasi, regulasi”? itu jadi beda jadinya. Boleh enggak gini, sebentar-sebentar. Boleh enggak kita pakai kata sinkronisasi saja? “melakukan sinkronisasi, regulasi, dan data”. Sudah enggak usah “harmonisasi” nya dihapus saja. Coba. Sinkronisasi enggak usah pakai koma. “Melakukan sinkronisasi regulasi dan data”. Bagaimana?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya, silakan

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Mohon izin, jika diperkenankan apakah tidak sebaiknya kita langsung fokus ke sawit saja? jangan dibuka komoditas perkebunan, nanti luas. Karena kan case-nya beda. Yang kita bahas hari ini kan sawit supaya fokus ke sana.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik setuju Pak Dirjen. Kita memang hari ini RDP nya mengenai usaha kelapa sawit, sebaiknya kita khusus perkebunan kelapa sawit ya.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Mau tanya Pimpinan. memperjelas saja. Yang dimaksudkan hulu hilir ini konteksnya apakah juga termasuk mendorong hilirisasi itu ya?

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya ulang.

Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi regulasi dan data komoditas perkebunan kelapa sawit secara akurat dan transparan dari hulu hingga hilir.

bagaimana anggota? Setuju? Pak Dirjen? Asosiasi setuju?

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

3. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Anggota? Pak Dirjen? Asosiasi?

(RAPAT: DISETUJUI)

4. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menindak tegas perusahaan yang terlibat dalam kegiatan karhutla dan yang tidak melakukan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 per 100 dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh

perusahaan perkebunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar, saya minta masukan anggota dulu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWAI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Tadi kan tidak ada kalimat perkebunan, diganti. Jadi *ndak* fokus ke sawit saja, ini kan perkebunan. Oh iya Undang-Undang nya di perkebunan ya.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Joko silakan.

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Saya coba balik ke belakang. Jadi sebenarnya persoalan plasma 20% ini, ini tadi Pak Dirjen sudah menyinggung. Ada potensi konflik regulasi juga. Jadi bahwa memang mungkin ada 1-2 yang melanggar kalau melanggar ya ditindak saja. Tapi menurut saya bahwa dalam dalam konteks nasional ya Pak Dirjen ya, sebenarnya peraturannya itu sudah jelas. Peraturan yang diacu selama ini adalah Permentan 98 jo Permentan 26 dimana disitu jelas-jelas dikatakan bahwa kewajiban plasma itu adalah untuk perkebunan yang dibangun tahun 2007 dan seterusnya itu. Jadi kebun-kebun atau perusahaan perkebunan sebelum 2007 itu tidak atau belum diwajibkan. Itu mesti dicatat.

Oleh karena itu di dalam Permentan 98 kemudian ditawarkan ditawarkan bahwa pembangunan kebun baru plasma boleh asalkan ada lahan. Jika tidak ada lahan opsinya adalah kemitraan. Ini menurut saya sih harus menjadi catatan. Kemudian yang kedua adalah soal 20% dari apa? Ini tadi Pak Dirjen sudah singgung karena kalau menurut Permentan itu dari luas yang areal yang ditanam. Tapi ada peraturan lain yang dari HGU. Nah regulasi yang juga sebenarnya sedang kami protes ini Pak pimpinan adalah urusan plasma 2% ini juga ada Permen ATR Nomor 17. Di situ yang mengatakan bahwa kewajiban membangun plasma 20% dari HGU dan ini enggak pakai *cut off time*.

Terus terang saya sudah sampaikan ke Pak Menteri ATR Pak Sofyan Djalil dan Pak Sofyan Djalil menyadari bahwa ini perlu diperbaiki. Jadi kalau saya boleh menyarankan mestinya bahasanya adalah sama. Kira-kira harus mencari penyelesaian, menyelesaikan masalah plasma 20% dan bahkan saya sudah usul kepada Dirjen supaya kemitraan dengan petani swadaya itu menjadi salah satu pilihan.

Tadi Pak Hasan sampaikan supaya karena gini, saat ini kita tidak ada pembangunan kebun baru sehingga tidak ada pembangunan plasma baru. Oleh karena itu sebenarnya solusi yang kita banyak diskusikan adalah bagaimana kita membangun kemitraan dengan petani swadaya yang dengan segala kelemahan tadi misalnya bibitnya jelek, infrastrukturnya jelek segala macam nah itu kalau bisa dimitirakan dengan perusahaan akan menjadi salah satu solusi untuk perbaikan. Termasuk nanti di dalam kalau dalam kaitan dengan Permentan Nomor 1 begitu ada kemitraan maka ada perlakuan yang lebih baik dalam hal harga.

Jadi mestinya bahasanya adalah, pertama adalah menyelesaikan urusan masalah plasma 20% dan mengarahkan kepada adanya kemitraan yang segera diimplementasikan bahkan kalau perlu diregulasikan kemitraan itu. Kalau menurut saya begitu.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya Pak Joko, terima kasih masukannya.

Ini saya rasa dalam RDP hari ini dengan agenda membahas prospek pengembangan usaha kelapa sawit mungkin ini pasal-pasal atau kesimpulan seperti ini kita catat, kita tahan dulu sampai nanti menjadi kesimpulan di dalam Panja ya atau RDP selanjutnya selanjutnya. Jadi mungkin kita hapus saja untuk kesimpulan pada malam hari ini. Bagaimana teman-teman anggota setuju? Pak Dirjen kita lanjutkan ya? berarti berikutnya 4 ya?

4. Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi terkait dengan minimnya realisasi penyaluran pendanaan program *replanting* kelapa sawit perkebunan rakyat.

Anggota? Pak Dirjen? ini kayaknya bahasanya belum pas ini. Silakan Pak Dirjen.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Substansinya setuju tapi barangkali narasinya ada *adjustment* supaya standar mungkin kata-katanya, nama programnya. *Replanting* nya diganti dengan sawit rakyat Pak. "Peremajaan sawit rakyat" supaya nanti tegas.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Peremajaan Sawit Rakyat, PSR.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

"Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)."

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Izin tambah.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak Joko.

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Mungkin bagaimana kalau misalnya gini, minimnya realisasi. Tadi kan Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan laporan, memang ada tren meningkat. Jadi apakah tidak misalnya lebih baik menggunakan kata mencari solusi percepatan, percepatan pelaksanaan *replanting*.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya saya kira ide baik bahwa memang ada peningkatan dari tahun-tahun. "Percepatan Pak". Jadi "mencari solusi terkait percepatan" jadi "dengan minimnya" dicoret diganti "percepatan". Saya ulang.

Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi terkait percepatan realisasi penyaluran pendanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR)

Teman-teman Komisi IV? Pak Dirjen? Asosiasi?

Silakan Pak.

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA:

Yang untuk poin 4.

Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mencari solusi terkait percepatan realisasi penyaluran pendanaan program PSR, dana sarpras, dan peningkatan SDM petani.

Tiga. Sarpras dan SDM itu 0% Pak. Teman-teman dari Papua minta dana untuk melatih petani ditolak BPDP Kalsel, Kalteng, Kalbar, tolak. Katanya petani enggak punya hak di situ, itu penting Pak. Riset? dana sarana prasarana.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Kita di poin ke-6 nanti ada. Di poin ke-6 nanti kita menindaklanjuti peningkatan SDM melalui penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi coba kita untuk nomor 4 oke ya?

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

5. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi *Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO)* kepada seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia dalam rangka mengatasi *image* negatif tentang kelapa sawit.

Silakan teman-teman anggota.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Izin.

Saya belum komentar yang ini. Tetapi perlu juga dimasukkan terkait dengan soal komunikasi public ya dan *public campaign* karena memang ada juga ini propaganda internasional yang memang untuk melemahkan sawit kita gitu. Jadi ini harus menjadi kesadaran bersama dan itu harus ada programnya nih pemerintah termasuk juga pihak yang terkait, itu gimana dibunyikan

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mungkin Bu Luluk ada saran bunyinya gimana?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Izin.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Jadi kalau tadi melanjutkan Bu Luluk jadi mungkin bahasanya adalah mempromosikan. Mempromosikan ISPO kepada bukan hanya ke perusahaan, kalau perusahaan sih sebenarnya justru kepada seluruh *stakeholder* misalnya gitu ya. Dalam rangka untuk mengatasi *image* negatif itu. Lebih kepada mempromosikan kepada *stakeholder*.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“Mendorong pemerintah untuk mempromosikan” jadi “meningkatkan sosialisasinya” coba dicoret. “Mempromosikan” oke, “meningkatkan sosialisasi” dicoret. “kepada seluruh *stakeholder*”, “perusahaan” dicoret “dalam rangka mengatasi *image* negatif tentang kelapa sawit”

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Publik itu ada di situ ya? *Stakeholder* memang ada di sana tapi kalau misalnya kelapa sawit itu akan mengunci, yang di luar kelapa sawit tidak terkait atau seperti apa

Pak? misalnya gini kan pasti ini ada juga nih unsur ada NGO, ternyata juga ada yang memang jadi bagian dari *black campaign* juga. Terus kemudian juga organisasi-organisasi masyarakat. Tentunya sih sebanyak mungkin memang ada ada partisipasi publik yang memang untuk dilibatkan pada *public engagement, enforcement, kayak gitu lah*.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Stakeholder itu kan sebenarnya kan luas ya termasuk pemerintah, masyarakat, NGO.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Maksudnya Mbak Luluk itu apa kita membatasi di kelapa sawitnya saja gitu ya?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Kelapa sawit berarti itu memang kuncinya di situ ataukah *stakeholder*, tapi enggak pakai kelapa sawit lagi gitu loh otomatis. Karena kan nanti ini berarti membuka ruang yang lebih luas untuk orang punya *awareness* yang pertama, yang kedua juga ada unsur *responsibility* bahwa tadi, sawit itu kan ini *strategic* kita gitu lho.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bu Luluk karena ini memang RDP-nya kelapa sawit, lebih luas daripada hanya *stakeholder* kelapa sawit kan, maksudnya begitu. Dan seluruh *stakeholder* saja.

Komisi IV mendorong pemerintah untuk mempromosikan *Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO)* kepada seluruh *stakeholder* dalam rangka mengatasi *image* negatif tentang kelapa sawit.

Bagaimana teman-teman Komisi IV setuju?

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT PIR:

Izin Pak.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan.

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT PIR:

Terkait istilahnya saja itu, ASPEKPIR itu Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Belum Pak, sabar Pak kita masih di poin 5 Pak. Tidak masalah Pak.

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Izin Pimpinan.

Pada nomor 5 ini kita sangat menghargai upaya pemerintah untuk ISPO. Tapi perlu kita sadari tadi sudah dipaparkan, ISPO itu sudah berjalan 8 tahun dan wajib bagi perusahaan. Nah realisasinya kan bisa kita lihat dari data baru 30an persen. Jadi bagaimana kita mempromosikan kalau ternyata benang merahnya belum ketemu nih kenapa dia lambat untuk yang wajib? kan seperti itu Pak. Jadi ada dilema juga kita mempromosikan, tapi di rumah tangga kita juga belum selesai. Kira-kira seperti itu Pak.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, terima kasih.

Makanya memang dari bahasa awalnya itu kan sosialisasi dulu sebenarnya kepada perusahaan dan non perusahaan. Sebenarnya ini banyak juga ke kelompok-kelompok lain juga Pak.

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Oleh sebab itu makanya itu dulu yang dicari, apalagi petani kan gitu. Petani saja 0,1% kan gitu.

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Izin Pak

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya Pak, silakan Pak Joko.

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Jadi kalau saya boleh saran sebenarnya kan tadi sudah didiskusikan bahwa banyak masalah sehingga ISPO ini tidak atau belum lancar. Tadi saya menemukan bahwa dugaan saya termasuk yang cukup besar pengaruhnya adalah karena regulasinya sendiri. Misalnya tadi kalau perusahaan karena misalnya karena kawasan hutan makanya enggak bisa ISPO karena HGU-nya tumpang tindih enggak bisa ISPO. Kalau petani karena STDB nya enggak ada, enggak bisa ISPO, sertifikatnya enggak ada, enggak bisa ISPO. Nah itu semua kan kenapa enggak bisa sertifikat karena tadi, karena urusan regulasi yang masih konflik sehingga mungkin itu bisa di

cover 3 tadi. Yang harmonisasi sinkronisasi tadi bisa di-cover di situ mungkin. Kalau itu bisa selesai mungkin saya bisa membantu.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Coba nomor 2.

Pak Sekjen ini terkait regulasi data harusnya kita bahas di poin ke-2. Apakah itu bisa mencukupi atau sudah lengkap akomodir keinginan Bapak atau gimana?

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Iya, sebenarnya kaitannya dengan akan terbitnya petani wajib ISPO, nah di situ lah. Jadi kalau kita sudah mengakui poin 1,2,3,4 berarti petani tidak siap untuk ISPO. Jadi perlu untuk dipersiapkan terlebih dahulu.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirjen silakan.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Saya menghargai apa yang menjadi pemikiran APKASINDO tetapi kita pun juga harus bergerak untuk keberterimaan ISPO. Nah kalau kita besar masih pada posisi ini, makanya saya sekarang lagi di dalam Perpres itu ada di buka peluang *time frame*-nya 5 tahun untuk bisa mempersiapkan. Itu yang nanti akan mendorong ini. Semua akan pemerintah akan hadir untuk bisa, pasti tidak akan tidak meninggalkan petani atau pekebun. Itu satu.

Kemudian yang kedua. Saya kira poin 2 dan 3, Pak Rino saya kira bisa menjawab apa yang menjadi poin 5 itu. Cuma dalam narasi Pak Pimpinan mohon izin, "*system*" nya dikebelakangkan jadi "*Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) System*" baru gitu, untuk konsisten saja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Dirjen penjelasan. Pak Sekjen mau menyampaikan lagi?

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Itu kan memang vonis itu pasar yang memvonis sama seperti RED II. Pada hari ini PKS sudah menekan kami dengan mengatakan tidak laku di Eropa. Tapi begitu kami konfirmasi ke Uni Eropa, kedutaan “Oh kami baru 2 tahun lagi kok berlakunya”. Jadi kalau seandainya sudah terucap itu wajib maka jatuhlah hukum. Dan bagaimana pemerintah bisa hadir? mengawasi harga TBS saja tidak bisa, mengawasi kemitraan juga tidak bisa. Ada ribuan pabrik yang ada di Indonesia dan keterbatasan oleh seorang Dirjen perkebunan dengan mengurus ratusan komoditas saya kira tidak mungkin bisa. Jadi kita harus pahit-pahit di depan sebaiknya memang diselesaikan dahulu permasalahan yang sangat mendasar dan konsep tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Tapi Pak Sekjen ini setuju kan dengan apa yang kita ingin capai dari poin kelima ini?

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Jadi yang ingin Pak Sekjen tambahkan itu kan sebenarnya pendekatan atau sosialisasi terhadap petani nya dulu, itu?

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami sedang meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden untuk menunda penandatanganan Peraturan Presiden tentang ISPO. Yang ditunda itu adalah mengkoreksi petani wajib. Kalau yang lainnya kami setuju karena saya pun juga auditor bersertifikasi ISPO Pak. Jadi kami tahu persis di lapangan dan apa yang terjadi di lapangan. Demikian Pak.

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA:

Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan.

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA:

Jadi masalah ISPO ini sebenarnya sangat menakutkan Pimpinan sidang ya, mungkin bagi Pak Dirjen mungkin tahun depan enggak Dirjen lagi. Yang menderita kami, taruhlah dikatakan oleh pihak katakanlah Ibu Muzdalifah yang sangat heroik menyuruh ISPO kan petani, saya enggak mengerti apa tujuannya itu? apakah mau membunuh kami atau tidak? itu omong kosong deh. Sekarang petani ini babak belur dengan harga. Harga 1.800 di pabrik kami cuman 600-900 dengan alasan apa? *tracking* dalam kawasan hutan. Syarat ISPO itu Pak yang pertama, (suara tidak jelas), disekolahkan negara begitu Pak? saya tahu kemana pergi bola ini, saya mengerti banget makanya melawan. Saya tidak ada kepentingan. Itu adalah untuk menyelesaikan petani dalam artian petani akan ribut maka negara akan kacau. Kenapa saya bilang begitu Pak? ini jelas kok ke mana bolanya kok, siapa yang membiayai itu? dana asing digunakan untuk membahas Perpres ISPO, ada apa dengan negara ini? kenapa harus orang asing, NGO yang mengurus rancangan Perpres ISPO.

Tidak bisa Pak, kami harus mengatakan kami hadir di sini mewakili teman-teman dari 22 provinsi, 117 Kabupaten bahwa kami tidak siap ISPO. Kalau dipaksakan kami melawan. Siapkan dulu persoalan kami, jangan diberi janji 5 tahun. Nanti ganti Pak Dirjen. Kata Dirjen baru "*ndak* tahu kami itu". Kalian harus, sekarang saja kami sudah ditanya kebun saya Pak dalam kawasan hutan Pak. Dosen-dosen dari kampus segala tidak bisa dijual ke pabrik Pak. Dikelola dulu ke pedagang pengumpul baru masuk pabrik, itu belum ISPO, baru dengan yang lain. Apalagi ISPO? habis selesai.

Kalau dikatakan 5 tahun lagi kami tidak siap karena itu adalah janji-janji, janji-janji akhirnya habis 5 tahun, kami akan dilibas dari kebun kami sendiri. Kami sangat tegas dalam hal ini, kami mewakili semua petani baik Samade (Sawit Masa Depan) ada di belakang, baik ASPEKPIR maupun APKASINDO. Tiga organisasi petani sawit Indonesia menolak petani diwajibkan di ISPO.

Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak kita di sini itu tidak ada bahasa mewajibkan petani untuk ISPO. Semangat di sini ya adalah untuk mendorong agar ISPO ini lebih pertama, lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, untuk masyarakat internasional juga. Dan bisa menjadi *bargaining power* kita untuk pemasaran produk sawit di luar negeri juga Pak. Jadi di sini ya menurut saya itu tidak ada kata-kata mewajibkan petani itu enggak ada. Ini mempromosikan ISPO ini dalam rangka kita mau mempunyai daya dorong juga agar produk sawit kita ini mempunyai standarisasi yang juga bisa diakui negara lain juga Pak, gitu lho. Saya rasa poin 5 ini spiritnya membunuh petani. Kita mempromosikan. Ya kita pertama ini tidak ada kita mau mewajibkan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Maksud saya penting juga, sisi lain ya bahwa ada *problem* di tingkatan petani yang mungkin agak luput karena ada banyak sekali situasi dimana kita saat ini Pak, memang itu banyak sekali menerima

kalau enggak dibilang pesanan atau bahkan *pressure* dari internasional untuk mengikuti apa yang menurut mereka itu adalah standar global itu. Yang mana itu kan memang belum tentu cocok dalam konteks suasana kebatinan kita saat ini. Dan kita ingin ketemu di titik tengah yang itu tidak mengurangi rasa keadilan untuk semua dan tentu buat kita ya petaninya ya untuk semuanya begitu. Nah itu titik tengahnya mungkin bisa dibantu di situ, ketemuanya dimana.

Jadi kepentingan petani itu bisa ditempuh dengan jalan apa, tetapi disisi lain bahwa perusahaan-perusahaan ini juga memang juga didorong untuk ke sana gitu gitu lho. Jadi yang ini disiapkan, difasilitasi, diberdayakan kan gitu kan? sampai kemudian punya kemampuan gitu. Artinya ada tekanan atau tidak ya memang kita ingin kan? bahwa petani kita memang punya standar. Menurut kita juga itu memang *sustainable* juga diikuti.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirjen, silakan.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMANTAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Iya saya pada posisi kembalikan ke poin 3 dan 4 ya. Jadi kita akan menyelesaikan. Pemerintah mendorong untuk menyelesaikan persoalan kebun kelapa sawit dalam Kawasan. Itu kan satu poin penting tadi sudah kita sepakati. Kalau menurut saya saya, bukan berarti *conflicting* terhadap ini. Kalau memang itu diusulkan tadi, dinarasikan saja kalau memang diusulkan. Tapi menurut saya konstan berawal dari 2 dan 3. Berawal dari itu, artinya sudah mengakomodir petani.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Permasalahan petani?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Iya permasalahan di dalam hutan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya Pak, coba nomor 2 dan nomor 3 itu permasalahan sinkronisasi regulasi dan data. Dan yang ketiga menyelesaikan persoalan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Kan ini banyak dialami petani dan akibatnya tidak bisa mendapatkan sertifikasi ISPO, itu kan Pak?

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Yang mulia Pimpinan sidang.

Bagusnya ditambah 1 poin. Saya pikir enggak susah banget bahwa membawa mempersiapkan petani sawit untuk ISPO adalah dalam bentuk prakondisi. Pra kondisi

di sini adalah memisahkan dimana petani mengeluarkan kayu dalam kawasan hutan. Artinya memprakondisikan petani menuju ISPO. Jadi di dalam Perpres tersebut tidak masuk petani wajib gitu lho. Jadi prakondisi dulu Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Pak, tadi kita enggak ngomong Perpres ya?

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Maaf Pak Daniel. Jadi sebenarnya kan kalau disebut ISPO, orang sudah berpikir Perpres. Dalam rencana Perpres tersebut ada pasal yang kami enggak bisa kami penuhi, kami wajib Pak tanpa kecuali. Maksud kami di situ sebelum Perpres itu di sahkan kami di prakondisi dulu. Prakondisi untuk..

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Coba, coba saya ini ya, jadi sebenarnya nomor 5 ini konteksnya adalah mempromosikan ISPO *sustainability*-nya Indonesia. Itu sih mutlak itu. Sebenarnya ada enggak ada Perpres ini tetap ada. Yang disampaikan teman-teman ini kan konteksnya kan Perpres. Kita kan di sini kan enggak bicara Perpresnya. Jadi yang sekarang pun ya harus kita promosikan. Sekarang kan Permentan namanya. Bahwa ada *concern* mengenai Perpres memang harus di luar itu. Karena kami jadi misalnya kan apakah kita perlu membuat satu tambahan poin misalnya mengusulkan, meninjau ulang atau *mereview* kembali, paling begitu. Berkaitan dengan masalah petani dalam Perpres yang baru tapi ya agak aneh sedikit saja sih.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya, baik Pak begini. Maaf Pak Ketua umum tadi bagi kita karena Perpres itu kan belum keluar Pak ya, kita ya itu juga bukan wewenang kita sebenarnya. Ya boleh enggak kita ini mencoba kita menjalankan dulu. Kalau nanti keluar dan menimbulkan masalah di lapangan kita audiensi, kita RDP lagi biar kita bisa memperjuangkan teman-teman dari asosiasi kelapa sawit. Sekali lagi kita di sini ini, lihat ya ini coba kalau kita melihat bahasanya, pertama tidak mewajibkan. Kita tidak ada, arahan ke situ pun tidak ada. Yang ada kita mempromosikan ISPO ini untuk mengatasi *image-image* negatif tentang kelapa sawit. Cukup ya

Jadi boleh kita setuju dan kalau nanti ada permasalahan yang mendasar lagi dalam keberlangsungan kesejahteraan khusus petani kelapa sawit dalam nanti implementasi Perpres dan sebagainya, Komisi IV DPR RI siap menerima, menampung teman-teman asosiasi untuk memperjuangkan masalah selanjutnya.

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Izin Pimpinan.

Jadi sebaiknya memang Pasal 5 itu sangat penting tetapi sebelum mempromosikan mungkin dijadikan Nomor 5. Nomor 5 ini dijadikan nomor 6 “Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pelaku usaha untuk sertifikasi ISPO dan menyiapkan prakondisi kepada petani kelapa sawit untuk mendapatkan ISPO.” Itu yang lebih, karena dia sudah 8 tahun hukumnya wajib. Prakondisinya itu.

“Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan ISPO bagi perusahaan”. Pelaku usaha ada 2. “Bagi perkebunan kelapa sawit dan menyiapkan prakondisi untuk petani kelapa sawit”

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar-sebentar. Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke poin 6 saja ya? sebelum sebelum kita mempromosikan kita mengoptimalkan dulu. Intinya begitu Pak Sekjen?

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Bukan. Karena prakondisi ini bukan hanya kawasan hutan. Tapi ada wacana (suara tidak jelas), ada kepala bidang

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mengerti. Tapi maksudnya dengan poin Bapak itu kami tampung di poin nomor 5 tadi, sebelum kita mempromosikan. Intinya itu? maunya mengoptimalkan dulu kan? Oke jadi gini Pak. 5 nya di itu, poin 5 “yang mengoptimalkan” dimulai dari “mendorong” yang poin ke ke-6. Jadi poin ke-6 bunyinya “Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan ISPO”, gimana tadi bahasanya Pak?

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Bagi perusahaan, oh mau digabung ke 6?

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mau digabungkan iya.

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Mengoptimalkan ISPO bagi perusahaan dan..

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Mengoptimalkan ISPO. Enggak, enggak apa-apa. Dengarin Mas, dengar dari saya. “Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan *Indonesia*

Sustainable Palm Oil (ISPO)". Ayo ditulis. Enggak-enggak jangan (suara tidak jelas), itu nanti. Itu nanti saya akan masukan kata-kata "selanjutnya". Nah, "bagi perusahaan dan prakondisi ISPO bagi petani"

PIMPINAN RAPAT/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Implementasinya gimana sih di sini? Ini menyangkut birokrasi ini, bukan Bahasa pasar. Coba-coba, biar ini Pak Dirjen ini enggak bingung ini. Mulai tadi kan bingung dengan semua ini. Coba, apa sih yang diinginkan? Kok ketakutan gitu lho. Ini bukan Keputusan Presiden, ini sikap politik kita bersama gitu lho. Ada yang perspektif ke depan dan seterusnya. Coba Pak Sekjen bahasanya *jek mudeng kabeh iki*.

SEKJEN ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (RINO AFRINO S.T., M.M.):

Prakondisi itu adalah pemenuhan persyaratan-persyaratan ISPO.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oke.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F- PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Pimpinan, maaf.

Kalau buat saya ya kalimat ini muncul mungkin lebih menakutkan. Karena yang pertama cuma promosi sangat, ya promosi sangat, yang namanya promosi, iklan kan? Meyakinkan orang. Tapi kok ini kan sudah mengoptimalkan, lebih mendorong (suara tidak jelas) ISPO sebenarnya kalau menurut saya ya.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya, benar juga itu. Pak gini ya, boleh enggak kita kembali ke awal saja? Sekali lagi ini saya katakan Bapak, tidak ada pengkondisian apapun di dalam kesimpulan rapat ini. Ini bahasanya pun kita mendorong kok, kita enggak mewajibkan pemerintah di sini ya. Jadi saya rasa kita tidak berkepanjangan lagi. Nanti ini pada bingung semua ini, ya? Pak kita enggak mewajibkan Pak. Kita ini kalau ini enggak ada yang kita wajibkan di sini, Pemerintah ini enggak kita wajibkan. Kita mendorong untuk promosi. Nah ya, jadi kembali ke laptop.

Ya, Komisi IV nomor 5 saya kita bisa kita tuntaskan.

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

6. Komisi IV DPR RI menerima usulan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Asosiasi Plasma PIR Indonesia terkait dengan

dukungan peremajaan sawit rakyat, peningkatan SDM melalui penyuluhan, sarana prasarana, riset, dan promosi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS membahas dukungan anggaran untuk perkembangan kelapa sawit plasma nasional.

Anggota? Anggota kayaknya oke. Pak Dirjen dan asosiasi? Sebentar kita Pak Dirjen dulu, silakan Pak Dirjen.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Mungkin itu tidak usah sawit plasma nasional. Sawit rakyat, gitu saja sudah langsung *to the point*.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

“Perkembangan kelapa sawit rakyat” titik. Pak, tadi ada masukan di belakang?

ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA:

Istilah itu Asosiasi Plasma PIR bukan itu, kepanjangannya adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Perkebunan. PIR Perkebunan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Perkebunan. Indonesianya hilang Pak? Dalam kurung ASPEKPIR. Bagaimana Pak Dirjen? Asosiasi?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Koreksi, “peningkatan SDM melalui penyuluhan”, “peningkatan SDM” saja Pak.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Peningkatan SDM saja? Oke. Sudah mencakup semua. Saya ulang ya.

Komisi IV DPR RI menerima usulan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Perkebunan (ASPEKPIR) terkait dengan dukungan peremajaan sawit rakyat, peningkatan SDM, sarana prasarana, riset, dan promosi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membahas dukungan anggaran untuk perkembangan kelapa sawit rakyat.

Teman-teman Komisi IV? Pak Dirjen? Asosiasi?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Itu bukan “perkembangan”, “untuk pengembangan”
KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Mana-mana? Oh “untuk pengembangan kelapa sawit rakyat”. Oke?

(RAPAT: DISETUJUI)

Terima kasih.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data dan peta kawasan perkebunan kelapa sawit baik dari perkebunan rakyat, perusahaan perkebunan swasta, dan perusahaan perkebunan negara.

Pak Bambang? Teman-teman anggota cocok? Pak Dirjen?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Itu ya maksudnya data itu dalam bentuk spasial. Makanya data dan peta, itu kan dan saat ini kami sampaikan bahwa kita punya nanti akan ada satu data. Itu yang dimaksud itu kan? Nah itu artinya bahwa “Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data” gitu saja. Peta itu juga data, Cuma spasial itu. “Data perkebunan kelapa sawit” kawasannya enggak usah.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Bambang, nah ini (suara tidak jelas)

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Data dan peta.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirjen.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Ya, ya kalau perspektif, kalau mau dieksplisitkan boleh lah. Peta itu artinya data spasial. Tapi oke kalau mau (suara tidak jelas)

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Maksud Pak Dirjen Pak Bambang, peta itu sudah memang data tapi Pak Dirjen enggak keberatan kalau memang tetap ingin.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Belum Pak, data itu bentuknya macam-macam. Tapi kalau peta jelas spesifik itu. Bagaimana kita bisa tahu kalau lokasi itu masuk Kawasan hutan apa tidak? Itu penting bagi kita Pimpinan. Dasar kita nanti itu buat Panja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Dirjen enggak keberatan?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Makanya kami setuju Pak. Jadi yang mau kita serahkan awal ini adalah peta tutupan sawit, itu nanti data spasialnya. Dari situ kami kembangkan menjadi tematik. Tematiknya itu nanti kita *overlay*-kan dengan itu masuk kawasan apa tidak? Tanaman menghasilkan apa belum menghasilkan? Umurnya, berdasarkan umur. Kemudian nanti kan berubah yang rakyat berapa, yang swasta berapa, yang BUMN berapa. Itu yang nanti kami sampaikan.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik, tapi saya rasa bisa diterima seperti ini Pak? Oke?

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data dan peta kawasan perkebunan kelapa sawit baik dari perkebunan rakyat, perusahaan perkebunan swasta maupun perusahaan perkebunan negara.

Pak Bambang oke ya? Pak Dirjen tadi oke?

(RAPAT: DISETUJUI)

Terakhir, Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Perkelapasawitan atau komoditas strategis.

Kita mau kelapa sawit saja? yang lain nanti bisa menyusul. “komoditas strategisnya” dihapus. “Tentang Kelapa Sawit”

Anggota setuju?

(RAPAT: DISETUJUI)

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Izin, mohon maaf.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak.

KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (JOKO SUPRIYONO):

Apakah tidak sebaiknya diperjelas justifikasi Panja. Maksud saya ini nanti pada posisi fokus mana, gitu. Supaya nanti juga *anu* baik gitu.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Itu nanti kebijakan kami di interen Pak, akan kita diskusikan. Terima kasih.

Pak Dirjen?

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Bisa ditambah satu lagi Pak? Ini usul saja kalau memungkinkan karena tadi kita sudah sepakat sawit ini barokah. Jadi kalau barokah, bagaimana ini kan Dirjenbun ini kan mengurus 127 tanaman perkebunan Pak. Kami meminta dari petani sawit bagaimana kalau sawit ini diurus oleh satu orang Dirjen, namanya Dirjen Kelapa Sawit.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Aduh Pak itu nanti kejauhan Pak ya.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Kan usul. Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak.

Nanti kalau memang ada kesempatan kita bisa diskusi lanjut lah.

Demikian rancangan kesimpulan rapat. Kami persilakan Pak Dirjen kalau ada penutup.

DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Baik Pimpinan.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

**Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI.
Bapak/Ibu para Ketua Umum GAPKI, APKASINDO, ASPEKPIR, dan teman-teman
sekalian.**

Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas arahan Komisi IV DPR RI khususnya yang berkaitan dengan upaya kita untuk mengatasi, mendapatkan solusi permasalahan di perkelapasawitan. Terima kasih, kami atas nama Pemerintah menindaklanjuti itu dan tentu komunikasi dan konsultasi kami lakukan.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

**Pak Dirjen
Para Ketua Umum dan para pengurus asosiasi
Pimpinan dan anggota Komisi IV yang saya hormati.**

Terima kasih.

Demikian berakhir sudah RDP/RDPU pada hari ini. Atas nama pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila dalam memimpin rapat terjadi banyak kekurangan. Dan kalau sampai larut malam, intinya kami disini untuk *men-support* Bapak-Bapak sekalian. Kami mohon doanya semoga RDP/RDPU hari ini bisa membuahkan hasil yang baik untuk kita khususnya para pemangku kebijakan dan kepentingan kelapa sawit. Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat/RDPU pada malam hari ini saya tutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 20.00 WIB)

Jakarta, 25 November 2019

a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat,

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001**